



## KATA PENGANTAR



PUTU AGUS SURADNYANA, ST  
*Bupati Buleleng*

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara NugrahaNya*, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Buleleng Tahun 2016, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



(RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012 – 2017. Laporan ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Secara substansial Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng, merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan misi, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, dan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Buleleng tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintahan daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi, maupun pengawasannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan parameter pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2016 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 9 Maret 2016

Bupati Buleleng

PUTU AGUS SURADNYANA



**DAFTAR ISI**



<b>KATA PENGANTAR .</b>	<b>i</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iv</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>v</b>	
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.</b>	<b>vi</b>	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	3
	1.3 Sejarah Kabupaten Buleleng	3
	1.4 Gambaran Umum Daerah	7
	1.5 Isu-isu Strategis	29
	1.6 Struktur Pemerintah Daerah.	30
	1.7 Keragaan SDM	33
	1.8 Inovasi Dalam Reformasi AKIP dan Pengelolaan Kinerja	34
	1.9. Sistematika Penyajian	36
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>39</b>
	2.1. RPJMD 2012-2017	39
	2.2. Indikator Kinerja Makro dan IKU.	59
	2.3. Perjanjian Kinerja.	60
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>61</b>
	3.1 Kerangka Pengukuran	61
	3.2 Capaian Kinerja	63
	3.3 Evaluasi Kinerja	70
	3.3 Akuntabilitas Keuangan.	124
	3.4 Prestasi yang Dicapai Kabupaten Buleleng Tahun 2016.	127
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>129</b>
<b>LAMP.1</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>131</b>
<b>LAMP.2</b>	<b>PERJANJIAN KINERJA BUPATI BULELENG</b>	<b>147</b>
<b>LAMP.3</b>	<b>HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN</b>	<b>154</b>



## DAFTAR TABEL



Tabel 1.1	Jumlah dan Komposisi penduduk Kabupaten Buleleng	17
Tabel 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali	23
Tabel 1.3	Perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng 2013-2015 (Juta Rupiah ) Tahun Dasar 2010	25
Tabel 1.4	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Buleleng 2013-2015 (Juta Rupiah) Tahun Dasar 2010	26
Tabel 1.5	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Buleleng Atas Dasar Haega Berlaku Tahun 2013-2015	28
Tabel 1.6	Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Tahun 2015	34
Tabel 1.7	Jumlah PNS pemerintah Kabupaten Buleleng Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2015	34
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	43
Tabel 2.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	45
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng	59
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja	63
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Makro Kabupaten Buleleng 2013-2016	64
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Kabupaten Buleleng Tahun 2016	65
Tabel 3.4	Rasume Predikat Capaian Kinerja Sasaran	68
Tabel 3.5	Resume Predikat Capaian 100 Indikator Kinerja	69
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016	125
Tabel 4.1	Simpulan Capaian Kinerja	129



## DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1	Peta Wilayah Kabupaten Buleleng	7
Gambar 1.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buleleng	16
Gambar 1.3	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali	24
Gambar 1.4	Matrik Perubahan Klasifikasi PDRB	26
Gambar 1.5	Diagram Struktur Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2015	28
Gambar 1.6	Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng	30
Gambar 1.7	Alur Pikir Pengukuran Kinerja	37
Gambar 3.1	Pengolahan Produk Pertanian: Mendorong Produksi	71
Gambar 3.2	Lomba Pengolahan Ikan: Mendorong Konsumsi dan Produksi	75
Gambar 3.3	Produksi Industri Kecil dan Rumah Tangga	81
Gambar 3.4	Pelatihan Pembuatan Web dalam Rangka E-Gov.	106
Gambar 3.5	Penghargaan WTN untuk Kabupaten Buleleng Tahun 2016	112



**RINGKASAN EKSEKUTIF**



Tahun 2016 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah berupaya keras menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan yang baik memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki 46 Sasaran dengan 100 Indikator Kinerja dengan target yang terus ditingkatkan yang ingin dicapai setiap tahun selama periode rencana strategis. Tahun 2016 Bupati Buleleng telah membuat Perjanjian Kinerja untuk mencapai 46 Sasaran dengan 100 Indikator Kinerja tersebut.

Berdasarkan pengukuran kinerja atas 46 Sasaran dengan 100 Indikator Kinerja sasaran maka diperoleh nilai capaian indikator kinerja dan nilai rata-rata capaian sasaran strategis. Nilai-nilai itu diberi predikat, supaya memiliki makna.

Predikat nilai capaian kinerja tahun ini dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal disajikan sebagai berikut.

Angka Capaian	Predikat	Warna
1	2	3
91-100	Sangat Berhasil	Dark Blue
76- 90	Berhasil	Light Blue
61- 75	Cukup Berhasil	Yellow
46- 60	Kurang	Orange
0-45	Sangat Kurang	Red

Berdasarkan pemberian predikat atas nilai rata-rata capaian sasaran tahun ini, maka predikat 46 sasaran yang berhasil diraih tahun 2016 adalah sebagai berikut.



No	Predikat	Jumlah Sasaran	Persentase
1	2	3	4
1	Sangat Berhasil	38	82,61
2	Berhasil	4	8,70
3	Cukup	3	6,52
4	Kurang	1	2,17
5	Sangat Kurang	0	0
	Jumlah	46	100

Dilihat dari Capaian 46 Sasaran, maka dapat disampaikan 38 (82,61%) Sasaran memperoleh predikat Sangat Berhasil; empat (8,70%) Sasaran memperoleh predikat Berhasil; tiga (6,52%) Sasaran memperoleh predikat Cukup; dan satu (2,17%) Sasaran memperoleh predikat Kurang.

Berdasarkan pemberian predikat atas capaian indikator kinerja, maka predikat 100 indikator kinerja adalah sebagai berikut.

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja	Persentase
1	2	3	4
1	Sangat Berhasil	81	81
2	Berhasil	10	10
3	Cukup	5	5
4	Kurang	3	3
5	Sangat Kurang	1	1
	Jumlah	100	100

Dilihat dari capaian 100 indikator kinerja, maka dapat disampaikan, 81 (81%) indikator mendapat predikat Sangat Berhasil; 10 (10%) indikator memperoleh predikat Berhasil; lima (5%) indikator memperoleh predikat Cukup; tiga (3%) indikator memperoleh predikat Kurang; dan satu (1%) indikator memperoleh predikat Sangat Kurang.



Pencapaian capaian kinerja tersebut karena ada komitmen membangun pemerintah yang memuaskan dengan akuntabel serta sinergi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kekurangan, berupa kelemahan capaian yang **Cukup**, **Kurang** dan **Kurang Berhasil** akan dijadikan referensi dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja ke depan.



# BAB I PENDAHULUAN



## Bab I Memuat

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Sejarah Kabupaten Buleleng
- 1.4 Gambaran Umum Daerah
- 1.5 Isu Strategis
- 1.6 Struktur Pemerintah Daerah
- 1.7 Keragaan SDM Daerah
- 1.8 Inovasi Dalam Reformasi AKIP dan Pengelolaan Kinerja
- 1.9 Sistematika Penyajian

### 1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah),

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Pemerintahan yang baik merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan barang-barang dan jasa-jasa publik. Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Upaya mewujudkan



pemerintahan yang baik, yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesionalitas, serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, serta bebas dari KKN telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 3 dalam undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas, serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut, maka telah diterbitkan pula Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tersebut mewajibkan setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam persepektif yang lebih luas, LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

LKjIP yang baik haruslah didahului dengan tercapainya secara baik sasaran kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti



LAKIP. Tidak mungkin dibuat LKjIP yang baik kalau kinerja instansi pemerintah tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja.

LKjIP Kabupaten Buleleng Tahun 2016 ini disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017, mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memerhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2016 yang merupakan kinerja tahun **keempat** pelaksanaan RPJMD tahun 2012-2017. LAKIP Tahun 2016 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasannya yang memadai atas kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

LKjIP Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKjIP juga menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **1.3 Sejarah Kabupaten Buleleng**

Masyarakat Buleleng sangat bangga memiliki sejarah dengan cikal bakal kerajaan Buleleng yang didirikan oleh seorang Raja pemberani, Ki Barak Panji Sakti, yang mendirikan Kerajaan Buleleng pada tanggal 30 Maret tahun 1604. Ki Barak Panji Sakti selalu dijadikan



teladan dan inspirasi. Tanggal pendirian Kerajaan Buleleng kemudian dijadikan sebagai hari lahir Kota Singaraja, ibu kota Kabupaten Buleleng. Dari pelajaran yang diberikan oleh sejarah kita dapat bercermin dari masa lampau. Dari pelajaran yang diberikan oleh sejarah, kita juga dapat pelajaran untuk bertindak di masa kini. Dan dari pelajaran yang diberikan oleh sejarah, kita dapat belajar untuk menggapai masa depan yang dicita-citakan.

Berdirinya Kerajaan Buleleng dimulai dari perjalanan seorang tokoh, putera Raja Gelgel, Kelungkung bernama Ki Barak Sakti. Tersebutlah Istana Gelgel pada sekitar tahun 1568 dalam suasana tenang, dimana Raja Sri Aji Dalem Sigening menitahkan putranda Ki Barak Sakti, supaya kembali ketempat tumpah darah Bundanya di Den Bukit (Bali Utara). Ki Barak Panji bersama Bunda Sri Luh Pasek, setelah memohon diri kehadapan Sri Aji Dalem lalu berangkat menuju Den Bukit diantar oleh empat puluh orang pengiring Baginda yang dipelopori oleh Ki Kadosot

Perjalanan mereka memasuki hutan lebat sangat mengerikan, udara yang sangat dingin menggigilkan, menembus celah-celah bukit, mendaki Gunung-gunung meninggi, menuruni jurang-jurang curam, dan akhirnya mereka tiba pada suatu tempat yang agak mendatar. Pada tempat itulah mereka melepaskan lelah seraya membuka bungkusuan bekal mereka. Sekali mereka makan ketupat, mereka sembahyang, kemudian mereka diperciki air/tirta oleh Sri Luh Pasek, demi keselamatan perjalanannya, belakangan tempat itu diberi nama “YEH KETIPAT”. Rombongan Ki Barak Panji telah tiba di Desa Gendis/Panji dengan selamat.

Tersebutlah Ki Pungakan Gendis, pemimpin desa yang sekali-kali tiada menghiraukan keluh kesah para penduduknya. Ia memerintah hanya semata-mata untuk memenuhi nafsu buruknya, kesenangannya hanyalah bermain judi, terutama sabungan ayam. Oleh karena demikian sikap pemimpin Desa Gendis itu, maka makin lama makin dibenci rakyatnya, dan pada saat terjadi peperangan, ia dibunuh oleh Ki Barak Panji.

Desa Gendis di perintah oleh Ki Barak Panji, seorang pemimpin yang gagah berani, adil dan bijaksana. Ki Barak Panji mendengar adanya kapal layer Tionghoa terdampar, kemudian timbullah rasa belas kasihan untuk menolong pemilik kapal tersebut. Baginda bersama-sama dengan Ki Dumpyung dan Ki Kadosot dapat membantu menyelamatkan kapal



layer yang terdampar itu di pantai segara penimbangan. Setelah bantuannya berhasil, baginda mendapat hadiah seluruh isi kapal tersebut berupa barang-barang tembikar seperti piring, mangkok, dan uang kepeng yang jumlahnya sangat besar.

Kepemimpinan Ki Barak Panji makin lama makin terkenal, beliau selalu memperhatikan keadaan rakyatnya, mengadakan pembangunan di segala bidang baik fisik maupun spiritual. Oleh karena demikian maka sekalian penduduk Desa Gendis dan Sekitarnya, secara bulat mendaulat Baginda supaya menjadi Raja, yang kemudian dinobatkan dengan gelar “Ki Gusti Ngurah Panji Sakti”.

Untuk mencari tempat yang agak datar, maka Kota Gendis serta Kahyangan Pura Bale Agung-nya di pindahkan ke Utara Desa Panji. Pada tempat yang baru inilah Baginda mendirikan istana lengkap dengan Kahyangan Pura Bale Agungnya. Guna memenuhi kepentingan masyarakat desanya untuk menghantar persembahyangan di dalam pura maupun upacara di luar pura, serta untuk hiburan-hiburan lainnya, maka Baginda membuat seperangkat gamelan gong yang masing-masing di beri nama sebagai berikut :

- a. Dua buah gongnya di beri nama Bentar Kedaton
- b. Sebuah bendennya di beri nama Ki Gagak Ora
- c. Sebuah keniknya bernama Ki Tudung Musuh
- d. Teropong bernama Glagah Ketunon
- e. Gendangnya bernama Gelap Kesanga
- f. Keseluruhannya bernama “Juruh Satukad”.

Karna perbawa dan keunggulan Ki Gusti Ngurah Panji Sakti, maka Kyai Alit Mandala, lurah kawasan Bondalem tunduk kepada Baginda. Kemudian atas kebijaksanaanya maka Kyai Alit Mandala, diangkat kembali menjadi lurah yang memerintah di kawasan Bondalem, Buleleng Bagian Timur.

Pada sekitar tahun 1584 Masehi, untuk mencari tempat yang lebih strategis maka Kota Panji dipindahkan kesebelah Utara Desa Sangket. Pada tempat yang baru inilah Baginda selalu bersuka ria bersama rakyatnya sambil membangun dan kemudian tempat yang baru ini di beri nama “SUKASADA” yang artinya slalu Besruka Ria.selanjutnya di ceritakan berkat keunggulan Ki Gusti Panji Sakti, maka Kyai Sasangka Adri, Lurah kawasan Tebu Salah



(Buleleng Barat) tunduk kepada baginda. Lalu atas kebijaksanaan beliau maka Kyai Sasangka Adri diangkat kembali menjadi Lurah di kawasan Bali Utara Bagian Barat.

Untuk lebih memperkuat dalam memepertahankan daerahnya, Ki Gusti Ngurah Panji Sakti segera membentuk pasukan yang di sebut “Truna Goak” di Desa Panji. Pasukan ini dibentuk dengan jalan memperpolitik seni permainan burung gagak, yang dalam Bahasa Bali disebut “Magoak-goakan”. Dari permainan ini akhirnya terbentuknya pasukan Truna Goak yang berjumlah 2000 orang, yang terdiri dari para pemuda perwira berbadan tegap, tangkas, serta memiliki moral yang tinggi di bawah pimpinan perang yang bernama Ki Gusti Tamblang Sampun dan di wakili oleh Ki Gusti Made Batan.

Ki Gusti Ngurah Panji Sakti beserta putra-putra Baginda dan perwira lainnya, memimpin pasukan Truna Goak yang semuanya siap bertempur berangkat menuju daerah Blambang. Dalam pertempuran ini Raja Blambangan gugur di medan perang dengan demikian kerajaan Blambangan dengan seluruh penduduknya tunduk pada Raja Ki Gusti Ngurah Panji Sakti. Berita kemenangan ini segera di dengar oleh Raja Mataram Sri Dalem Solo dan kemudian beliau menghadiahkan seekor gajah dengan 3 orang pengembalanya kepada Ki Gusti Ngurah Panji Sakti. Menundukkan kerajaan Blambangan harus ditebus dengan kehilangan seorang putra Baginda bernama Ki Gusti Ngurah Panji Nyoman, hal mana mengakibatkan Baginda Raja selalu nampak bermuram durjan. Hanya berkat nasehat-nasehat Pandita Purohito, akhirnya kesedihan Baginda dapat terlupakan dan kemudian terkandung maksud untuk membangun istana yang baru di sebelah Utara Sukasada.

Pada sekitar tahun Candrasangkala “Raja Manon Buta Tunggal” atau Candrasangkala 6251 atau sama dengan tahun caka 1526 atau tahun 1604 Masehi, Ki Gusti Ngurah Panji Sakti memerintahkan rakyatnya memabat tanah untuk mendirikan sebuah istana di atas padang rumput alang-alang, yakni ladang tempat penggembala ternak, dimana ditemukan orang-orang menanam Buleleng. Pada ladang Buleleng itu Baginda melihat beberapa buah pondok-pondok yang berjejer memanjang. Di sanalah beliau mendirikan istana yang baru, yang menurut perhitungan hari sangat baik pada waktu itu, jatuh pada tanggal “30 Maret 1604”.



Selanjutnya kerajaan yang didirikan oleh Ki Gusti Ngurah Panji Sakti disebut Kerajaan Buleleng, Cikal bakal Kabupaten Buleleng, dan Istana Raja yang baru dibangun itu disebut “SINGARAJA” karena mengingat bahwa keperwiraan Raja Ki Gusti Ngurah Pnji Sakti tak ubahnya seperti Singa.

Demikianlah hari lahirnya Kota Singaraja pada tanggal 30 Maret 1604 yang bersumber pada sejarah Ki Gusti Ngurah Panji Sakti, sedangkan nama Buleleng adalah nama asli jagung gambal atau jagung gambah yang banyak ditanam oleh penduduk pada waktu itu.

## **1.4 Gambaran Umum Daerah Kabupaten Buleleng**

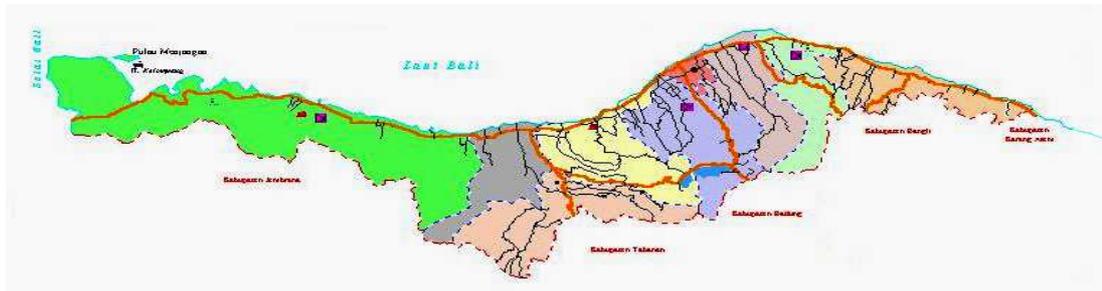
### **1.4.1 Kondisi Geografis Daerah**

#### **a. Letak Geografis**

Kabupaten Buleleng terletak di belahan utara Pulau Bali memanjang dari Barat ke Timur. Secara Geografis Kabupaten Buleleng terletak pada posisi 8° 03' 40" - 8° 23' 00" Lintang Selatan dan 114° 25' 55" - 115° 27' 28" Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

- Utara : Laut Jawa/Bali
- Timur : Kab. Karangasem.
- Selatan : Kab. Bangli, Badung, Tabanan dan Jembrana.
- Barat : Kab. Jembrana.

Peta administratif Wilayah Kabupaten Buleleng digambarkan pada gambar 1.1 Berikut.



Gambar 1.1.

Peta Administratif Wilayah Kabupaten Buleleng

## b. Luas Wilayah

Kabupaten Buleleng memiliki wilayah yang paling luas diantara 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali, yaitu seluas 1.365,88 km<sup>2</sup> (24,25% dari luas Provinsi Bali) dengan panjang pantai ± 157,05 km.

Secara administrasi terdiri dari 9 Kecamatan, 19 Kelurahan, 129 Desa dan 166 Desa Pakraman/Desa Adat, dengan luas wilayah masing-masing kecamatan sebagai berikut :

- Kecamatan Gerokgak	: 356,57 Km <sup>2</sup>	atau	26,11%;
- Kecamatan Busungbiu	: 196,62 Km <sup>2</sup>	atau	14,40%;
- Kecamatan Sukasada	: 172,93 Km <sup>2</sup>	atau	12,66%;
- Kecamatan Banjar	: 172,60 Km <sup>2</sup>	atau	12,64%;
- Kecamatan Kubutambahan	: 118,24 Km <sup>2</sup>	atau	8,66%;
- Kecamatan Seririt	: 111,78 Km <sup>2</sup>	atau	8,18%;
- Kecamatan Tejakula	: 97,68 Km <sup>2</sup>	atau	7,15%;
- Kecamatan Sawan	: 92,52 Km <sup>2</sup>	atau	6,77%;
- Kecamatan Buleleng	: 46,94 Km <sup>2</sup>	atau	3,44%.

## c. Topografi

Wilayah Kabupaten Buleleng yang membujur dari barat ke timur memiliki topografi yang sangat unik dibandingkan daerah lainnya di Bali, dapat diidentifikasi bahwa di bagian selatan merupakan wilayah dengan topografi yang sebagian besar pegunungan dan perbukitan, sedangkan di bagian utara merupakan



wilayah dataran di sepanjang pantai dari timur ke barat. Dilihat dari kondisi morfologi atau topografi daerah Buleleng, sebagian luas lahannya 70.226 Ha (51,41%) merupakan daerah landai, sebagian lagi 21.462,75 Ha (15,71%) daerah miring dan 32.643,50 Ha (23,89%) daerah terjal, sisanya 12.264,75 Ha (8,98%) daerah datar.

Kondisi topografi yang demikian ini melahirkan sebutan lain untuk wilayah Buleleng yaitu “*Nyegara-Gunung*” yang mengindikasikan begitu menyatunya antara pegunungan dan pantai/laut. Diantara perbukitan yang membentang di bagian selatan tersebut terdapat gunung yang bukan gunung berapi. Gunung yang tertinggi adalah Gunung Tapak (1903 m) berada di Kecamatan Sukasada dan yang terendah Gunung Jae (222 m) di Kecamatan Gerokgak. Berdasarkan kondisi morfologi atau topografi daerah Buleleng, sebagian luas lahannya atau seluas 70.226 Ha (51,41%) merupakan daerah berbukit/pegunungan.

#### **d. Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya dengan luas 89.593,67 H meliputi kawasan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan, industri, permukiman, fasilitas penunjang permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

- 1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, luasnya 4.731,95 Ha yang terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi terbatas dan kawasan peruntukan hutan produksi tetap. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 3.207 Ha, terdapat di Kecamatan Gerokgak seluas kurang lebih 2.910,40 Ha, di Kecamatan Seririt seluas kurang lebih 112,00 Ha dan di Kecamatan Tejakula seluas kurang lebih 185,55 Ha. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 1.524 Ha terdapat di Kecamatan Gerokgak seluas kurang lebih 1.274,40 Ha, dan di Kecamatan Seririt seluas kurang lebih 249,60 Ha, yang eksploitasinya dilakukan dengan sistem jalur dan tidak tebang habis. Untuk pengembangan hutan produksi di luar kawasan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan-lahan kritis di tiap kecamatan.
- 2) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat, luasannya tidak dapat dipetakan dengan tegas karena berada pada kawasan-kawasan di sekitar kawasan lindung atau



bercampur dengan kawasan budidaya lainnya dalam luasan yang relatif kecil. Sebaran kawasan peruntukkan hutan rakyat terutama pada kawasan-kawasan dengan kemiringan di atas 40% (empat puluh persen), pada kawasan yang berbatasan dengan hutan lindung, pada kawasan di dalam radius kawasan tempat suci, serta kawasan lainnya, meliputi Kecamatan Gerokgak, Seririt, Sukasada dan Kubutambahan.

- 3) Kawasan Peruntukan Pertanian, luasnya 48.741,51 Ha atau 35,68% dari luas wilayah kabupaten yang terdiri dari kawasan peruntukan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan Peternakan. Semua kawasan ini memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan Nasional maupun regional. Peranan Sektor tanaman pangan dan hortikultura tidak hanya terhadap ketahanan pangan tetapi juga menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir, yang kontribusinya cukup besar pada pertumbuhan ekonomi. Disamping itu Sektor perkebunan dan Peternakan juga berperan penting dalam penyediaan lapangan kerja, konservasi dan pelestarian sumber daya alam, pengentasan kemiskinan, memelihara nilai-nilai sosial dan budaya pedesaan serta pelestarian lingkungan. Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan berikut.
  - a) Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan, adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah (tanah sawah), di mana sistem pengairannya diperoleh secara alami maupun teknis. Tanaman pangan basah (padi sawah) untuk tahun 2015 dengan luas panen 22.198 Ha dengan hasil 133.440 ton (Gabah Kering Giling-GKG) yang terdapat di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng kecuali Kecamatan Tejakula, jika dibandingkan Hasil panen tahun 2014 sebesar 136.286 ton (GKG) terjadi penurunan produksi sebesar 2,13% (*sumber: Buleleng Membangun 2016*);
  - b) Kawasan Hortikultura, adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tambak, tegal/kebun, hutan negara atau tanaman perkebunan lainnya. Kawasan hortikultura tahun 2015 dengan luas panen seluruhnya 81.359 Ha yang terdapat hampir di semua wilayah kecamatan (*sumber: Buleleng Membangun 2016*);



- c) Kawasan Peruntukan Perkebunan, kawasan ini menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri. Luas lahan perkebunan rakyat tahun 2014 adalah 34.680 Ha berada hampir di semua wilayah kecamatan. Jenis tanaman yang dikembangkan terdiri dari kelapa dalam, kelapa hibrida, kopi robusta, kopi arabika, cengkeh, vanili, kakao, jambu mete, kapok, lada, tembakau virginia, aren, lontar, kunir, kelapa genjah, kapas, dan jarak.
- d) Kawasan Peruntukan Perikanan, berdasarkan kondisi geografis dan berdasarkan administrasi Kabupaten Buleleng terbagi menjadi 9 Kecamatan yang terdiri dari 7 Kecamatan memiliki wilayah pantai (pesisir) dan 2 Kecamatan tidak memiliki wilayah pantai, tetapi memiliki danau dan sawah. Jadi dilihat dari luas wilayah daratan dan lautan kabupaten Buleleng hampir berimbang. Dengan melihat kondisi tersebut, Kabupaten Buleleng mempunyai potensi yang sangat besar dibidang perikanan baik laut maupun darat. Lahan pengembangan budidaya perikanan (kerapu, bandeng, rumput laut, mutiara, tambak, kolam, mina padi, dan Keramba Jaring Apung-KJA) pada tahun 2014 dengan hasil produksi 2.066,2 ton naik dari tahun 2013 sebesar 1.962,8 ton (Buleleng Membangun 2016). Untuk perikanan laut penyebarannya hampir di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Sukasada dan Busungbiu, yang meliputi budidaya kerapu, bandeng, rumput laut dan mutiara. Untuk perikanan darat meliputi produksi ikan sidat, mujair, nila, mas, tawes, betutu, udang tawar dan lainnya.
- e) Kawasan Peruntukan Peternakan
- Kawasan ini terdapat hampir di seluruh kecamatan. Jenis ternak yang diusahakan adalah sapi potong, kerbau, babi bali, babi sadel back, kambing kacang, kambing PE, ayam buras, ayam ras, itik, babi landrace, dan aneka ternak (Buleleng Membangun 2016).
- 4) Pariwisata

Wilayah Buleleng yang *Nyegara Gunung* dan memiliki pantai yang cukup panjang menjadikan wilayah Buleleng memiliki panorama alam yang indah dan mempesona sebagai Kawasan Daya Tarik Wisata (KDTW) dan



Daya Tarik Wisata (DTW) seperti air terjun, danau, sawah terasering dan DTW lainnya. Demikian juga keindahan alam pantainya yang menyimpan banyak potensi, khususnya terumbu karang, ikan hias dengan pantai yang berpasir hitam maupun berpasir putih (di kawasan Taman Nasional Bali Barat), merupakan daya tarik wisata yang sangat potensial.

Dari sisi budaya dan seni, Buleleng juga banyak memiliki keunikan tradisi dan berbagai macam kesenian khas yang kesemuanya itu merupakan potensi besar yang dapat dikembangkan menjadi obyek dan daya tarik wisata yang sampai saat ini sedang diupayakan secara maksimal. Berkaitan dengan budaya dan seni yang menjadi daya dukung pariwisata, diperlukan tindakan/upaya penggalian, pengembangan budaya dan seni serta konservasi dan pelestarian.

Berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng no 9 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng, maka telah ditetapkan tiga kawasan strategis pariwisata yaitu:

- a) Kawasan Pariwisata Batu Ampar (seluas 14.124 Ha) meliputi 5 Desa (Penyabangan, Banyupoh, Pemuteran, Sumberkima, dan Pejarakan);
  - b) Kawasan Pariwisata Kalibukbuk/Lovina (seluas 3.524 Ha) meliputi 7 Desa (Kalibukbuk, Pemaron, Tukadmungga, Anturan, Kaliasem, Temukus, dan Tigawasa);
  - c) Kawasan Pariwisata Air Sanih (seluas 8.174 Ha) yang meliputi 10 Desa (Bukti, Pacung, Sembiran, Tejakula, Julah, Bondalem, Les, Penuktukan, Sambirenteng, dan Tembok). Kabupaten Buleleng sendiri memiliki 57 daya tarik wisata (DTW). Secara khusus, wilayah pesisir Kabupaten Buleleng juga memiliki kekayaan dan keanekaragaman potensi wisata yang cukup besar. Hamparan terumbu karang di beberapa lokasi seperti Pulau Menjangan, Sumberkima, Kawasan Lovina dan di wilayah Kecamatan Tejakula terdapat sumber atraksi wisata bawah laut yang potensial. Apalagi di kawasan Lovina juga terkenal dengan potensi ikan lumba-lumba (*dolphin*) yang sudah lama dijadikan salah satu atraksi wisata di wilayah tersebut.
- 5) Kawasan Peruntukan Industri meliputi : kawasan peruntukan aneka industri dan sentra-sentra industri kecil, terdapat di wilayah Kecamatan



Gerokgak meliputi seluruh desa di Patas, Celukan Bawang, sebagian Desa Pengulon, sebagian Desa Tinga-Tinga, sebagian Desa Tukad Sumaga dengan luas sekitar 1.762 Ha. Sedangkan sentra industri kecil adalah pusat-pusat atau pengelompokan industri kecil yang tersebar di dalam kawasan permukiman. Sentra industri kecil terdapat di wilayah Kecamatan Buleleng, Gerokgak, Banjar, Sukasada, Kubutambahan dan Tejakula.

- 6) Kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan pertambangan di mana untuk wilayah Kabupaten Buleleng potensi kegiatan pertambangan merupakan pertambangan skala kecil meliputi :
  - a) Lokasi kawasan pertambangan batuan tersebar di wilayah kecamatan sesuai dengan potensi masing-masing meliputi: pertambangan batu kapur, batu andesit dan batu mulia di Kecamatan Gerokgak; batu apung, batu merah, batu lahar, batu andesit di Kecamatan Kubutambahan; batu pilah dan batu andesit di Kecamatan Tejakula; tanah liat dan batu andesit di kecamatan Buleleng dan Kecamatan Seririt.
  - b) Lokasi kegiatan pertambangan pengambilan air bawah tanah tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan kapasitas pengeboran sesuai dengan potensi yang tersedia dan pemanfaatannya mengacu pada ketentuan penatagunaan air.
  - c) Kawasan peruntukan pertambangan sumber energi minyak lepas pantai di perairan Laut Bali sesuai potensi yang ada setelah diadakan penelitian serta dinilai layak baik secara ekonomis maupun lingkungan.
- 7) Kawasan peruntukan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan permukiman atau didominasi oleh lingkungan hunian yang diarahkan seluas 10.960,72 ha atau 8,03% dari luas wilayah kabupaten meliputi kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

**e. Kawasan Lindung**

Kawasan Lindung mempunyai luas 46.994,33 Ha atau 34,41% meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam pelestarian



alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya.

- 1) Kawasan Hutan Lindung seluas 31.936,32 ha atau 23,38% dari luas kabupaten terdiri atas :
  - a) Hutan Lindung Puncak Landep di Kecamatan Sukasada dengan luas kurang lebih 590,0 Ha;
  - b) Hutan Lindung Gunung Mungsu di Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Banjar dengan luas kurang lebih 1.134,00 Ha;
  - c) Hutan Lindung Gunung Silangjana di Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Kubutambahan dengan luas kurang lebih 415,00 Ha;
  - d) Hutan Lindung Gunung Batukaru di Kecamatan Banjar, Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Kubutambahan dengan luas kurang lebih 3.964,21 Ha;
  - e) Hutan Lindung Yeh Leh Yeh Lebah di Kecamatan Busungbiu dengan luas kurang lebih 98 Ha;
  - f) Hutan Lindung Bali Barat di Kecamatan Gerokgak dengan luas kurang lebih 24.290,71 Ha; dan
  - g) Hutan Lindung Penulisan Kintamani di Kecamatan Tejakula dengan luas kurang lebih 1.444,40 Ha.
- 2) Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Di Kabupaten Buleleng terdapat kawasan rawan bencana banjir seluas 525 Ha di Kecamatan Gerokgak, Seririt dan Banjar. Sedangkan kawasan erosi pantai dengan total panjang 21,5 Km yang tersebar di Kecamatan Gerokgak, Banjar, Buleleng, Sawan, Kubutambahan, dan Tejakula. Selain itu terdapat pula wilayah-wilayah rawan erosi atau daerah rawan longsor yang antara lain terdapat di Kecamatan Gerokgak, Busungbiu, Sukasada, dan Tejakula.

## 1.4.2 Kondisi Demografis

### a. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan karena yang paling berperan dalam pembangunan adalah penduduk sebagai subyek sekaligus

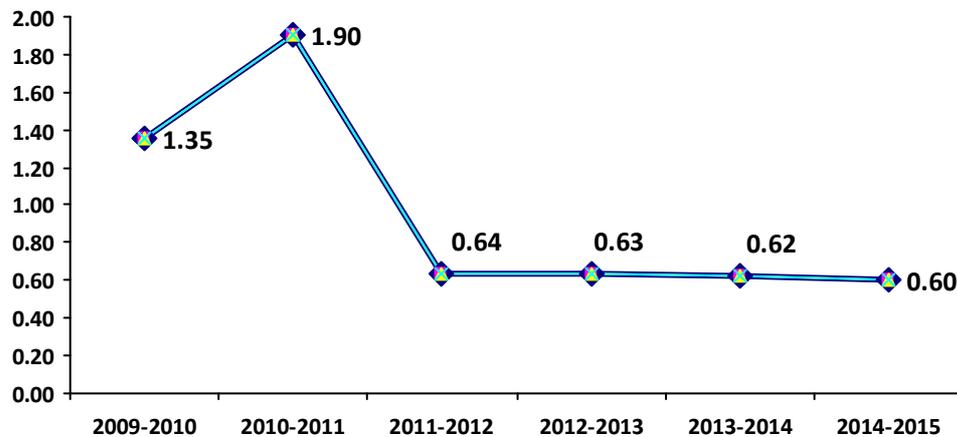


obyek. Apabila tidak dikelola dengan baik jumlah penduduk dapat menimbulkan masalah tersendiri dan menjadi beban pembangunan.

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Perkembangan penduduk di Kabupaten Buleleng selama ini menunjukkan peningkatan, dapat dilihat dari jumlah penduduk (*hasil proyeksi BPS Kab. Buleleng dalam Buleleng Membangun 2016*) pada tahun 2014 dengan komposisi 320.000 jiwa laki-laki dan 322.300 jiwa perempuan dengan sex ratio 99,29, pada tahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng 642.300 dan pada tahun 2015 jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng mencapai 646.200 jiwa dengan komposisi 321.900 jiwa laki-laki dan 324.300 jiwa perempuan dengan sex ratio 99,26. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Buleleng pada tahun 2014-2015 mencapai 0,607%.

Jika dibandingkan dengan hasil registrasi database pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng jumlah penduduk Tahun 2015 sebanyak 807.598 jiwa, jumlah kepala keluarga sebanyak 235.646 jiwa dengan ratio laki-laki sebanyak 403.324 jiwa atau 50,04% dan perempuan sebanyak 404.274 jiwa atau 49,96%. (*Sumber : Disdukcapil. Kab. Buleleng*)

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu sebesar 1,35% sejak tahun 2009-2010, menjadi 1,9% pada tahun 2010-2011, pada tahun 2011-2012 mengalami penurunan menjadi 0,64%, tahun 2012-2013 mengalami penurunan sebesar 0,01% menjadi 0,63%, trend penurunan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Buleleng terus berlanjut pada tahun 2013-2014 menjadi 0,627% turun sebesar 0,024% dan pada tahun 2014-2015 masih mengalami penurunan sebesar 0,02% menjadi 0,607%. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Buleleng digambarkan pada gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.2.  
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buleleng  
Tahun 2009-2015

Pertumbuhan penduduk ini selain dikarenakan adanya fertilitas (pertumbuhan penduduk alami), juga disebabkan adanya pertumbuhan penduduk migrasi, dimana terdapat migrasi masuk yang berpengaruh sangat signifikan terhadap pertumbuhan penduduk di Kabupaten Buleleng. Jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 1.365,88 km<sup>2</sup> sehingga rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2015 adalah 473,10 jiwa/km<sup>2</sup>. Rincian jumlah dan komposisi penduduk Kabupaten Buleleng dapat disajikan pada table 1.1 berikut.

Tabel 1.1.  
Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Buleleng  
Tahun 2015

No.	Kecamatan	Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	sex ratio (%)
1.	Gerokgak	41.470	41.170	82.640	100,73
2.	Seririt	35.240	36.530	71.770	96,47
3.	Busungbiu	20.130	20.400	40.530	98,68
4.	Banjar	35.380	36.060	71.440	98,11
5.	Sukasada	37.720	38.070	75.790	99,080
6.	Buleleng	67.060	67.750	134.81	98.980
7.	Sawan	29.630	30.400	60.030	97,47
8.	Kubutambahan	27.900	27.220	55.120	102,50
9.	Ttejakula	27.370	26.700	54.070	102,51
	<b>Jumlah tahun 2015</b>	<b>321.900</b>	<b>324.300</b>	<b>646.200</b>	<b>99,26</b>
	Jumlah Tahun 2014	320.000	322.300	642.300	99,29

Sumber: Buleleng Membangun 2016.



## b. Tenaga Kerja

Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka secara tidak langsung menuntut penyediaan lapangan kerja. Berdasarkan keadaan pada tahun 2015, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Buleleng adalah sebesar 73,94% yang terdiri dari 72,44% telah bekerja, sekolah 7,65%, mengurus rumah tangga 14,33%, yang sedang mencari kerja (pengangguran) sebesar 1,51% dan lainnya 4,07%.

Pemerintah Daerah telah berupaya dalam hal peningkatan kesempatan kerja dan terserapnya tenaga kerja dalam pasaran kerja. Upaya yang telah dilakukan tersebut diantaranya :

- 1) Meningkatkan keterampilan pencari kerja melalui pelatihan tenaga kerja, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 telah terlatih sebanyak 1.676 orang, dan 2016 sebanyak 148 Ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk menurunkan tingkat pengangguran serta adanya partisipasi aktif dari dunia usaha.
- 2) Penyerapan tenaga kerja melalui program padat karya, selain peningkatan dalam jumlah anggaran juga diikuti peningkatan jumlah tenaga kerja, yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.110.643.400,00 mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 2.053 orang dan pada tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp 630.310.000,00 mampu menyerap 148 orang pekerja.
- 3) Meningkatkan aksesibilitas perijinan melalui pemberian Kemudahan Ijin Usaha.

Hal tersebut diatas terlihat dengan tingkat partisipasi para pelaku usaha di Kabupaten Buleleng mencari Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang pada tahun 2016 tercatat sebanyak 1287 ijin SIUP yang diterbitkan dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 3.409 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Buleleng pada tahun 2015 mencapai 73,94% atau sebanyak 345.326 orang. Sektor Pertanian dalam arti luas sebanyak 123.397 orang, sektor perdagangan/hotel dan restoran sebanyak 93.495 orang, sektor keuangan/persewaan sebanyak 11.408 orang, sektor bangunan sebanyak 22.371 orang, sektor industri pengolahan sebanyak



32.293 orang, sektor jasa – jasa sebanyak 51.113 orang, sektor angkutan dan komunikasi sebanyak 8.396 orang, sektor pertambangan dan penggalian sebanyak 1.459 orang dan sebanyak 1.394 orang pada sektor listrik, gas dan air minum. (Disnakertrans Kab. Buleleng).

Pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dalam artian walaupun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, namun bila pertumbuhan angkatan kerja (pertumbuhan penduduk) tidak dapat ditekan atau tetap tinggi, maka kinerja perekonomian yang tercapai tidak mampu menyerap pertumbuhan tenaga kerja secara maksimal. Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng yang diprediksi akan terus meningkat sehingga perkembangan angkatan kerja dan pencari kerja/pengangguran juga akan meningkat sehingga hal ini memerlukan perhatian yang lebih serius.

**c. Angka Kemiskinan**

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multi dimensi. Kemiskinan terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti : faktor kultural, geografis dan struktural serta adanya ketidakmampuan untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan yang lain-lainnya.

Kemiskinan sudah menjadi permasalahan nasional dan bahkan internasional, Pemerintah Kabupaten Buleleng terus berkomitmen dan berupaya untuk menguranginya melalui upaya-upaya sistematis dan berkelanjutan. Kompleksnya permasalahan kemiskinan, menjadikan kemiskinan tersebut belum dapat terentaskan keseluruhan. Kompleksitas kemiskinan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi (kebijakan ekonomi), kondisi politik serta keamanan dan ketertiban suatu bangsa maupun daerah.

1) Jumlah penduduk miskin Buleleng dari tahun 2011 sampai dengan 2015 secara absolut mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari 37,9 ribu jiwa tahun 2011 menjadi 43,4 tahun 2015, bahkan pada tahun 2012 menurun menjadi 33,31 ribu jiwa. Akan tetapi pada tahun 2013 penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 40,3 ribu jiwa. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 6,72% jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali sejumlah 196.700 jiwa dengan demikian kemiskinan di kabupaten Buleleng



memberikan kontribusi sebesar 22,05% terhadap total jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada tahun 2015.

- 2) Meningkatnya jumlah dan prosentase Penduduk Miskin pada tahun 2015 disebabkan banyak faktor makro dan mikro diantaranya karena inflasi, kurs rupiah, bencana alam adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mengurangi Subsidi di bidang Energi dan Mineral.
- 3) Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas pembangunan Pemkab Buleleng, pada RPJMD tahun 2012-2017 dirancang angka penurunan tingkat kemiskinan dari 6,71% tahun 2013 menjadi 2,81% tahun 2017, terhadap hal ini Pemerintah Kabupaten Buleleng menyadari perlu penanganan kemiskinan secara serius seperti mencegah meluasnya kasus anak yang terlantar, keterisolasian, dan rawan sosial ekonomi. Masalah-masalah kesejahteraan sosial juga semakin kompleks dengan masih terdapatnya masalah sosial kontemporer seperti tindak kekerasan, narkoba, dan lain-lain.

### 1.4.3 Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi positif menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kabupaten dengan wilayah yang paling luas di Provinsi Bali, Buleleng mempunyai sumber daya alam yang melimpah sehingga memiliki peluang yang cukup besar untuk tumbuh dan mengembangkan berbagai sektor perekonomian. Permasalahan terbesar terletak pada kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki, meskipun banyak kesempatan kerja yang diciptakan, bila kualitas SDM lebih rendah dan tidak dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja yang ada maka lambat laun peluang kerja akan diisi oleh para pendatang.

#### a. Potensi Unggulan Daerah

Penentuan potensi unggulan didasarkan pada kontribusi potensi tersebut terhadap perekonomian daerah. Ukuran yang digunakan adalah besarnya kontribusi potensi terhadap pertumbuhan PDRB. Dikatakan potensi unggulan



apabila kontribusinya terhadap nilai PDRB konsisten dari waktu ke waktu dan memiliki kemampuan bersaing dibandingkan daerah lain.

Potensi unggulan yang ada di Kabupaten Buleleng dapat di kelompokkan menjadi beberapa produk unggulan yaitu.

### **1) Produk Unggulan Pertanian**

#### a) Mangga

Dibudidayakan di semua kecamatan di Kabupaten Buleleng baik sebagai tanaman pekarangan maupun dikelola secara intensif di kebun dengan teknik budidaya yang cukup maju, terutama di Kecamatan Kubutambahan, Gerokgak, Seririt dan Tejakula.

Pada tahun 2015 populasi tanaman mangga dengan luas panen mencapai seluas 5.565 Ha dengan jumlah produksi mencapai 36.732 ton terjadi kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2014 luas panen 3.625 Ha dengan jumlah produksi sebanyak 27.711 ton.

#### b) Pisang

Sentra produksi pisang terdapat di Kecamatan Tejakula, Gerokgak, Seririt, Kubutambahan dan Sukasada. Produksi Pisang tahun 2015 mencapai 2.127 ton dari luas panen 429 Ha, terjadi penurunan produksi jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebanyak 25.499 ton dari luas panen 929 Ha.

#### c) Durian

Durian Buleleng memiliki citarasa tersendiri dan berbeda jika dibandingkan dengan daerah lain. Sentra durian yang dapat dikembangkan terletak di Kecamatan Busungbiu, Banjar dan Sukasada. Dari luas panen di tahun 2015 seluas 826 Ha mampu memproduksi sebanyak 4.496 ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi peningkatan produksi dari 3.890 ton dari luas panen 702 Ha.

### **2) Produk Unggulan Perkebunan**

Tanaman perkebunan banyak dikembangkan di Kabupaten Buleleng seperti kelapa, kopi, cengkeh, vanili, kakao, jambu mete, kapok, lada dan tembakau. Dari jenis tersebut tanaman kopi dapat dibudidayakan dan berkembang dengan baik di dataran tinggi hampir di semua kecamatan di Kabupaten Buleleng kecuali Kecamatan Gerokgak dan Kecamatan Buleleng yang wilayahnya berada di dataran rendah. Petani kopi di Kabupaten



Buleleng sudah menguasai teknik budidaya kopi dengan teknik menyambung sehingga ketinggian pohon dan jumlah cabang dalam satu pohon bisa diatur.

Dengan pengaturan ketinggian dan cabang, memungkinkan petik merah sehingga kualitas kopi terjamin. Areal pengembangan kopi robusta di tahun 2015 seluas 10.513 Ha dengan produksi mencapai sebanyak 9.455 ton. Sedangkan areal kopi arabika seluas 2.842 Ha dengan produk mencapai 2.611 ton. Selain dipasarkan dalam bentuk biji, di Buleleng sudah ada industri yang mengolah biji kopi menjadi kopi bubuk. Pemasaran kopi bubuk menjangkau pasar lokal, nasional dan internasional.

### **3) Produk Unggulan Peternakan**

#### a) Sapi

Ternak sapi dikembangkan di semua kecamatan di Kabupaten Buleleng. Dengan melibatkan kelompok-kelompok tani ternak khususnya di wilayah Kecamatan Gerokgak, Tejakula, Sukasada dan Kubutambahan merupakan penghasil ternak sapi potong yang cukup banyak di Kabupaten Buleleng. Jumlah populasi ternak sapi potong di Kabupaten Buleleng tahun 2015 mencapai 119.491 ekor.

#### b) Babi

Ternak babi juga dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Buleleng, yang terdiri dari ternak Babi Bali dan Babi Sadel Back yang Populasinya pada tahun 2015 mencapai 111.802 ekor. Banyaknya ternak babi yang dipotong pada Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kabupaten Buleleng mencapai 67.175 ekor pada tahun 2015.

### **4) Produk Unggulan Perikanan**

Produk unggulan perikanan yang potensial dikembangkan adalah sektor perikanan laut dan umum.

#### a) Perikanan laut

Penangkapan ikan laut tertinggi yaitu ikan layang-layang, tongkol, lemadang dan cakalang. Cakalang sangat berpotensi diperairan laut di Kecamatan Kubutambahan dan Tejakula, yang pada tahun 2014 penangkapan/produksi mencapai 3.928,7 ton. Tongkol produksi tahun 2014 mencapai 3.207,8 ton utamanya di Kecamatan Tejakula, Buleleng, dan Kubutambahan.

#### b) Perikanan umum



Sektor perikanan umum patut dikembangkan sistem pembudidayaannya, terutama pada ikan nila di Kecamatan Busungbiu dan Sukasada. Produksi ikan nila di tahun 2014 mencapai 49,6 ton. Selain itu yang memiliki nilai potensial untuk dikembangkan adalah budidaya tambak dan ikan yang diawetkan. Di tahun 2014 produksi tambak mencapai 1.265,8 ton dan ikan yang diawetkan (*pindang*) mencapai 2.812,7 ton.

### **5) Produk Unggulan Industri**

Dengan bantuan permodalan dan bimbingan instansi teknis terkait, produk industri yang dapat dikembangkan berupa industri rumah tangga kerajinan anyaman bambu di Desa Sangket Kecamatan Sukasada, dan anyaman inovatif di Desa Ambengan Kecamatan Sukasada. Kedua jenis produksi kerajinan itu selain telah memasuki pasar lokal, juga menjangkau pasar nasional dan pasar internasional. Tantangan yang dihadapi adalah produksi kerajinan inovatif Desa Ambengan sampai saat ini belum memiliki merk (*brand*) tersendiri. Hal ini dimanfaatkan oleh pengusaha dari daerah lain dengan memberi merk dan dipasarkan ke pasar internasional oleh pengusaha dari daerah lain. Dengan adanya merk dan ciri khas daerah asal, diharapkan akan meningkatkan nilai tambah produksi daerah.

### **b. Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Perekonomian**

#### **1) Pertumbuhan Ekonomi**

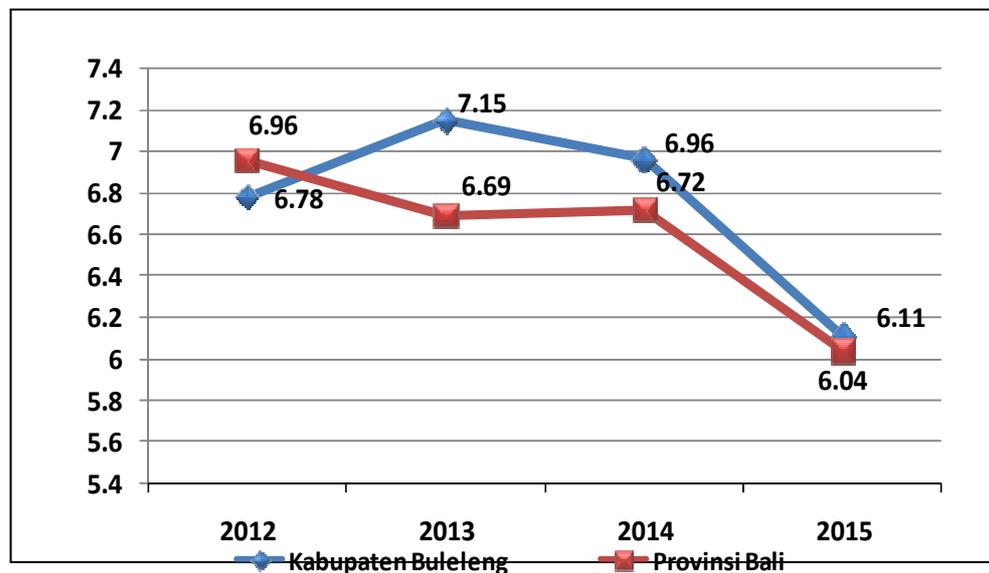
Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah kesejahteraan rakyat seluas-luasnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 1.2 dan gambar 1.3 berikut.



Tabel 1.2.  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali  
Tahun 2012 – 2015 (Tahun dasar 2010)

Tahun	Kabupaten Buleleng (%)	Provinsi Bali (%)
1	2	3
2012	6,78	6,96
2013	7,15	6,69
2014	6,96	6,72
2015	6,11	6,04
<b>Rata-rata</b>	<b>6,75</b>	<b>6,60</b>

Sumber : Buleleng Membangun 2016



Gambar 1.3  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali  
Tahun 2012-2015

Dari tabel di atas dapat dilihat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng mengalami perlambatan, dengan adanya perubahan Tahun Dasar dari Tahun Dasar 2000 menjadi Tahun Dasar 2010 pada tahun 2015, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng terkoreksi menjadi 6,11 % atau mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2014.

Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Buleleng digunakan pendekatan penghitungan Nilai Produk Domestik



Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan cerminan atau gambaran secara makro mengenai perekonomian suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, karena PDRB merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari sektor-sektor ekonomi yang berperan dalam kegiatan perekonomian daerah tersebut.

PDRB Kabupaten Buleleng telah menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat dijelaskan dengan tabel 1.3 sebagai berikut.

Tabel 1.3  
Perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng  
Tahun 2014-2015 Berdasarkan Tahun Dasar 2010

No	Tahun	PDRB Harga Berlaku (Juta Rp)	PDRB Harga Konstan (Juta Rp)
1	2	3	4
1	2014	22.339.136,48	17.740.832,90
2	2015	25.491.797,49	18.824.842,31

Sumber : Buleleng Membangun 2016

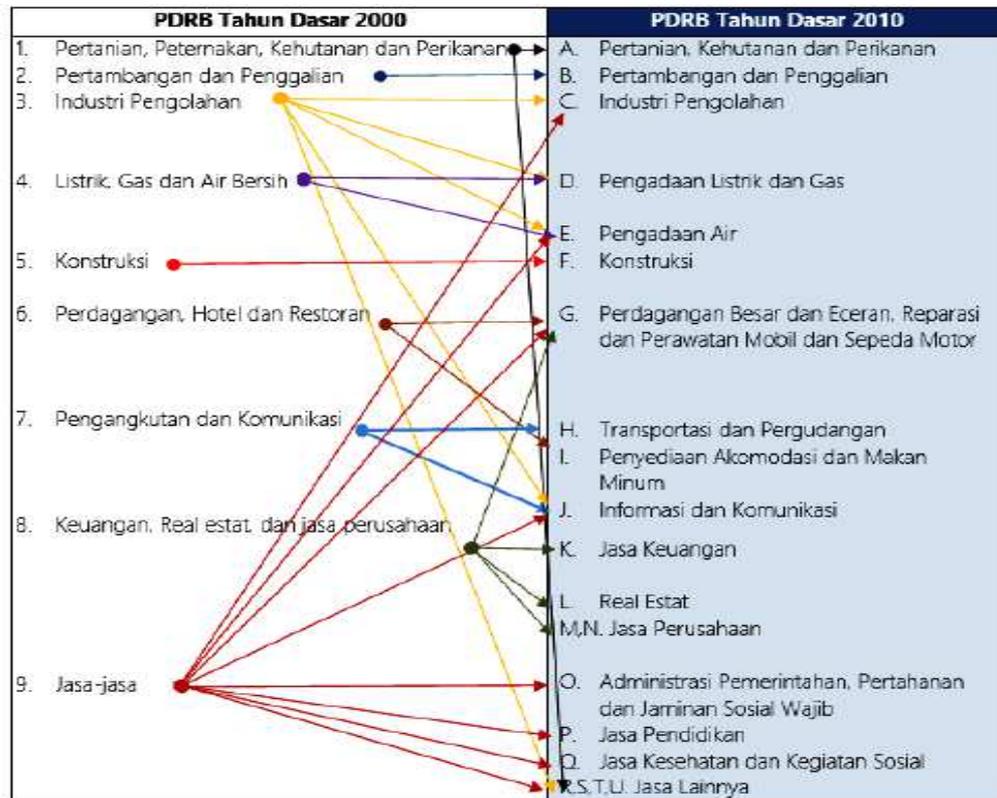
Dari Tabel 1.3 dapat dilihat PDRB Kabupaten Buleleng menunjukkan perkembangan yang positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya perubahan tahun dasar sebagai salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia dari tahun 2000 ke 2010.

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *System Of National Accounts* (SNA) 2008. Sementara implementasi adanya perubahan tahun dasar PDRB dari tahun 2000 menjadi tahun 2010, terjadi perubahan klasifikasi yang digunakan oleh BPS yaitu dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha.

Dengan menggunakan tahun dasar 2010, Pada tahun 2014 PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Buleleng besarnya Rp.22,34 triliun lebih meningkat menjadi sebesar Rp.25,49 triliun lebih di tahun 2015.



Matriks perubahan klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 dan tahun dasar 2010 disajikan pada gambar 1.4 berikut



Gambar 1.4  
Matriks Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan Tahun Dasar 2010

PDRB perkapita penduduk Kabupaten Buleleng juga mengalami peningkatan. Dengan menggunakan tahun dasar 2010, Pada tahun 2014 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku besarnya 34,78 juta meningkat menjadi sebesar 39,45 juta pada tahun 2015. PDRB per kapita Kabupaten Buleleng disajikan pada table 1.4 berikut.



Tabel 1.4  
Data Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Buleleng  
Tahun 2014-2015 Berdasarkan Tahun Dasar 2010

No.	Tahun	PDRB per kapita Harga Berlaku (Juta Rp)	PDRB per kapita Harga Konstan (Juta Rp)
1	2	3	4
1	2014	34,78	27,62
2	2015	39,45	29,13

Sumber : Buleleng Membangun 2016

## 2) Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian Kabupaten Buleleng, memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan struktur perekonomian Provinsi Bali. Perekonomian Provinsi Bali lebih banyak bertumpu pada sektor non pertanian, khususnya industri pariwisata. Sedangkan struktur perekonomian di Kabupaten Buleleng didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kondisi ini terlihat dari sumbangannya yang paling besar dalam pembentukan PDRB tahun 2015, yaitu sebesar 22,86%, diikuti dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 18,0% serta pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mencapai 11,4%.

Potensi-potensi yang ada dalam suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai macam perspektif dan pendekatan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi unggulan suatu daerah adalah komposisi PDRB.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (*netto*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB adalah menggunakan pendekatan produksi yang merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi

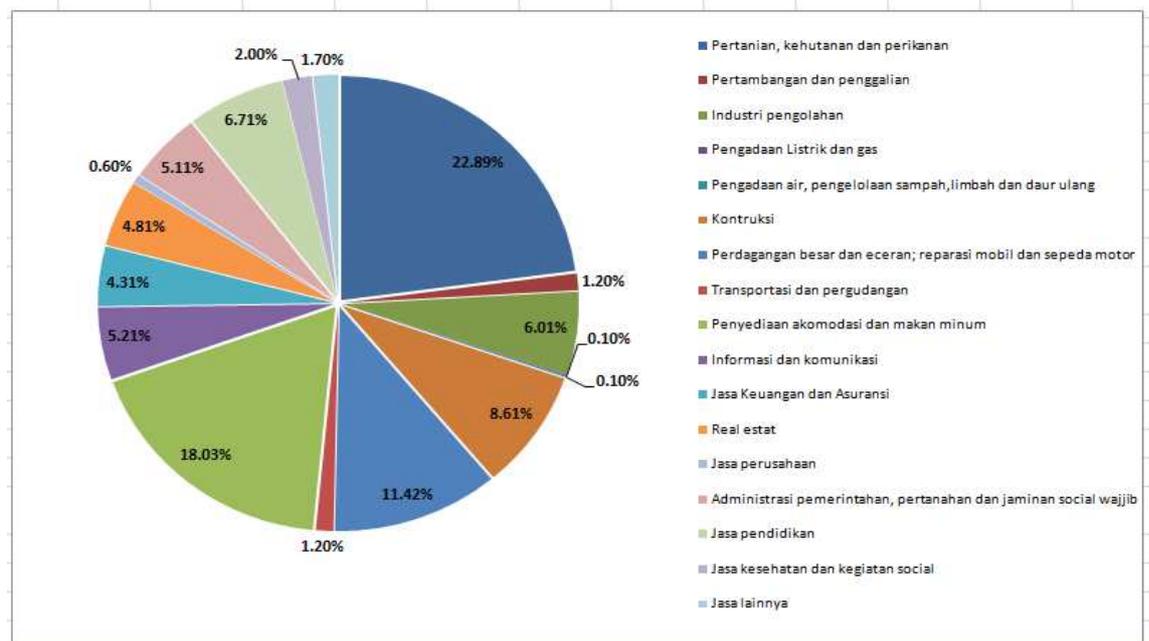


di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dengan tahun dasar 2010 dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha (sektor) dan setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor. Distribusi persentase PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku disajikan pada tabel 1.5 berikut dan gambar 1.5 berikut.

Tabel 1.5.  
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Buleleng Atas Dasar  
Harga Berlaku Tahun 2014-2015

1	Sektor	Tahun	
		2014	2015
2		3	4
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	22,1	22,86
2	Pertambangan dan penggalian	1,4	1,2
3	Industri pengolahan	5,9	6,0
4	Pengadaan Listrik dan gas	0,1	0,1
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,1	0,1
6	Konstruksi	8,6	8,6
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	11,4	11,4
8	Transportasi dan pergudangan	1,3	1,2
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	17,8	18,0
10	Informasi dan komunikasi	5,2	5,2
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,6	4,3
12	Real estat	5,2	4,8
13	Jasa perusahaan	0,6	0,6
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan social wajib	5,4	5,1
15	Jasa pendidikan	6,6	6,7
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	2,0	2,0
17	Jasa lainnya	1,7	1,7

Sumber : Buleleng Membangun 2016



Gambar 1.5.  
Diagram Struktur Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2015

### 3) Investasi

Investasi daerah merupakan salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah, disamping untuk mendorong perekonomian daerah. Peningkatan investasi juga diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Nilai investasi Kabupaten Buleleng periode 2013 sampai dengan 2015 secara umum mengalami peningkatan, pada tahun 2013 sebesar Rp. 4,284 triliun, mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 4,401 triliun.

#### 1.5 Isu-Isu Strategis

Secara umum isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai mandate RPJMD 2012-2017 adalah sebagai berikut.

- Peningkatan pelayanan publik dalam berbagai urusan pembangunan, utamanya pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan dalam bentuk peningkatan aksesibilitas dan kualitasnya;
- Implementasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran secara lebih konkrit;



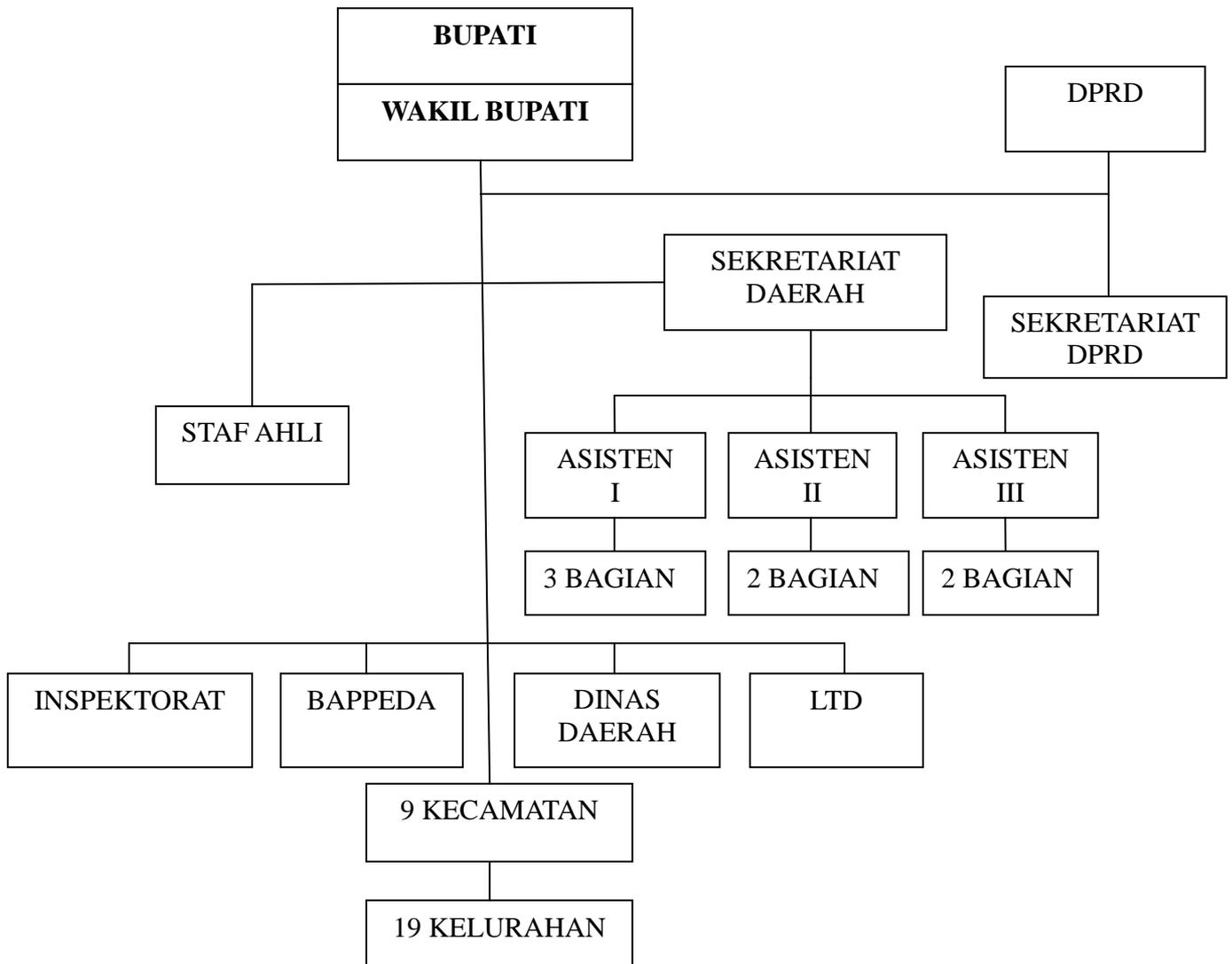
- c. Peningkatan pemberdayaan usaha mikro kecil maupun menengah, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan (coastal manajemen) dalam pemasaran dan permodalan serta tantangan perdagangan bebas;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan dan sumber daya daerah;
- e. Peningkatan SDM aparatur yang profesional, berkarakter, bersih, dan anti KKN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- f. Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- g. Penyediaan infrastruktur daerah yang memadai hingga ke pelosok perdesaan;
- h. Perlindungan dan penegakan HAM;
- i. Rawan bencana alam;
- j. Kualitas lingkungan hidup semakin menurun;
- k. Melemahnya daya beli masyarakat karena ketidakpastian harga hasil-hasil pertanian dalam arti luas

**Isu-isu lain yang juga cukup menonjol adalah :**

- a. Alih fungsi lahan pertanian produktif masih cukup tinggi
- b. Bencana banjir dan tanah longsor intensitasnya cukup banyak
- c. Flu burung dan rabies masih mengancam keselamatan hewan maupun manusia
- d. Ketersediaan air baku di beberapa tempat masih terbatas
- e. Penegakan hukum dan kesadaran hukum belum optimal
- f. Kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan aparatur pemerintah belum optimal.

**1.6 Struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng**

Organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng disajikan pada Gambar 1.6



Gambar 1.6 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah kabupaten Buleleng

Rincian dari Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Buleleng sesuai bagan 4 adalah sebagai berikut :

1. Bupati dan Wakil Bupati
2. Sekretariat Daerah  
Tiga Asisten Daerah terdiri dari:
  - a. Asisten Pemerintahan (Asisten I) meliputi tiga Bagian :
    - 1) Bagian Pemerintahan,
    - 2) Bagian Hukum, dan
    - 3) Bagian Organisasi.
  - b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten II) meliputi dua Bagian:



- 1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, dan
  - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- c. Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Asisten III meliputi dua Bagian :
- 1) Bagian Umum, dan
  - 2) Bagian Humas dan Protokol.
3. Sekretariat DPRD
  4. Inspektorat
  5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  6. Dinas Daerah (15) terdiri dari
    - a. Dinas Pekerjaan Umum.
    - b. Dinas Kesehatan.
    - c. Dinas Pendapatan.
    - d. Dinas Pendidikan.
    - e. Dinas Perhubungan.
    - f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
    - g. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
    - h. Dinas Pertanian dan Peternakan.
    - i. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
    - j. Dinas Perikanan dan Kelautan.
    - k. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian.
    - l. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
    - m. Dinas Sosial.
    - n. Dinas Komunikasi dan Informatika.
    - o. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  7. Lembaga Teknis Daerah (LTD) 10 terdiri dari
    - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
    - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
    - c. Badan Kepegawaian Daerah
    - d. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
    - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
    - f. Rumah Sakit Umum Daerah
    - g. Badan Pelayanan Terpadu
    - h. Badan Lingkungan Hidup
    - i. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
    - j. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah



9. Satuan Polisi Pamong Praja
10. Pemerintah Kecamatan (9) terdiri dari:
  - a. Kecamatan Gerokgak
  - b. Kecamatan Seririt
  - c. Kecamatan Busungbiu
  - d. Kecamatan Banjar
  - e. Kecamatan Sukasada
  - f. Kecamatan Buleleng
  - g. Kecamatan Sawan
  - h. Kecamatan Kubutambahan
  - i. Kecamatan Tejakula
11. Pemerintah Kelurahan (19)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, maka Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng yang berada di bawah Bupati dan Wakil Bupati Buleleng menjadi sebagai berikut.

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng (Tipe A).
2. Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Buleleng (Tipe A)
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng (Tipe A)
4. Dinas Daerah, terdiri dari:
  - a) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Tipe A)
  - b) Dinas Kebudayaan (Tipe B)
  - c) Dinas Kesehatan (Tipe A)
  - d) Dinas Tenaga Kerja (Tipe B)
  - e) Dinas Pariwisata (Tipe A)
  - f) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Tipe B)
  - g) Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Tipe B)
  - h) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Tipe B)
  - i) Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Tipe A)
  - j) Dinas Pertanian (Tipe A)
  - k) Dinas Perikanan (Tipe B)
  - l) Dinas Perhubungan (Tipe B)
  - m) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A)
  - n) Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Tipe A)
  - o) Dinas Sosial (Tipe B)
  - p) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe B)



- q) Dinas Ketahanan Pangan (Tipe A)
- r) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tipe A)
- s) Dinas Arsip dan Perpustakaan daerah (Tipe A)
- t) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Tipe B)
- u) Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A)
- v) Dinas Pemadam Kebakaran (Tipe B)
- w) Dinas Statistik (Tipe B)
- x) Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe A)
- 5. Badan Daerah Kabupaten Buleleng terdiri dari:
  - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Tipe A)
  - b) Badan Keuangan Daerah (Tipe A)
  - c) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten (Tipe A)
- 6. Kecamatan (Sembilan Kecamatan Tipe A)
- 7. Kelurahan (19 Kelurahan).

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, telah ditindaklanjuti dengan: (1) Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Daerah. (2) Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. (3) Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah. (4) Peraturan Bupati Nomor 777 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

### **1.7 Keragaan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng**

Keberhasilan pencapaian visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan serta sasaran Pemerintah Kabupaten Buleleng ditentukan oleh jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia. Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat digambarkan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki dan golongan kepegangatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng memiliki Sumber Daya Manusia PNS 10.086 orang yang tersebar di seluruh instansi lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan yang bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 1.6



**Tabel 1.6**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Tahun 2015**

<b>Pendidikan Tertinggi</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-Laki dan Perempuan</b>	<b>Persentase</b>
1	2	3	4	5
Sekolah Dasar	130	16	146	1,42
SMP Sederajat	160	24	184	1,79
SMA Sederajat	1.574	915	2.489	24,16
Diploma I/II/III	1.479	1.707	3.186	30,92
Diploma IV/S1	2.468	1.677	4.145	40,63
S2/S3	116	37	153	1,48
<b>Jumlah</b>	<b>5.927</b>	<b>4.376</b>	<b>10.303</b>	<b>100</b>

Sumber: Buleleng Membangun 2016

Dari Tabel 1.6 di atas tampak bahwa PNS yang berpendidikan tertinggi DIV/S1 menempati jumlah paling banyak mencapai 4.145 (40,63%). PNS yang berpendidikan tertinggi SD menempati jumlah paling sedikit yaitu 146 (1,42%). Dalam rangka meningkatkan SDM Pemerintah Kabupaten Buleleng, di masa mendatang diharapkan tidak ada lagi PNS yang memiliki pendidikan tertinggi SD dan SMP. Untuk mengimbangi tingkat pendidikan masyarakat yang dilayani oleh PNS, di masa mendatang jumlah PNS dengan pendidikan tertinggi S2/S3 diharapkan ditingkatkan.

Jumlah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng menurut golongan kepangkatan disajikan pada tabel 1.7



**Tabel 1.7**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2015**

<b>Golongan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Laki-Laki dan Perempuan</b>	<b>Persentase</b>
1	2	3	4	5
Golongan I	178	35	213	2,07
Golongan II	1.180	711	1.891	18,35
Golongan III	2.084	1.844	3.928	38,13
Golongan IV	2.602	1.669	4.271	41,45
<b>Jumlah</b>	<b>6.044</b>	<b>4.259</b>	<b>10.303</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Buleleng Membangun 2016

Dari tabel 1.7 di atas tampak bahwa PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan Golongan IV menduduki jumlah paling banyak mencapai 4.271 orang (41,45%). Jumlah paling sedikit adalah Golongan I, sejumlah 213 orang (2,07%). Kalau golongan kepegangatan PNS betul-betul dapat mewakili kualitas Sumber Daya Manusia PNS, maka kualitas PNS Pemerintah Kabupaten Buleleng tergolong baik. PNS Golongan III dan IV mencapai 8.199 orang (79,58%). Untuk menjamin golongan kepegangatan PNS betul-betul mewakili kualitas, maka kenaikan golongan kepegangatan supaya dilakukan secara selektif. Kenaikan golongan kepegangatan PNS seharusnya merupakan penghargaan negara atas prestasi yang dicapai oleh PNS, bukan semata hak PNS.

### **1.8 Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja**

Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan inovasi dalam reformasi sistem AKIP dan pengelolaan kinerja. Upaya inovatif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah dimulai Tahun 2014 ketika menemukan kesulitan membuat LAKIP Tahun 2013 yang merupakan LAKIP tahun pertama RPJMD 2012-2017.

#### **1.8.1 Mengkaji RPJMD 2012-2017**

Pada tahun 2014 Bappeda Kabupaten Buleleng melakukan kajian terhadap RPJMD Kabupaten Buleleng 2012-2017. Kajian itu bermaksud menjawab pertanyaan apakah RPJMD 2012-2017 perlu direviu? Kalau perlu bagian mana yang direviu? Kajian ini terutama didorong oleh unit kerja yang menyusun LKjIP tahun 2013, yang merupakan LKjIP tahun Pertama RPJMD 2012-2017. Hasil kajian Merekomendasikan sebagai berikut.



1) RPJMD 2012-2017 perlu direviu menyesuaikan dengan RPJMN 2014-2019 dan RPJPD Provinsi Bali 2013-2018.

2) Bagian-bagian yang perlu direviu adalah (a) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan (b) program dan kegiatan yang dimandatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) supaya terkait dengan sasaran pemerintah daerah.

### **1.8.2 Membuat Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2015 dan 2016**

Tahun-tahun sebelumnya hanya ada Perjanjian Kinerja antara SKPD dengan Bupati. Pada Februari tahun 2015 dan Januari 2016 Bupati Buleleng membuat Perjanjian Kinerja sesuai dengan Sasaran RPJMD 2012-2017.

### **1.8.3 Mengevaluasi RPJMD 2012-2017**

Tahun 2015 dilakukan evaluasi RPJMD 2012-2017 sesuai rekomendasi hasil kajian tahun 2014. Reviu RPJMD 2012-2017 yang dilakukan tahun 2015 ternyata kemudian sesuai dengan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang ditujukan kepada Bupati Buleleng, Nomor B/186/D.I.PANRB/01/2016, tanggal Jakarta, 13 Januari 2016, Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.

### **1.8.4 Mengimplementasikan Hasil Reviu RPJMD 2012-2017**

Hasil Reviu RPJMD 2012-2017 dijadikan pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi AKIP selanjutnya, dan juga dipakai pedoman dalam menyusun LKjIP Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2016.

### **1.8.5 Mengimplementasikan E-SAKIP**

Tahun 2016 diupayakan menerapkan E-SAKIP sejalan dengan penerapan E-Gov.meskipun belum mencapai hasil yang memuaskan.

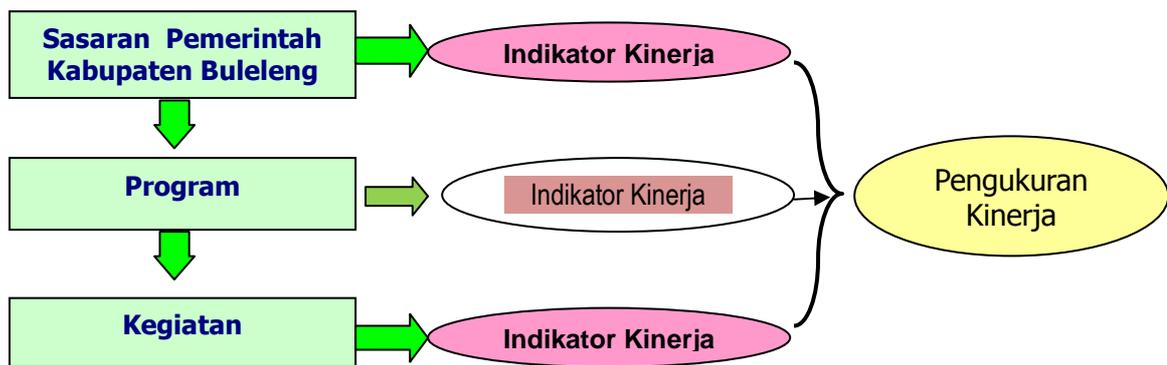
### **1.8.6 Melaksanakan Bimbingan Teknis SAKIP**

Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2016 melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembuatan *Cascading*, Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Pelaksanaan Evaluasi Mandiri dengan sasaran para Sekertaris SKPD dan para Kepala Subbagian Perencanaan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng



## 1.9 Sistematika Penyajian

LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi yang berkaitan dengan visi dan misi organisasi melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Alur pikir pengukuran kinerja pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Buleleng mengikuti alur pikir sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.7



**Gambar 1.7. Alur Fikir Pengukuran Kinerja**

Sistematika LKjIP Kabupaten Buleleng tahun 2016 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **PENUTUP.**

Pada bab IV diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.



**BAB II  
PERENCANAAN  
DAN PERJANJIAN  
KINERJA**



**BAB II Memuat**

**2.1 RPJMD Kabupaten Buleleng**

**2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi**

**2.1.2 Tujuan**

**2.1.3 Sasaran**

**2.1.4 Strategi, dan Arah**

**Kebijakan Dalam RPJMD  
2012-2017**

**2.1.5 Tema, Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah**

**2.2 Indikator Kinerja Makro dan  
Indikator Kinerja Utama**

**2.3 Perjanjian Kinerja, Program  
dan Anggaran Tahun 2016**

**2.1 RPJMD Kabupaten Buleleng 2012-2017**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan dengan masa berlaku 5 (lima) tahun. RPJMD berisi penjabaran Visi, Misi, Program Kepala Daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), serta memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lintas SKPD dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana Kerangka Regulasi dan Pendanaannya secara indikatif.

RPJMD Pemerintah Kabupaten Buleleng telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 15 Februari 2013. RPJMD berlaku untuk periode lima tahun yaitu tahun 2012-2017. Berikut disajikan beberapa komponen RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2012-2017 terutama Pernyataan Visi, Misi, dan Sasaran.

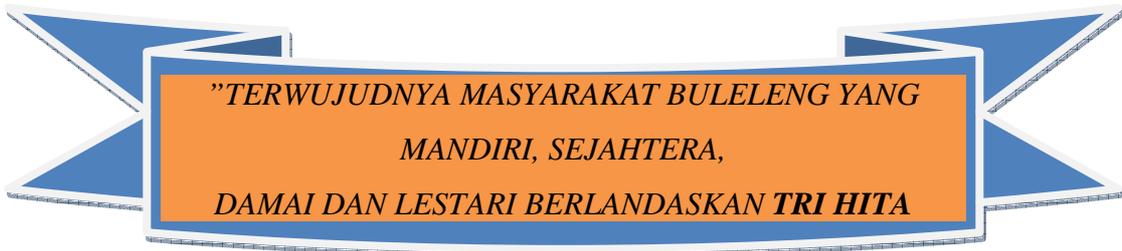
**2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang di dalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh



komponen *stakeholders*. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (*setting*) daerah di masa depan.

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis, potensi Sumberdaya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2012-2017 dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng sebagai berikut:



Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2012 – 2017 ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan.

Arah menuju visi tersebut dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

**1) Mandiri**, diukur dengan:

- a) Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang berbasis kinerja.
- b) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good and Clean Governance*), yaitu profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN.
- c) Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna bagi masyarakat.
- d) Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan dan kemajuan pembangunan daerah.
- e) Meningkatnya partisipasi/swadaya masyarakat dalam memenuhi sendiri



kebutuhan pokok.

- f) Terwujudnya pariwisata berbasis budaya dan keindahan alam yang unik, serta terbangunnya sinergitas dengan sektor pertanian.

**2) Sejahtera**, diukur dengan :

- a) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditunjukkan oleh:
  1. Tingkat Pendidikan antara lain: terlaksananya wajib belajar 12 tahun, meningkatnya jumlah penduduk berpendidikan tinggi, menurunnya tingkat pendidikan terendah, meningkatnya angka partisipasi sekolah, dan tersedianya tenaga siap pakai melalui pendidikan kejuruan.
  2. Tingkat Kesehatan antara lain: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, angka harapan hidup dan terpenuhinya sistem pelayanan sosial melalui Asuransi Kesehatan.
  3. Kemampuan daya beli masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan riil per kapita.
- b) Berkurangnya jumlah penduduk miskin, pengangguran terbuka dan kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan sosial.
- c) Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, dan kesempatan berusaha).
- d) Berkembangnya keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.
- e) Tersedianya jaringan Infrastruktur yang mampu mendorong perekonomian perdesaan.

**3) Damai**, diukur dengan:

- a) Teraktualisasinya keragaman budaya lokal.
- b) Terjaminnya kebebasan beribadah.
- c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan supremasi hukum.



**4) Lestari**, diukur dengan:

- a) Terkelolanya lingkungan hidup dan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan.
- b) Terpeliharanya adat istiadat dan nilai-nilai budaya Bali sebagai pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat.
- c) Terwujudnya lingkungan permukiman yang berlandaskan kearifan lokal.
- d) Terwujudnya penggunaan ruang dan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) Percepatan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi, merata dan berkualitas.
- 2) Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah.
- 3) Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas yang profesional, berbudaya dan bermoral.
- 4) Menumbuhkembangkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan pembangunan.
- 5) Pelestarian budaya Bali yang ditumbuhkembangkan pada masyarakat.
- 6) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.
- 7) Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berkelanjutan (sustainable development).

**2.1.2 Tujuan**

Mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian daerah.
- 2) Meningkatkan daya saing daerah.
- 3) Meningkatkan daya beli masyarakat.
- 4) Meningkatkan produksi dan daya saing produk unggulan daerah.



- 5) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- 6) Mewujudkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan.
- 7) Lestarinya kebudayaan Bali yang adiluhung.
- 8) Mewujudkan keadilan di semua bidang pembangunan, dan
- 9) Mewujudkan pembangunan sesuai peruntukan ruang dan berwawasan lingkungan.

### **2.1.3 Sasaran**

Sasaran umum yang merupakan hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017, adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.
- 2) Meningkatnya penanaman modal baik asing maupun dalam negeri.
- 3) Meningkatnya pendapatan masyarakat.
- 4) Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk unggulan daerah.
- 5) Meningkatnya daya saing produk-produk unggulan daerah di pasaran.
- 6) Terwujudnya struktur perekonomian yang tangguh berbasis unggulan daerah.
- 7) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.
- 8) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- 9) Meningkatnya profesionalisme dan kemandirian Aparatur Pemerintah.
- 10) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- 11) Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan.
- 12) Tumbuhnya rasa memiliki dikalangan pemangku kepentingan.
- 13) Meningkatnya peran pemangku kepentingan dalam pengendalian pembangunan.
- 14) Meningkatnya apresiasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal yang adiluhung.
- 15) Tumbuh dan berkembangnya kesenian berbasis budaya Bali.
- 16) Tegaknya supremasi hukum, ketentraman, dan keadilan disemua aspek kehidupan.
- 17) Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan sosial.



- 18) Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan.
- 19) Terjaganya kualitas sumber daya alam.
- 20) Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan
- 21) Meningkatnya pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dipaparkan di atas memiliki keterkaitan, artinya visi memiliki misi, setiap misi memiliki tujuan dan sasaran. Keterkaitan itu dinyatakan dalam bentuk matrik pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

Visi: *Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, Damai dan Lestari Berlandaskan Tri Hita Karana*

Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3
1. Percepatan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi, merata dan berkualitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan perekonomian daerah.</li><li>2. Meningkatkan daya saing daerah.</li><li>3. Meningkatkan daya beli masyarakat.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.</li><li>2. Meningkatnya penanaman modal baik asing maupun dalam negeri.</li><li>3. Meningkatnya pendapatan masyarakat.</li></ol>
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah	Meningkatkan produksi dan daya saing produk unggulan daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk unggulan daerah.</li><li>2. Meningkatnya daya saing produk-produk unggulan daerah di pasaran.</li><li>3. Terwujudnya</li></ol>



		struktur perekonomian yang tangguh berbasis unggulan daerah.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas yang profesional, berbudaya dan bermoral	Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.</li><li>2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.</li><li>3. Meningkatnya profesionalisme dan kemandirian Aparatur Pemerintah</li><li>4. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa</li></ol>
4. Menumbuhkembangkan sinergi seluruh pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) dalam setiap tahapan pembangunan	Mewujudkan sinergi seluruh pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) pembangunan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan.</li><li>2. Tumbuhnya rasa memiliki dikalangan pemangku kepentingan.</li><li>3. Meningkatnya peran pemangku kepentingan dalam pengendalian pembangunan.</li></ol>
5. Melestarikan budaya bali yang ditumbuhkembangkan pada	Lestarnya kebudayaan Bali yang adiluhung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya apresiasi masyarakat dalam menjaga dan</li></ol>



masyarakat		melestarikan budaya lokal yang adiluhung. 2. Tumbuh dan berkembangnya kesenian berbasis budaya Bali.
6. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang	Mewujudkan keadilan di semua bidang pembangunan	1. Tegaknya supremasi hukum, ketentraman dan keadilan di semua aspek kehidupan. 2. Terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan sosial. 3. Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan.
7. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berkelanjutan	Mewujudkan pembangunan sesuai peruntukan ruang wilayah	1. Terjaganya kualitas sumber daya alam. 2. Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup. 3. Meningkatnya pemanfaatan sumber energi terbarukan.

#### 2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Dalam RPJMD 2012-2017

Strategi dan arah kebijakan daerah terkait dengan tujuan dan sasaran. Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan daerah disajikan pada tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Buleleng tahun 2012-2017**



Visi : Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, Damai, dan Lestari Berdasarkan *Tri Hita Karana*

Misi 1 : *Percepatan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Merata, dan Berkualitas*

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1. Meningkatkan perekonomian daerah 2. Meningkatkan daya saing daerah. 3. Meningkatkan daya beli masyarakat.	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. 2. Meningkatnya penanaman modal baik asing maupun dalam negeri. 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat.	1. Menumbuhkan perkembangan perekonomian berbasis masyarakat	Menetapkan zonasi pemanfaatan kawasan sesuai potensinya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat
			Meningkatkan kualitas input produksi baik dengan dukungan penelitian maupun penerapan Iptek
			Pemetaan potensi dan zonasi kawasan pertanian untuk mendorong produksi skala ekonomi, kontinuitas produksi dan mengefektifkan pembinaan peningkatan mutu produk
			Mendorong terbentuknya kawasan pertanian organik yang terstandarisasi dan tersertifikasi sehingga dapat bersaing dalam segmen pasar premium
			Memperkuat dan memberdayakan petani, nelayan, petambak, pedagang dan pengrajin/pelaku industri kreatif
			Meningkatkan penguasaan ilmu



			pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya tawar dan kompetisi ( <i>competitive advantage</i> ) sektor pertanian, koperasi, perdagangan, UMKM dan pariwisata
		2. Meningkatkan infrastruktur penunjang pembangunan ekonomi	Meningkatkan dan rehabilitasi infrastruktur penunjang pembangunan ekonomi
			Meningkatkan kondisi jalan di perdesaan, termasuk jalan usaha tani
			Menjamin akses perekonomian masyarakat
			Menyediakan pelayanan dan akses air bersih dan listrik dengan harga terjangkau
			Pengembangan sarana prasarana pemasaran produk pertanian, industri kreatif/kerajinan/UKM
		3. Pemetaan potensi dan promosi investasi daerah	Penyusunan profil investasi daerah
			Meningkatkan promosi investasi di dalam dan di luar negeri
			Mewujudkan proses perijinan yang cepat, mudah dan tidak berbeaya tinggi
			Menjamin keamanan



			dan ketertiban berinvestasi
			Menyediakan pelayanan kepada publik secara terpadu
		4. Peningkatan penyerapan tenaga kerja	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja agar mempunyai daya saing
			Pendidikan dan latihan kewirausahaan di tingkat pemula dan menengah dalam mendukung inovasi dan kreativitas
			Meningkatkan investasi untuk terciptanya lapangan kerja

*Misi 2 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah*

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	
1	2	3	4	
Meningkatkan produksi dan daya saing produk unggulan daerah	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk unggulan daerah	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan daerah	Pemetaan potensi produk unggulan daerah yang mempunyai daya saing dan layak jual	
	2. Meningkatnya daya saing produk-produk unggulan daerah di pasaran		Meningkatkan produksi dan kualitas produk unggulan daerah	
	3. Terwujudnya struktur ekonomi yang tangguh berbasis unggulan		2. Meningkatkan penanganan panen dan pasca produksi dalam rangka peningkatan	Meningkatkan kualitas dan kemasan produk olahan agar mempunyai daya tarik dan daya saing
				Meningkatkan sentuhan Iptek dan



	daerah	daya saing	inovasi terhadap produk-produk pertanian maupun industri kreatif/kerajinan/UKM
		3. Pemetaan dan pengembangan struktur perekonomian yang berbasis unggulan daerah	Revitalisasi pasar tradisional melalui peningkatan kenyamanan, kemampuan bersaing, penguatan permodalan, dsb.
			Mengembangkan sektor-sektor/lapangan usaha yang basis dan memberikan kontribusi tinggi dalam membentuk struktur perekonomian daerah
			Mengembangkan sektor-sektor/lapangan usaha yang pertumbuhannya tinggi dan mempunyai keunggulan komparatif
			Mendorong perkembangan kawasan-kawasan ekonomi penyangga, khususnya pusat-pusat ekonomi di tingkat kecamatan



Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Profesional, Berbudaya, dan Bermoral

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.</li> <li>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.</li> <li>Meningkatnya profesionalisme dan kemandirian Aparatur Pemerintah.</li> <li>Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan pemerataan pendidikan disemua jenjang</li> </ol>	Percepatan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan tahun yang merata dan bermutu
			Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik
			Meningkatkan akses, pemerataan dan relevansi pendidikan menengah yang berkualitas
			Meningkatkan kualitas Pendidikan Luar Sekolah
			Peningkatan akses dan investasi sarana dan prasarana pendidikan
			Pemantapan sekolah nasional bertaraf internasional
			Peningkatan prestasi olahraga
			<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan sampai ke pelosok desa</li> </ol>
Mendekatkan			



			pelayanan paripurna dengan masyarakat di seluruh pelosok wilayah
			Peningkatan kualifikasi RSUD
			Peningkatan ketersediaan tenaga medis dan paramedis, terutama untuk pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil dan tertinggal
			Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
			Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita
		3. Meningkatkan profesionalisme dan kemandirian Aparatur Pemerintah	Meningkatkan disiplin dan waskat bagi Aparatur di lingkungan Pemkab Buleleng
			Meningkatkan kualitas Aparatur Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
			Mengembangkan dan menata sistem kepegawaian daerah sesuai dengan kebutuhan struktur kelembagaan Pemerintah Kab.



			Buleleng
			Penerapan sistem rekrutmen dan pengembangan karier PNS secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi ( <i>merit based</i> )
		4. Penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan jujur	Meningkatkan prosedur pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan
			Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan penerapan standar pelayanan minimum yang pelaksanaannya dapat diakses oleh masyarakat



*Misi 4 : Menumbuhkembangkan Sinergi Seluruh Pemangku Kepentingan (Stakeholders) dalam Setiap Tahapan Pembangunan*

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Mewujudkan sinergi seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders) pembangunan	1. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan .	1. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan	Meningkatkan dan menata prosedur kerja, pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan dalam setiap pengambilan keputusan
	2. Tumbuhnya rasa memiliki dikalangan pemangku kepentingan.		Peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan dengan mengedepankan komunikasi, koordinasi dan keterbukaan
	3. Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pengendalian pembangunan .	2. Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pengendalian pembangunan	Pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan dan pengendalian pembangunan



*Misi 5 : Pelestarian Budaya Bali yang Ditumbuhkembangkan pada Masyarakat*

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah kebijakan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Lestarinya Kebudayaan Bali yang adiluhung	1. Meningkatkan apresiasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal yang adiluhung.  2. Tumbuh dan berkembangnya kesenian berbasis budaya Bali.	1. Meningkatkan penggalian, pengembangan dan pelestarian kebudayaan Bali yang adiluhung	Pengembangan dan pemeliharaan kebudayaan daerah yang memiliki keunikan dan adiluhung
			4. Meningkatkan penggalian, pengembangan dan pelestarian kesenian berbasis budaya Bali
			Menumbuhkembangkan suasana kebebasan berkreasi dibidang seni dan budaya
			Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan kesenian dan kebudayaan
			Memberikan insentif kepada kegiatan seni dan budaya



## Misi 6 : Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1	2	3	4
Mewujudkan keadilan di semua bidang pembangunan	1. Tegaknya supremasi hukum, ketentraman, dan keadilan di semua aspek kehidupan. 2. Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial. 3. Terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan	1. Meningkatkan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	Mengembangkan budaya dan kesadaran hukum dikalangan aparat dan masyarakat dalam rangka penegakan supremasi hukum
			Menciptakan dan mengembangkan kondisi sosial budaya yang kondusif bagi tumbuhkembangnya kesadaran HAM masyarakat
			Meningkatkan koordinasi, pengkajian dan penataan peraturan daerah melalui Program Legislasi Daerah (prolegda)
			Sosialisasi produk hukum daerah pada <i>stakeholders</i> dan masyarakat luas
		2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar	Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial
			Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi para penyandang masalah sosial/masyarakat



			miskin
			Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat ataupun dunia usaha terhadap penyandang masalah social
			Perbaikan dan pengembangan infrastruktur fisik, terutama jalan, jaringan air bersih dan listrik di perdesaan
			Pengendalian pertumbuhan penduduk
		3. Pangarusutamaan gender dalam berbagai aspek pembangunan	Pelebagaan pangarusutamaan gender dan anak
			Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan pemberdayaan perempuan
			Meningkatkan peranserta dan kesetaraan gender dalam berbagai aktivitas pembangunan



Misi 7 : Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1	2	3	4
Mewujudkan pembangunan sesuai peruntukan ruang wilayah dan berwawasan lingkungan	1. Terjaganya kualitas sumber daya alam. 2. Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup. 3. Meningkatnya pemanfaatan sumber energi terbarukan.	1. Pengembangan pembangunan sesuai peruntukan ruang dan berwawasan lingkungan	Optimalisasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada lahan kritis, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian hutan  Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian hutan dan SDA lainnya  Melakukan konservasi sumber mata air  Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan ( <i>sustainable</i> ), termasuk optimalisasi Ruang Terbuka Hijau  Memberikan insentif kepada kelompok maupun orang perorangan yang berperan aktif/berjasa dalam pelestarian lingkungan hidup
		2. Peningkatan kualitas penanganan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penanganan bencana



		bencana	dan pasca bencana
			Relokasi penduduk pesisir yang rawan terjadi bencana
			Menetapkan jalur dan ruang evakuasi bagi penduduk rawan terkena bencana
		3. Pengembangan energi terbarukan dan ramah lingkungan	Pengembangan kajian dan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan yang murah dan ramah lingkungan

### 2.1.5 Tema, Prioritas, dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tema Pembangunan di tahun 2016 adalah :

***“Stabilisasi Kemandirian Perekonomian Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan***

Tema pembangunan tersebut kemudian menjadi muatan nilai dalam pelaksanaan pembangunan untuk masing-masing prioritas yang dilaksanakan oleh SKPD dengan melandaskan pada nilai-nilai lokal berupa jiwa kedisiplinan, kemandirian, kepedulian dan kebersamaan. Dalam RKPD tersebut ada 12 (dua belas) agenda pembangunan yang terimplementasi dalam berbagai urusan pemerintahan, baik yang bersifat urusan wajib maupun urusan pilihan.

Penetapan agenda prioritas pembangunan ini selain mengacu pada prioritas pembangunan pemerintah pusat, juga mempertimbangkan tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya serta kondisi obyektif di tahun 2014 dan tantangan/permasalahan pembangunan di tahun 2015. Prioritas pembangunan menjadi agenda yang sangat penting dalam rangka lebih memfokuskan kinerja capaian pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi serta dimaksudkan juga sebagai



upaya untuk mengatasi permasalahan, hambatan maupun tantangan mendesak yang berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penetapan prioritas dimaksud, disamping memperhatikan kebutuhan pembangunan dari masyarakat, juga disisi lain adanya keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah daerah.

Berdasarkan mekanisme pendekatan penentuan prioritas tersebut, maka prioritas pembangunan dalam substansi RKPD tahun 2016 terfokus pada penanganan masalah strategis yang dinilai mendesak karena berdampak luas dalam usaha mempercepat peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, baik material dan spiritual yang seimbang.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Tahun 2012-2017, dicanangkan 12 Agenda Prioritas Pembangunan atau Prioritas Agenda Strategis (**12 PAS**) sebagai berikut.

**1) Penataan Birokrasi dan Kemandirian Aparatur Pemerintah**

Penataan Birokrasi dan Kemandirian Aparatur Pemerintah menjadi prioritas dalam rangka peningkatan profesionalisme Aparatur Pemerintah serta mewujudkan *Good Governance* dalam mengelola potensi serta penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.

**2) Penanggulangan Kemiskinan**

Dinamis dan kompleksnya permasalahan kemiskinan sehingga dalam penanganannya memerlukan integrasi berbagai program kegiatan dan lintas sektoral. Penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas yang harus ditangani secara berkesinambungan dan sistemik melalui berbagai urusan dengan program dan kegiatan yang mampu mengentaskan kondisi miskinnya atau sifatnya pengamanan terhadap penderitaan keluarga miskin agar jangan terjerumus kedalam kondisi yang lebih terpuruk.

**3) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan**

Pembangunan urusan pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karenanya, Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan menjadi agenda prioritas karena permasalahan yang dihadapi adalah belum meratanya masyarakat usia belajar dapat mengakses kesempatan belajar pada pendidikan formal maupun



non formal, sehingga Angka Partisipasi Sekolah (APS) belum mencapai seratus persen, demikian juga kualitas SDM-nya masih perlu peningkatan.

Sejalan dengan upaya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, secara simultan dilakukan peningkatan persentase kelulusan siswa serta kualitas lulusan, sehingga kedepan akan berkembang SDM yang dapat memenuhi kebutuhan pelaku pembangunan, mampu membangun dirinya sendiri, membangun Bangsa dan Negara, serta mampu bersaing merebut pasar kerja baik dalam tataran regional, nasional maupun internasional.

#### 4) **Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan**

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu indikator penting dalam penentuan dan peningkatan IPM. Kualitas kesehatan masyarakat yang indikasinya tercermin melalui peningkatan umur harapan hidup merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan seluruh pembangunan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan lintas urusan.

Pembangunan kesehatan dilakukan melalui pencegahan, pemeliharaan kesehatan dan rehabilitasi kesehatan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai dan harga hidup sehat, maka pemerintah harus mampu menyediakan kebutuhan sarana prasarana kesehatan dan tenaga medis yang berkualitas dengan pelayanan prima. Untuk itu pembangunan kesehatan masih perlu ditingkatkan dan menjadi prioritas pembangunan.

#### 5) **Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja**

Kesenjangan antara jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja, pertumbuhan tenaga kerja lebih cepat dibandingkan kemampuan penciptaan kesempatan/perluasan lapangan kerja dan kemampuan tenaga kerja untuk menciptakan kesempatan kerja baru secara mandiri masih kurang merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab pemerintah bersama *stakeholders* lainnya yang harus ditangani secara serius, sistematis dan terarah. Sehubungan dengan itu, maka agenda Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja menjadi prioritas pembangunan lima tahun kedepan. Agenda ini searah dengan agenda Perbaikan iklim investasi. Investasi yang semakin berkembang



dan meningkat, akan berdampak pada tumbuhnya lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

#### **6) Pembangunan ekonomi**

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah yang indikatornya tercermin dari sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dan sejauh mana peningkatan produktivitas sektoral memberikan kontribusi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

Mencermati kondisi dan potensi ekonomi Buleleng yang berbasis pada pertanian dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam pembangunan perdesaan, maka pembangunan pertanian (pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan), industri kecil dan kepariwisataan dalam mendukung pembangunan perekonomian Buleleng menjadi domain agenda prioritas pembangunan ekonomi. Bangkit dan berkembangnya kegiatan pertanian di perdesaan akan mampu meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan petani yang berdampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan yang jumlahnya relatif cukup besar di sektor lapangan usaha pertanian tersebut.

#### **7) Pembangunan Infrastruktur**

Keberhasilan pembangunan pendidikan, kesehatan maupun ekonomi membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik dan mantap. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi agenda prioritas dalam rangka menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai guna mengakselerasi pembangunan daerah dalam segala aspek dimaksud.

#### **8) Perbaikan Iklim Investasi**

Perbaikan iklim investasi menjadi agenda prioritas sejalan dengan perkembangan kependudukan, khususnya ketenagakerjaan dan penciptaan lapangan usaha/lapangan kerja dalam rangka mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Peningkatan investasi didorong melalui upaya-upaya berkesinambungan menyangkut penyempurnaan pelayanan perijinan, optimalisasi pemanfaatan potensi daerah, promosi peluang investasi, dan



menggerakkan sektor riil. Peningkatan investasi diharapkan mampu semakin memperkuat keandirian keuangan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**9) Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban**

Agenda Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban menjadi prioritas pembangunan dalam upaya menciptakan dan menjamin adanya kepastian hukum/supremasi hukum serta menghargai hak azasi manusia. Demikian juga ketentraman dan ketertiban dimaksudkan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi investor dalam berinvestasi.

**10) Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan**

Agenda Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah menjadi prioritas sejalan dengan Bali sebagai daerah tujuan wisata budaya. Dengan adanya agenda prioritas ini, maka akan digali, diidentifikasi dan dikembangkan potensi budaya daerah, serta dilestarikannya kebudayaan dan kesenian daerah yang khas dan adiluhung.

**11) Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana**

Agenda Peningkatan Kualitas Penanganan Bencana menjadi prioritas sehubungan dengan wilayah Kabupaten Buleleng yang rentan/rawan bencana. Dengan meningkatnya kualitas penanganan bencana diharapkan segala kemungkinan bencana yang akan terjadi dapat diantisipasi dan dimitigasi.

**12) Peningkatan Kualitas dan Pelestarian Fungsi Lingkungan**

Tidak bisa dihindari, peningkatan pembangunan akan memberikan tekanan terhadap lingkungan. Sementara itu, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kelestarian hasil-hasil pembangunan membutuhkan kondisi lingkungan hidup yang semakin baik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan menjadi prioritas pembangunan agar kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati secara berkelanjutan.



Pencapaian sasaran RPJMD 2012-2017 di atas yang dilaporkan dalam LAKIP ini memerlukan ukuran yang memerlukan indikator kinerja utama (IKU). Dalam rangka penyusunan IKU yang berkinerja maka 21 sasaran RPJMD di atas dikembangkan menjadi 46 sebagai berikut

- 1 Meningkatkan komoditas pertanian dan perkebunan
- 2 Meningkatnya populasi ternak
- 3 Meningkatnya produksi perikanan
- 4 Tersedia infrastruktur yang memadai
- 5 Meningkatnya nilai investasi
- 6 Terciptanya lapangan kerja bagi angkatan kerja
- 7 Berkembangnya usaha koperasi dan UKM
- 8 Terwujudnya industri ekonomi kreatif
- 9 Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen
- 10 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 11 Tuntasnya Wajib Belajar 9 Tahun bagi anak usia sekolah
- 12 Meningkatnya aksesibilitas pendidikan
- 13 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pendidikan
- 14 Meningkatnya akses dan relevansi pendidikan
- 15 Meningkatnya kualitas pendidikan luar sekolah (PLS)
- 16 Meningkatnya akses dan investasi sarana dan prasarana pendidikan
- 17 Peningkatan perolehan medali dalam event Provinsi dan Nasional
- 18 Meningkatnya aksesibilitas, pemerataan kesehatan
- 19 Meningkatnya usia harapan hidup
- 20 Meningkatnya ketersediaan tenaga medis dan para medis
- 21 Menurunnya serangan penyakit menular
- 22 Meningkatnya pelayanan prima di RSUD
- 23 Terwujudnya pemerintahan yang bersih
- 24 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah
- 25 Terwujudnya pelayanan perijinan yang cepat dan tepat
- 26 Meningkatnya kesadaran politik masyarakat Buleleng
- 27 Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat



- 28 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
- 29 Meningkatnya efektivitas penerapan e-Gov
- 30 Meningkatnya kunjungan wisatawan
- 31 Terwujudnya pelestarian seni budaya Buleleng
- 32 Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Buleleng
- 33 Meningkatnya layanan bidang administrasi kearsipan
- 34 Terwujudnya keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas
- 35 Meningkatnya efektifitas pelayanan terhadap PMKS
- 36 Terselenggaranya kerukunan kehidupan beragama
- 37 Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
- 38 Terwujudnya kota layak anak
- 39 Terkendalinya jumlah penduduk
- 40 Meningkatnya luasan tumbuhnya vegetasi
- 41 Terwujudnya pelestarian dan kualitas lingkungan hidup
- 42 Meningkatnya layanan tanggap darurat
- 43 Terwujudnya lingkungan bersih
- 44 Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk
- 45 Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukan
- 46 Meningkatnya pemanfaatan sumber energi terbarukan

## **2.2 Indikator Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 telah menyediakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah tahun 2012-2017 berupa indikator kinerja makro daerah. Indikator kinerja daerah tahun 2016 yang memuat indikator kinerja, satuan ukur, dan target tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.3.



**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Buleleng Tahun 2016**

No.	Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah	Target 2
1	2	3
1	Pertumbuhan Ekonomi %	6,48
2	Gini Rasio	<0,25
3	IPM	78,66
4	Angka Melek Huruf (%)	94,20
5	Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	11,10
6	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	72,80

Indikator Kinerja Utama (IKU) menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Pemerintah Kabupaten Buleleng, untuk tahun 2016 telah menyusun IKU yang memuat: Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama, Instansi Penanggungjawab, dan Sumber Data. Indikator Kinerja Utama selengkapnya yang memuat formula pengukuran terlampir pada lampiran 1.

### **2.3 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Perjanjian kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2016 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.



Penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati Buleleng tahun 2016 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2012-2017, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016. Bupati Buleleng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 beserta program dan anggaran terlampir pada lampiran 2



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



### Bab III Memuat

#### 3.1 Kerangka Pengukuran

#### Kinerja

#### 3.2 Capaian Kinerja

##### 3.2.1 Capaian Kinerja Makro

##### 3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran

#### 3.3 Evaluasi Kinerja Sasaran

##### Strategis

#### 3.4 Akuntabilitas Keuangan

Bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini substansinya memuat: (1) Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. (Mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Pada Bab III laporan ini setiap pernyataan kinerja sasaran strategis diupayakan dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: (a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; (b) Membandingkan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; (c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; (d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); (e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (2) Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.



### 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Capaian kinerja dihitung dengan formulasi tertentu sebagai berikut.

- 1) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang **semakin baik**, dihitung dengan formula:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang **semakin buruk**, dihitung dengan formula:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Formulasi (2) digunakan untuk menghitung capaian kinerja indikator kinerja angka pengangguran, angka kematian dan sejenisnya.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal disajikan pada Tabel 3.1



**Tabel 3.1**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

Angka Capaian	Predikat	Warna
1	2	3
91-100	Sangat Berhasil	
76- 90	Berhasil	
61- 75	Cukup Berhasil	
46- 60	Kurang	
0-45	Sangat Kurang	

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

### **3.2. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi yang disajikan di sini ada dua yaitu capaian kinerja organisasi dengan ukuran Indikator Kinerja Makro yang termuat di dalam RPJMD dan capaian kinerja organisasi yang menggunakan ukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang indikator kerjanya menggunakan Indikator Kinerja Utama.

#### **3.2.1 Capaian Kinerja Makro Daerah Kabupaten Buleleng**

Hasil pengukuran atas indikator kinerja makro Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2015 menunjukkan hasil disajikan pada Tabel 3.2



**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2015**

Indikator Kinerja Makro	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd Target 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,71	6,71	6,11	6,48	5,81	89,66	6,63	87,63
Gini Rasio (angka ratio)	0,339	0,339**	0,337	<0,25	0,336	65,60	<0,25	65,60
IPM (angka indeks)	71,93	72,54	70,03	78,66	70,48	89,60	80,14	87,95
Angka Melek Huruf (%)	91,05	90,53	90,34	94,20	90,48	96,05	95,00	95,24
Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8.04	7,98*	6,77	11,10	7,67	69,09	12	63,92

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Buleleng, realisasi 2016 angka sangat sangat sementara

Berdasarkan tabel 3.2 di atas capaian kinerja makro Kabupaten Buleleng tahun 2016 dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

1. Pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target yang ditetapkan. Capaiannya 89,66% dengan predikat Berhasil. Realisasi tahun 2016 lebih kecil ketimbang realisasi tahun 2015. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017, realisasi tahun 2016 baru mencapai 87,63%.
2. Gini Ratio tidak mencapai target yang ditetapkan. Capaiannya 65,6% dengan predikat Cukup. Realisasi tahun 2016 lebih baik dari realisasi tahun 2015. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017, realisasi tahun 2016 baru mencapai 65,60%.
3. IPM tidak mencapai target yang ditetapkan. Capaiannya 89,60% dengan predikat Berhasil. Realisasi tahun 2016 lebih baik dari realisasi tahun 2015. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017, realisasi tahun 2016 mencapai 87,95%.









No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	0-45 Sangat Kurang	46-60 Kurang	61-75 Cukup Berhasil	76-90 Berhasil	91-100 Sangat Berhasil
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Meningkatnya luasan tumbuhnya vegetasi pada lahan kritis	1	85				<i>Berhasil</i>	
41	Terwujudnya pelestarian dan kualitas lingkungan hidup	2	100					<i>Sangat Berhasil</i>
42	Meningkatnya layanan tanggap darurat bencana	2	92,5					<i>Sangat Berhasil</i>
43	Terwujudnya lingkungan bersih	2	94,5					<i>Sangat Berhasil</i>
44	Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk	2	100					<i>Sangat Berhasil</i>
45	Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan	1	70			<i>Cukup Berhasil</i>		
46	Meningkatnya pemanfaatan sumber energi terbarukan.	2	100					<i>Sangat Berhasil</i>

Predikat capaian 46 sasaran dan 100 indikator kinerja dapat diresum menjadi tabel 3.4 dan tabel 3.5

**Tabel 3.4**  
**Resume Predikan Capaian 46 Sasaran**

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Persentase
1	2	3	4
1	Sangat Berhasil	38	82,61
2	Berhasil	4	8,70
3	Cukup Berhasil	3	6,25
4	Kurang	1	2,17
5	Sangat Kurang	0	0
	Jumlah	46	100



Tabel 3.5  
Resume Predikan Capaian 100 Indikator Kinerja

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Persentase
1	2	3	4
1	Sangat Berhasil	81	81
2	Berhasil	10	10
3	Cukup Berhasil	5	5
4	Kurang	3	3
5	Sangat Kurang	1	1
	Jumlah	100	100

### 3. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

#### Sasaran 1 Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian dan perkebunan

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 1, Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian dan perkebunan, dengan lima indikator diperoleh nilairata-rata capaian 142,09% termasuk katagori **Sangat Berhasil**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Sasaran 1 ini adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkti padi (Kw/Ha)	59,80	30,98	60,66	56,40	59,77	105,98	56,54	105,71
Produktivitas hortikultura (Ton/Thn)	7.780	7.680	11.949	8.900	22.894	263,69	8.880	257,81
Produktifitas palawija (Ton/Tahun)	39.294	39.294	50.895	41.700	51.966	124,62	42.534	122,17
Produktifitas buah-buahan (Kw/Ha)	65.934	97.789	115.449	108.533	108.570	100,03	113.959	95,27
Produktifitas komoditas perkebunan (Ton/Thn)	13.854	14.245	29.037,6	25.000	29.037,62	116,15	18.200	159,55
Rata-rata Capaian						142,09		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 1, Meningkatnya produktivitas Pertanian dan perkebunan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.



1. Realisasi tahun 2016 untuk semua lima indikator melampaui target tahun 2016 dan termasuk katagori Sangat Baik.
2. Realisasi tahun 2016 untuk semua lima indikator melampaui realisasi tahun 2015, 2014, dan realisasi tahun 2013.
3. Realisasi tahun 2016 juga sudah melampaui target akhir RPJMD tahun 2017.



Gambar 3.1

Pengolahan Produk Pertanian dan Perkebunan :Mendorong  
Produksi Pertanian dan Perkebunan

Capaian Sasaran 1, Meningkatnya produktivitas pertanian dan perkebunan, dicapai melalui Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Peternakan. Anggaran belanja program ini tahun 2016 Rp.3.678.423.110,- dan realisasi mencapai Rp.3.586.619.643,- (97,50%) (LAKIP Distanak tahun 2016)

Capaian tersebut juga didukung oleh program-program terkait secara bersinergi yaitu sebagai berikut.

1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, dengan anggaran Rp.1.966.967.363,- dan realisasi Rp.1.818.985.770,- (92,48%).
2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, dengan anggaran Rp.565.300.000,- dan realisasi Rp.539.592.376,- (95,45%).



3. Program peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/Perkebunan), dengan anggaran Rp.1.303.295.346,- dan realisasi Rp.1.247.469.965,- (965,72%).

Rata-rata capaian kinerja >100% dan realisasi anggaran <100% berarti capaian sasaran 1 ini efisien.

Meskipun capaian kinerja Sasaran 1 termasuk **Sangat Berhasil**, masih ada kendala yang dihadapi yang sudah klasik, sebagai berikut .

1. Masih adanya gangguan penyakit yang mengganggu peningkatan produksi.
2. Skala usaha tani kecil dan produksinya berfluktuasi
3. Penerapan teknologi produksi di tingkat petani belum optimal

Langkah-langkah yang sudah dilakukan dan perlu dilanjutkan ke depan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mengadakan pengamatan, pengawasan, pencegahan, pengendalian dan pengobatan, serta pemberantasan penyakit yang mengganggu peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
2. Melakukan optimalisasi dan intensifikasi pengelolaan lahan.
3. Berkoordinasi dengan sumber-sumber inovasi teknologi.

### **Sasaran 2 Meningkatnya populasi ternak**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 2, Meningkatnya populasi ternak dengan tiga indikator kinerja diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja 97, 51 % termasuk katagori **Sangat**

**Berhasil**. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 2 disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Populasi Ternak sapi (ekor)	130.551	130.551	119.272	141.719	125.408	88,49	143.136	87,61
Produksi Daging dan telur (Ton)	16.335,90	7.355,90	9.711	12.298,31	12.353,65	100,45	12.559,41	98,36
Tingkat konsumsi daging. (Ton/thn)	6.442,98	12.779,98	10.919,10	10.784,61	11.173,15	103,60	17.629,86	63,38
Rata-rata capaian						97,51		



Dari pengukuran kinerja Sasaran 2 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 dari tiga indikator kinerja, satu indikator kinerja belum mencapai target yang ditetapkan, baru mencapai 88,49 %. Dua indikator lainnya melampaui target mencapai 100,45% dan 1003,60%.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, realisasi tahun 2016 dua indikator kinerja melampaui realisasi tahun 2015, 2014, dan 2013.
3. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017, realisasi tahun 2016 untuk semua (tiga) indikator baru mencapai capaian berturut-turut 87,61%, 98,36%, dan 63,38%. Capaian ini berarti dibutuhkan kerja keras tahun 2017 agar bisa mencapai target tahun 2017.

Capaian Sasaran 2 dicapai melalui Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Anggaran belanja program ini tahun 2016 Rp.593.500.000,- dan realisasi Rp.580.268.850,- (97,77%) (LAKIP Distanak tahun 2016).

Capaian tersebut juga didukung oleh program-program lain yang terkait secara bersinergi yaitu sebagai berikut.

1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, dengan anggaran Rp.425.100.000,- dan realisasi Rp.421.692.510,- (99,20%).
2. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, dengan anggaran Rp.1.531.990.000,- dan realisasi 1.519.544.030,- (99,19%).

Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka mencapai sasaran kinerja masih bersifat klasik sebagai berikut.

1. Masih ada gangguan penyakit ternak.
2. Penerapan teknologi peternakan belum optimal.

Usaha-usaha yang telah dilakukan dan masih perlu diupayakan untuk mengatasi kendala adalah sebagai berikut.



1. Mengadakan pengamatan, pengawasan, pencegahan, pengendalian dan pengobatan serta pemberantasan penyakit ternak.
2. Berkoordinasi dengan sumber-sumber inovasi teknologi peternakan.

### Sasaran 3 Meningkatnya produksi perikanan

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 3, Meningkatnya produksi perikanan dengan tiga indikator diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sasaran 158,48% termasuk katagori **Sangat Berhasil**. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 3 ini disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produksi ikan yang ditangkap (Ton/Thn)	14.384	17.809,2	16.318,40	16.885	16.509,6	97,78	17.916,9	92,14
Produksi ikan yang dibudidaya (Ton/Thn)	1.979,7	2.055,2	3.216,80	1.315	3.493,4	265,66	1.447,8	241,49
Tingkat konsumsi ikan (Kg/org/thn)	25,8	30,9	31,23	30	33,60	112	30	112
Rata-rata capaian						158,48		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 3 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 untuk semua tiga indikator, dua indikator melampaui target yang ditetapkan. Satu indikator lainnya belum mencapai target, hanya mencapai 94,64%.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, realisasi tahun 2016 semua indikator melampaui realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017, realisasi tahun 2016, dua indikator kinerja sudah melampaui target tahun 2017. Satu indikator lainnya baru mencapai 92,14%. Ini berarti harus ada upaya keras di tahun 2017 agar indikator yang belum mencapai target ini bisa mencapai target di tahun 2017.



**Gambar 3.2**  
**Lomba Pengolahan Ikan: Mendorong**  
**Konsumsi dan Produksi Perikanan Budidaya**  
**dan Tangkap**

Capaian Sasaran 3, Meningkatnya produksi perikanan dicapai melalui program berikut.

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan anggaran Rp. 2.209.218.750,- dan realisasi Rp.1.893.832.366,- (85,72%) (LAKIP Diskanla tahun 2016).
2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan anggaran Rp.606.445.200,- dan realisasi Rp.604.115.344,- (99,62%) (LAKIP Diskanla tahun 2016).

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain sebagai berikut.

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang perikanan dan kelautan.
2. Rendahnya permodalan yang dimiliki nelayan dan pembudidaya.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan dan pembudidaya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pembinaan, pelatihan, magang serta studi banding nelayan, pembudidaya dan aparatur.
2. Memberikan bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan, budidaya maupun pengolahan hasil.

**Sasaran 4 Tersedia infrastruktur yang memadai**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 4 Tersedia infrastruktur yang memadai dengan dua indikator diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sasaran 94,36% termasuk katagori **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 4 ini disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah daerah isolir yang dapat diakses /jalan non status(km)	1.980,37	2.464,13	2.464,13	2.700	2.700	100	2.700	100
Luasan sawah yang dapat diairi (Hektar)	7.890	8.216	7.986,00	9.000	7.986	88,73	12.036	66,35
Rata-rata capaian						94,36		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 4 dapat ditarik simpulan berikut.

1. Realisasi tahun 2016 satu indikator mencapai target dan satu indikator lainnya belum mencapai target, baru mencapai 88,73% . .
2. Dibandingkan realisasi tahun 2015, realisasi tahun 2016 satu indikator melampaui realisasi tahun 2015, dan satu indikator lainnya sama dengan realisasi tahun 2015..
3. Realisasi sampai dengan 2016 dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017 satu indikator mencapai target tahun 2017, dan satu indikator lainnya baru mencapai 66,35%. Ini berarti untuk mencapai target tahun 2017 masih diperlukan kerja keras tahun 2017'.

Capaian Sasaran 4 di atas dicapai melalui pelaksanaan program berikut.

1. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan dan jalan perdesaan, dengan anggaran Rp.126.506.390,- dan realisasi Rp.109.280.640,- (86,38%).



2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan pengairan lainnya, dengan anggaran Rp.1.951.021.900,- dan realisasi Rp.1.936.794.400,- (99,27%). (LAKIP Dinas PU tahun 2016).

### **Sasaran 5 Meningkatnya nilai investasi**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 5, Meningkatnya nilai investasi dengan satu indikator Peningkatan nilai investasi diperoleh nilai capaian kinerja 100 % dengan katagori Sangat Berhasil.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 5, Meningkatnya nilai investasi disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
% Peningkatan nilai investasi	30,7	65,75	70,75	100	100	100	100	100

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 5 Meningkatnya nilai investasi dapat ditarik simpulan berikut.

1. Realisasi tahun 2016 belum mencapai target.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 lebih baik dari realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 sudah mencapai target tahun 2017.

### **Sasaran 6 Terserapnya angkatan kerja pada lapangan kerja**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 6, Terserapnya angkatan kerja pada lapangan kerja dengan dua indikator diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sasaran 80,85% dengan katagori **Baik**.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 6 ini disajikan berikut.



Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
% Masyarakat pencari kerja yang terserap pada lapangan kerja		28,72	41,40	97,25	60	61,70	97,25	61,70
% angka pengangguran	1,13	2,13	2,90	<3	2,70	100	<3	100
Rata-rata capaian						80,85		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 6 di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 untuk dua indikator kinerja, satu indikator kinerja belum mencapai target, dan satu indikator kinerja lainnya mencapai target yang ditetapkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 semua indikator realisasinya lebih baik dari realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017, maka realisasi sampai dengan tahun 2016 satu indikator belum mencapai target, dan satu indikator lainnya sudah mencapai target.

Capaian Sasaran 6, Terciptanya lapangan kerja bagi angkatan kerja dicapai melalui program berikut.

1. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
2. Pembinaan lembaga pelatihan kerja .
3. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja.
4. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.
5. Penyiapan tenaga kerja siap pakai.

Capaian Sasaran 6 di atas juga didukung oleh program-program terkait secara bersinergi, misalnya program promosi investasi.



Masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian Sasaran 6 di atas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum mampu sepenuhnya memenuhi permintaan masyarakat dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan tenaga kerja.

Masalah tersebut diatasi dengan cara-cara berikut.

1. Meningkatkan intensitas dan cakupan pelaksanaan pelatihan tenaga kerja.
2. Mendorong berbagai stakeholder untuk ikut melakukan pelatihan tenaga kerja.

### **Sasaran 7 Berkembangnya usaha koperasi dan UKM**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 7 Berkembangnya usaha koperasi dan UKM dengan tiga indikator kinerja diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja 98,08 % dengan katagori **Sangat Berhasil**.

Hasil perhitungan capaian kinerja Sasaran 7 ini disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
% jumlah koperasi yang sehat	54,6	88,97%	84,82	90	84,82	94,24	100	84,82
% UMKM yang berkembang	75,76	89	100,00	90	100	100	100%	100
Jumlah UMKM yang meningkat statusnya	2.877	3.826	4.524	4550	4550	100	100	100
Rata-rata capaian						98,08		

Dari perhitungan capaian kinerja Sasaran 7 di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 untuk tiga indikator kinerja, satu indikator kinerja belum mencapai target yang ditetapkan, baru mencapai 94,24%, dan dua indikator kinerja lainnya telah mencapai target dengan capaian 100%.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan satu indikator kinerja menurun realisasinya, dan dua indikator kinerja realisasinya sama.



3. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017, maka realisasi sampai dengan tahun 2016 menunjukkan satu indikator belum mencapai target, baru tercapai capaian 84,82%. Dua indikator kinerja lainnya sudah mencapai target 100%. Ini berarti masih perlu upaya keras di tahun 2017 agar satu indikator yang belum mencapai target menjadi bisa mencapai target tahun 2017.

Capaian Sasaran 7 tersebut di atas dicapai melalui pelaksanaan program di Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut.

1. Program pengembangan usaha koperasi, dengan anggaran Rp.51.437.450,- dan realisasi anggaran Rp.51.358.500,- (99,85%).
2. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, dengan anggaran Rp.350.879.651,- dan realisasi anggaran Rp.338.558.300,- (96,51%).
3. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, dengan anggaran Rp.15.530.308.890,- dan realisasi anggaran Rp.13.668.485.800,- (89,01%)

### **Sasaran 8 Terwujudnya industri ekonomi produktif/kreatif**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 8, Terwujudnya industri ekonomi produktif/kreatif, dengan satu indikator kinerja, diperoleh nilai capaian kinerja 69,23% dengan kategori **Cukup Berhasil**.

Hasil perhitungan capaian kinerja sasaran 8 ini disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
% Pertumbuhan IKRT	65,89	93	100	100	69,23	69,23	100	69,23

Dari perhitungan capaian kinerja Sasaran 8 di atas dapat ditarik simpulan berikut.



1. Realisasi tahun 2016 belum mencapai target yang ditetapkan, baru mencapai 62,23%.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 lebih rendah.
3. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 belum mencapai target tahun 2017.



**Gambar 3.3**

**Produk Industri Kecil Rumah Tangga**

Capaian kinerja Sasaran 8 tersebut di atas dicapai melalui program pada Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut.

1. Program pengembangan industri kecil dan menengah, dengan anggaran Rp.19.582.100, dan realisasi anggaran Rp.19.582.100,- (100%)
2. Program Peningkatan kemampuan teknologi industri/Kegiatan pembinaan kemampuan teknologi industri, dengan anggaran Rp.145.213.100,- dan realisasi anggaran Rp.143.187.700,- (98,17%).
3. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial/Kegiatan Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat, dengan anggaran Rp.224.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.222.039.200,- (99,12%).

**Sasaran 9 Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 9, Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen dengan, dua indikator, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja 100% termasuk katagori **Sangat Berhasil**.

Hasil perhitungan capaian kinerja sasaran 9 ini disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
% pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	15,78	25	100,00	100	100	100	100	100
Indeks Kepuasan Konsumen	70,55	80	76,67	80	80	100	80	100
Rata-rata capaian						100		

Dari perhitungan capaian kinerja Sasaran 9 dapat ditarik simpulan berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan semua indikator kinerja sudah mencapai target yang ditetapkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan satu indikator melampaui realisasi tahun 2015, dan satu indikator lainnya realisasinya sama dengan realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan semua indikator kinerja realisasinya sudah mencapai target tahun 2017.

Capaian kinerja Sasaran 9 dicapai melalui program /kegiatan di Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut.

1. Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, dengan anggaran Rp,51.500.000,- dan realisasi anggaran Rp.51.391.100,- (99,79%).
2. Kegiatan Operasionalisasi dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis kemetrolgian daerah, dengan anggaran Rp. 55.181.100, dan realisasi Rp.54.882.390,- (99,46%)

**Sasaran 10 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 10 Meningkatnya PAD dengan satu indikator diperoleh nilai capaian kinerja termasuk katagori

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 10 ini disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
% Peningkatan PAD	160.292 (M)	219,603 (M)	292,939 (M)	281,216 (M)	282,111 (M)	1,003	365,581 (M)	77,17

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 10 dapat ditarik simpulan berikut.

1. Realisasi tahun 2016 sudah melampaui target yang telah ditetapkan. .
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 lebih rendah dari realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 baru mencapai target 77,17 %..

Capaian kinerja Sasaran 10, dicapai melalui program/kegiatan di Dinas Pendapatan. Meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah dan tergalinya sumber-sumber pendapatan yang baru. Anggaran belanja langsung untuk membiayai kegiatan tahun 2016 Rp.8.980.000.000,- dengan realisasi mencapai Rp.7.603.762.446,- (84,67%) (LAKIP Dinas Pendapatan Tahun 2016).

Upaya mencapai capaian kinerja tersebut di atas menemui kendala sebagai berikut.

1. Adanya obyek dan subyek pajak PBB yang kurang jelas, sehingga sulit menyampaikan SPPT ke alamat yang dituju.
2. Belum ada tenaga khusus yang bisa mengadakan audit terhadap Wajib Pajak.
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia/aparatur di Dinas Pendapatan.

Upaya mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut.



1. Mengadakan pendataan ulang terhadap obyek dan subyek PBB bekerjasama dengan instansi terkait.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perpajakan.
3. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait/BPKP.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.
5. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kepala Daerah.

**Sasaran 11 Tuntasnya Wajib Belajar 9 tahun bagi anak usia sekolah**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasran 11, Tuntasnya Wajib Belajar 9 tahun bagi anak usia sekolah, dengan satu indikator kinerja, diperoleh nilai capaian kinerja sasaran 94,60% termasuk katagori **Sangat Berhasil**. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 11 ini disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
% anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 9 tahun	94,5	94,2	97,86	100	94,60	94,60	100	94,60

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 11 dapat ditarik simpulan berikut.

1. Realisasi tahun 2016 belum mencapai target 100% yang ditetapkan, dengan capaian kinerja 94,60%.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, realisasi tahun 2016 masih lebih rendah dari realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan capaian 94,60%. Diperlukan upaya yang terukur dari Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng di tahun 2017 agar wajib belajar 9 tahun mencapai target 100% di tahun 2017.

Capaian Sasaran 11 dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng sebagai berikut.

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dengan anggaran Rp. 118.895.863.587,12 dan realisasi anggaran Rp. 100.994.324.291,80 (84,94%) (LAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2016).



## Sasaran 12 Meningkatnya aksesibilitas pendidikan

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran12, Meningkatnya aksesibilitas pendidikan, dengan delapan indikator kinerja, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja 91,56% termasuk katagori **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 12 ini disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
APK SD	109,87	106,15	107,50	100	104,4	104,46	101,86	102,5
APK SMP	101,08	99,54	99,30	100	104,23	104,23	101,86	102,33
APK SMA	106,19	86,71	90,89	97,50	86,56	88,8	100	86,56
APK SMK	106,19	86,71	74,25	75	86,56	115,3	100	86,56
APM SD	100,03	98,06	98,90	100	96,09	96,09	100	96,09
APM SMP	88,73	77,34	79,23	100	94,60	94,60	100	94,60
APM SMA	101,53	75,01	77,86	100	64,52	64,52	100	64,52
APM SMK	101,53	75,01	76,25	100	64,52	64,52	100	64,52
Rata-rata capaian						91,56		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 12 dapat ditarik simpulan berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan dari delapan indikator kinerja, tiga indikator realisasinya melampaui target, dan lima indikator realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, rata-rata capaiannya 91,56% termasuk katagori **Sangat Berhasil**.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan tiga indikator realisasinya melampaui realisasi tahun 2015, dan lima indikator realisasinya kurang dari realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan dua indikator kinerja realisasinya melampaui target tahun 2017, dan enam indikator kinerja realisasinya belum mencapai target tahun 2017 yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan perlu kerja keras Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng di tahun 2017 agar Sasaran 12 realisasinya bisa mencapai target 2017 yang telah ditetapkan.



Capaian Sasaran 12 dicapai melalui program/kegiatan di Dinas Pendidikan sebagai berikut.

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dengan anggaran Rp. 118.895.863.587,12 dan realisasi anggaran Rp. 100.994.324.291,80 (84,94%) (LAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2016).
2. Program Pendidikan Menengah, dengan anggaran Rp.49.912.526.696,89 dan realisasi anggaran Rp.33.499.721.514,07 (67,19%) (LAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2016).
3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan anggaran Rp.14.595.612.650,- dan realisasi anggaran Rp.14.127.561.260,- (97,78%).
4. Program Manajemen Pembiayaan Pendidikan, dengan anggaran Rp.2.460.195.685,- dan realisasi anggaran Rp.2.234.040.726,- (90,81%) (LAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2016).

### **Sasaran 13 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pendidikan**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 13, Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pendidikan dengan empat indikator kinerja, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja 94,14% termasuk katagori **Sangat Berhasil**. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 13 ini disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rata-rata nilai UN, UAS BN	7,36	7,42	7,17	7,84	7,06	90	7,84	90
Peningkatan angka kelulusan (%)	99,49	99,6	99,95	100	99,99	99,99	100,00	99,99
Peningkatan angka kenaikan kelas (%)	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100
Siswa tamatan SMP yang melanjutkan	10.101	10.101	9.842	10.500	9.088	86,55	100%	86,55
Rata-rata capaian						94,135		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 13 dapat ditarik simpulan berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan tiga indikator tidak mencapai target 2016 yang telah ditetapkan, dan satu indikator mencapai target 100% .



2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan tiga indikator realisasinya kurang dari realisasi tahun 2015, satu indikator kinerja realisasinya sama dengan realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan tiga indikator kinerja realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan, dan satu indikator kinerja realisasinya sudah mencapai target. Karena itu perlu kerja keras di tahun 2017 agar Sasaran 13 realisasinya mencapai target di tahun 2017.

Capaian Sasaran 13 dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Pendidikan sebagai berikut.

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dengan anggaran Rp. 118.895.863.587,12 dan realisasi anggaran Rp. 100.994.324.291,80 (84,94%) (LAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2016).
2. Program Pendidikan Menengah, dengan anggaran Rp.49.912.526.696,89 dan realisasi anggaran Rp.33.499.721.514,07 (67,19%) (LAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2016).
3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan anggaran Rp.14.595.612.650,- dan realisasi anggaran Rp.14.127.561.260,- (97,78%). (LAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2016).
4. Program Manajemen Pembiayaan Pendidikan, dengan anggaran Rp.2.460.195.685,- dan realisasi anggaran Rp.2.234.040.726,- (90,81%) (LAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2016).

#### **Sasaran 14 Meningkatnya akses dan relevansi pendidikan menengah yang berkualitas**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 14, Meningkatnya akses dan relevansi pendidikan menengah yang berkualitas, dengan dua indikator kinerja, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja 100% termasuk katagori **Sangat Berhasil**.



Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 14 ini disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rasio SMA/SMK/MA terhadap murid	0,0026	0,0026	0,0032	0,0067	0,0067	100	0,0067	100
Rasio guru terhadap murid	0,0447	0,0447	0,0490	0,0495	0,0495	100	0,0495	100
Rata-rata capaian						100		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 14 dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan semua indikator kinerja mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan semua indikator kinerja realisasinya melampaui realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan semua indikator kinerja realisasinya sudah mencapai target tahun 2017 yang telah ditetapkan. Capaian ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun 2017.

Capaian Sasaran 14 dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Pendidikan sebagai berikut.

1. Program Pendidikan Menengah, dengan anggaran Rp.49.912.526.696,89 dan realisasi anggaran Rp.33.499.721.514,07 (67,19%) (LAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2016).
2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan anggaran Rp.14.595.612.650,- dan realisasi anggaran Rp.14.127.561.260,- (97,78%). (LAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2016).



3. Program Manajemen Pembiayaan Pendidikan, dengan anggaran Rp.2.460.195.685,- dan realisasi anggaran Rp.2.234.040.726,- (90,81%) (LAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2016).

### Sasaran 15 Meningkatnya kualitas pendidikan luar sekolah (PLS)

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 15, Meningkatnya kualitas pendidikan luar sekolah, dengan dua indikator kinerja, diperoleh rata-rata nilai capaian kinerja 73% termasuk katagori **Cukup Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasran 15 ini disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penurunan angka buta huruf (%)	2,45	2,45	1000 orang	100	100	100	100	100
% penurunan angka putus sekolah	34,77	45,77	385 orang	100	46	46	100	46
Rata-rata capaian						73		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 15 dapat ditarik simpulan berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan, dari dua indikator kinerja, satu indikator kinerja mencapai target tahun 2016 yang telah ditetapkan, dan satu indikator kinerja lainnya belum mencapai target.
2. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan dari dua indikator kinerja, satu indikator sudah mencapai target, dan satu indikator kinerja lainnya belum mencapai target. Karena itu masih perlu ada upaya di tahun 2017 agar Sasaran 15 realisasinya mencapai target tahun 2017.

Capaian Sasaran 15, Meningkatnya kualitas pendidikan luar sekolah, dicapai melalui pelaksanaan Program/Kegiatan di Dinas Pendidikan yaitu, Program Pendidikan Non Formal, dengan anggaran Rp.357.287.850,- dan realisasi anggaran Rp.346.307.530,- (96,93%).



### Sasaran 16 Meningkatnya akses dan investasi sarana dan prasarana pendidikan

Hasil evaluasi capaian Sasaran 16, Meningkatnya akses dan investasi sarana dan prasarana pendidikan, dengan tiga indikator kinerja, diperoleh nilai rata-rata capaian 100% termasuk katagori **Sangat Berhasil**. Hasil pengukuran kinerja Sasaran 16, Meningkatnya akses dan investasi sarana dan prasarana pendidikan, disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rasio ketersediaan SD/MI terhadap murid	0,0067	0,0067	0,0069	0,0069	0,0069	100	0,0069	100
Rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap murid	0,0026	0,0026	0,0032	0,0032	0,0032	100	0,0032	100
Rasio ketersediaan SMA/SMK/MA terhadap murid	0,0026	0,0026	0,0032	0,0032	0,0032	100	0,0032	100
Rata-rata capaian						100		

Dari pengukuran kinerja Sasaran 16 dapat ditarik simpulan berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan semua indikator kinerja mencapai target yang ditetapkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 semua indikator kinerja realisasinya sama dengan realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017, maka realisasi sampai dengan tahun 2016 menunjukkan semua indikator kinerja realisasinya sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di tahun 2017.

Capaian Sasaran 16 dicapai melalui program/kegiatan di Dinas Pendidikan sebagai berikut.

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dengan anggaran Rp. 118.895.863.587,12 dan realisasi anggaran Rp. 100.994.324.291,80 (84,94%) (LAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2016).



2. Program Pendidikan Menengah, dengan anggaran Rp.49.912.526.696,89 dan realisasi anggaran Rp.33.499.721.514,07 (67,19%) (LAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2016).
3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan anggaran Rp.14.595.612.650,- dan realisasi anggaran Rp.14.127.561.260,- (97,78%). (LAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2016).
4. Program Manajemen Pembiayaan Pendidikan, dengan anggaran Rp.2.460.195.685,- dan realisasi anggaran Rp.2.234.040.726,- (90,81%) (LAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2016).

### **Sasaran 17 Peningkatan perolehan medali dalam event Provinsi dan Nasional**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 17, Peningkatan perolehan medali dalam event Provinsi dan Nasional, dengan tiga indikator kinerja, (1) Peningkatan Perolehan Medali Emas, (2) Peningkatan Perolehan Medali Perak, dan (3) Peningkatan Perolehan Medali Perunggu, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja 53,18% termasuk katagori capaian **Kurang Berhasil**.

Hasil perhitungan capaian kinerja Sasaran 17 disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan Perolehan Emas	114,85%	112 Medali	105	115	58	50,43	130	44,61
Peningkatan Perolehan Perak	104,39%	130 Medali	126	135	58	42,96	140	41,43
Peningkatan Perolehan Perunggu	106,00%	142 Medali	123	130	86	66,15	150	57,33
Rata-rata capaian						53,18		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 17 dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan semua indikator kinerja realisasinya belum mencapai target tahun 2016 yang telah ditetapkan.



2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan semua indikator kinerja realisasinya lebih rendah.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan semua indikator kinerja realisasinya belum mencapai target tahun 2017. Capaian ini menunjukkan perlu kerja keras di 2017 agar Sasaran 17 Peningkatan perolehan medali dalam event Provinsi dan Nasional bisa mencapai target tahun 2017 yang telah ditetapkan.

Capaian Sasaran 17 dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pendidikan sebagai berikut.

1. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga, dengan anggaran Rp.2.866.833.225,- dan realisasi anggaran Rp.2.603.393.396,- (81,47%)
2. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga, melalui pelaksanaan kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga dengan anggaran Rp.545.744.200,- dan realisasi anggaran 245.404.733,- (44,97%). Didukung dengan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga, dengan anggaran Rp.1.003.483.300,- dan realisasi anggaran Rp.891.991.400,- (88,89%)

### **Sasaran 18 Meningkatnya aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 18, Meningkatnya aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan satu indikator kinerja, diperoleh nilai capaian kinerja 100% termasuk katagori **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 18 ini disajikan berikut,

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
% Desa/Kelurahan yang memiliki puskesmas dengan respons time <24 jam	100	100	100	100	100	100	100	100

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 18 dapat ditarik simpulan berikut.



1. Realisasi tahun 2016 sudah mencapai target tahun 2016 yang telah ditetapkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 sama dengan realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 sudah mencapai target tahun 2017. Capaian ini tinggal dipertahankan tahun 2017.

### Sasaran 19 Meningkatnya usia harapan hidup

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 19, Meningkatnya usia harapan hidup, dengan satu indikator kinerja, diperoleh nilai capaian 97,22%, termasuk katagori **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 19. Meningkatnya usia harapan hidup, disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usia harapan hidup	67	71,60	70,00*	72	70,81	97,22	73,10	96,87

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 19 dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 belum mencapai target tahun 2016 yang telah ditetapkan. Namun, capaiannya 97,22% tergolong katagori **Sangat Baik**.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 lebih baik ketimbang realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target periode akhir RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 belum mencapai target 2017, capaiannya baru mencapai 96,87%. Karena itu diperlukan upaya terukur di tahun 2017 agar Sasaran 19 realisasinya mencapai target tahun 2017 yang telah ditetapkan.

### Sasaran 20 Meningkatnya ketersediaan tenaga medis dan paramedis

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 20, Meningkatnya ketersediaan tenaga medis dan paramedis, dengan dua indikator kinerja, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja 100% termasuk katagori **Sangat Berhasil**.



Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 20 ini disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rasio Tenaga medis dengan pasien/penduduk	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	100	0,003	100
Rasio Tenaga para medis dengan Pasien/penduduk	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	100	0,025	100
Rata-rata capaian						100		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 20 dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan semua indikator kinerja telah mencapai target tahun 2016 yang telah ditetapkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan semua indikator kinerja realisasinya sama dengan realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi sampai dengan tahun 2016 menunjukkan semua indikator kinerja Sasaran 20 sudah mencapai target. Capaian ini dipertahankan di tahun 2017.

Walaupun capaian kinerja sudah mencapai target, namun masih ada permasalahan yang berkaitan ketersediaan tenaga medis dan paramedis.

1. Kekurangan beberapa dokter spesialis.
2. Kualifikasi pendidikan perawat yang masih ada belum memenuhi syarat minimal D3.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan.

1. Melakukan perekrutan dokter spesialis.
2. Mengirim SDM untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan.

**Sasaran 21 Menurunnya serangan penyakit menular**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 21, Menurunnya serangan penyakit menular dengan satu indikator kinerja, diperoleh nilai capaian kinerja 100% termasuk katagori

**Sangat Berhasil.**

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 21 ini disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Angka kesakitan DBD	<80/1000	<80/1000	<80/1000	<80/1000	<80/1000	100	<80/1000	100

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 21 dapat ditarik simpulan berikut.

1. Realisasi tahun 2016 sudah mencapai target tahun 2016 yang telah ditetapkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 sama dengan realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 sudah mencapai target 2017 yang telah ditetapkan.

Capaian Sasaran 21 dicapai melalui pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan lima Kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, dengan anggaran Rp.2.240.500.084,- dan realisasi anggaran Rp.1.387.325.448,- (61,91%) (Lakip Dinas Kesehatan Tahun 2016).

**Sasaran 22 Meningkatnya pelayanan prima RSUD**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 22, Meningkatnya pelayanan prima Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dengan tiga indikator kinerja, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja 106,96% termasuk katagori **Sangat Berhasil.**

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 22 disajikan berikut.



Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
% pasien rawat jalan puas	78,70	98,08	100	100	100	100	100	100
% pasien rawat inap yang puas.	80,70	97,70	99,00	100	99,38	99,38	100	99,38
IKM	77,89	77,89	96,66	80	97,22	121,5	80	121,5
Rata-rata capaian						106,96		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 22 dapat ditarik simpulan berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan satu indikator kinerja sudah mencapai target tahun 2016, satu indikator kinerja realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan, dan satu indikator kinerja lainnya melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, capaiannya tergolong katagori **Sangat Berhasil**.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 dua indikator kinerja sudah melampaui realisasi tahun 2015, dan satu indikator kinerja realisasinya sama.
3. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan satu indikator kinerja sudah mencapai target tahun 2017 yang telah ditetapkan, satu indikator kinerja mencapai target 2017 yang telah ditetapkan dan satu indikator kinerja lainnya belum mencapai target tahun 2017. Karena itu masih diperlukan upaya di tahun 2017 agar Sasaran 22 realisasinya mencapai target Tahun 2017.

Pelayanan Prima merupakan Visi RSUD Kabupaten Buleleng, karena itu semua Program/Kegiatan di RSUD mengacu kepada terwujudnya Visi itu (LAKIP RSUD Tahun 2016).

**Sasaran 23 Terwujudnya pemerintahan yang bersih**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 23, Terwujudnya pemerintahan yang bersih, dengan dua indikator kinerja, diperoleh nilai capaian kinerja 100,8%, termasuk katagori **Sangat Berhasil**. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 23 ini disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
% LHP yang ditindaklanjuti		73,01	79,11	80	81,34	101,6	100	101,6
Rata-rata capaian						100,8		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 23 dapat ditarik simpulan berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan, dari dua indikator, satu indikator kinerja realisasinya sudah mencapai target tahun 2016 yang telah ditetapkan, dan satu indikator kinerja lainnya realisasinya melampaui target 2016 yang telah ditetapkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan satu indikator kinerja realisasinya sama dengan realisasi tahun 2015, dan satu indikator kinerja realisasinya melampaui realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan satu indikator kinerja sudah mencapai target tahun 2017 yang telah ditetapkan, dan satu indikator lainnya melampaui target tahun 2017. Capaian ini perlu dipertahankan di tahun 2017.

**Sasaran 24 Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Buleleng**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 24, Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan satu indikator diperoleh nilai capaian kinerja 100% tergolong katagori **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 24 disajikan berikut.



Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SKPD mencapai nilai B		C	B	B	B	100	B	100

Dari pengukuran kinerja Sasaran 24 dapat ditarik simpulan berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan sudah mencapai target tahun 2016 yang telah ditetapkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan sama dengan realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 sudah mencapai target tahun 2017 yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa SKPD perlu mempertahankan di tahun 2017 agar nilai LAKIP SKPD tetap bisa mencapai target 2017 yang telah ditetapkan.

Kendala yang ditemui dalam upaya mencapai capaian kinerja Sasaran 24 adalah sebagai berikut.

1. Belum diimplementasikan SAKIP secara optimal.
2. Belum terdapat kesatuan pemahaman tentang implementasi SAKIP diantara Sumber Daya Manusia/Aparatur.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai capaian kinerja Sasaran 24 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia/aparatur tentang implementasi SAKIP dengan mengundang Narasumber ahli untuk memberikan informasi dan pelatihan.
2. Mengadakan studi ke daerah-daerah yang sudah mengimplementasikan SAKIP dengan baik.
3. Mengimplementasikan SAKIP pada instansi yang merupakan entitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**Sasaran 25 Terwujudnya pelayanan perijinan yang cepat dan tepat**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 25, Terwujudnya pelayanan perijinan yang cepat dan tepat dengan tiga indikator kinerja, diperoleh nilai rata-rata capaian 108,76% termasuk katagori **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 25 disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyelesaian penerbitan perijinan IMB < 14 hari	1.000	1.000 Ijin	1.105	1.100	1.385	126	1.500	92,3
Angka IKM	80	70,75	80,25	80	80,25	100,3	80	100,3
% pengaduan masyarakat yang terselesaikan	45,78	75,78	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian						108,76		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 25 dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan dua indikator kinerja realisasinya telah melampaui target tahun 2016 yang telah ditetapkan, dan satu indikator kinerja realisasinya mencapai target 2016 yang telah ditetapkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan satu indikator kinerja melampaui realisasi tahun 2015, dan dua indikator kinerja realisasinya sama dengan realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan satu indikator kinerja belum mencapai target tahun 2017, satu indikator kinerja sudah mencapai target tahun 2017, dan satu indikator kinerja lainnya mencapai target tahun 2017. Karena itu masih perlu upaya di tahun 2017 agar Sasaran 25 realisasinya bisa mencapai target 2017 yang telah ditetapkan.

Capaian Sasaran 25 melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu. Dengan sembilan kegiatan di Badan Pelayanan Perijinan



Terpadu, dengan anggaran Rp.1.011.177.855,- dan realisasi anggaran Rp.1.006.727.488,- (99,55%). (LAKIP Badan Peleayanan Perijinan Terpadu Tahun 2016). Rata-rata Capaian target >100% dan realisasi anggaran <100%, berarti program ini efisien dalam mencapai sasarannya.

### **Sasaran 26 Meningkatnya kesadaran politik masyarakat**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 26, Meningkatnya kesadaran politik masyarakat dengan satu indikator kinerja, diperoleh nilai capaian kinerja sasaran 100%, termasuk katagori **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 26 disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
% rekomendasi bidang politik yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 26 dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan sudah mencapai target tahun 2016 yang telah ditetapkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 sama dengan realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 sudah mencapai target tahun 2017. Capaian ini dipertahankan di tahun 2017, sehingga target tahun 2017 tetap tercapai.

### **Sasaran 27 Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 27, Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dengan dua indikator kinerja, diperoleh nilai rata-rata capaian 85%, termasuk katagori **Berhasil**.

.Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 27 disajikan berikut.



Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
% menurunnya daerah-daerah rawan konflik	20,34	33,34%	65%	100	70	70	100	70
% penindakan pelanggaran Perda dan Perbup	15,78	27,59%	70	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian						85		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 27 dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan satu indikator kinerja belum mencapai target tahun 2016 yang telah ditetapkan, dan satu indikator kinerja lainnya sudah mencapai target tahun 2016 yang telah ditetapkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan dua indikator kinerja realisasinya telah melampaui realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan satu indikator kinerja realisasinya belum mencapai target tahun 2017, dan satu indikator kinerja lainnya realisasinya sudah mencapai target 2017. Capaian ini menunjukkan masih diperlukan kerja keras di 2017 agar Sasaran 27 realisasinya bisa mencapai target tahun 2017 yang telah ditetapkan.

Capaian Sasaran 27 dicapai melalui pelaksanaan program Satuan Polisi Pamong Praja berikut.

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
2. Program Pemeliharaan Kantrاتبmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
3. Program Koordinasi Pelayanan Umum Pemerintahan.

Anggaran biaya langsung untuk program-program tersebut pada Satuan Polisi Pamong Praja Rp.4.148.478.670,- dan realisasi anggaran Rp.4.064.138.185,- (97,97%) (LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016)

### **Sasaran 28 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan**



Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 28, Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, dengan dua indikator kinerja, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sasaran 100%, termasuk katagori **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 28 disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
% SKPD dengan kualitas RENSTRA yang baik	85,75	90	100	100	100	100	100	100
% usulan perencanaan yang disetujui DPRD	77,78	80	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian						100		

Dari hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 28 dapat ditarik simpulan berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan dua indikator kinerja telah mencapai target tahun 2016 yang telah ditetapkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan dua indikator kinerja realisasinya sama dengan realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi sampai dengan tahun 2015 menunjukkan dua indikator kinerja telah mencapai target tahun 2017 yang telah ditetapkan. Capaian ini perlu dipertahankan di tahun 2017.

Capaian Sasaran 28 melalui pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah di Bappeda, terdiri dari enam kegiatan, dengan anggaran Rp.2.950.078.880,- dan realisasi anggaran Rp.2.863.971.112,- (97,08%) (LAKIP BAPPEDA Tahun 2016).

### **Sasaran 29 Meningkatnya efektivitas penerapan E-Gov. di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 29 Meningkatnya efektivitas penerapan E-Gov. di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng dengan satu indikator kinerja, diperoleh nilai capaian kinerja sasaran 100%, termasuk katagori **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 29 disajikan berikut.



Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
% SKPD yang dapat mengakses jaringan e-Gov	80,75	85,75	51,06	100	100	100	100	100

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 29 dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 sudah mencapai target 2016 yang ditetapkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 sudah melampaui realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 sudah mencapai target, 2017. Capaian ini perlu dipertahankan di tahun 2017.

Capaian Sasaran 29 dapat dicapai melalui pelaksanaan Program Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Dinas Kominikasi dan Informasi Kabupaten Buleleng, dengan anggaran Rp.1.494.880.000,- dan realisasi anggaran Rp.1.491.240.800,- (99,76%) (LAKIP Dinas Kominfo Tahun 2016).



Gambar 3.4  
Pelatihan Pembuatan Web bagi ASN untuk Menunjang E-Gov.

**Sasaran 30 Meningkatnya kunjungan wisatawan**



Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 30, Meningkatnya kunjungan wisatawan, dengan dua indikator kinerja, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sasaran 124%, termasuk katagori **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 30 disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
% Peningkatan Jumlah wisatawan*	638.147 orang	663.826 orang	702.944 orang	110	98	89	100	98
% peningkatan kontribusi kunjungan wisata*		34	103,00	111	177	159	100	177
Rata-rata capaian						124		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 30 dapat ditarik simpulan berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan dari dua indikator kinerja, satu indikator belum mencapai target tahun 2016, dan satu indikator lainnya telah melampaui target tahun 2016.
2. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan, satu indikator kinerja realisasinya belum mencapai target tahun 2017, dan satu indikator kinerja sudah melampaui target tahun 2017. Karena itu masih perlu kerja keras di tahun 2017 untuk mencapai target 2017.

Capaian sasaran 30 dicapai melalui pelaksanaan program di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut.

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan anggaran Rp.1.316.450.000,-
2. Program Kemitraan, dengan anggaran Rp.316.750.000,-
3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan anggaran Rp.3.483.304.000,- (LAKIP Disbudpar Tahun 2016).



### Sasaran 31 Terwujudnya pelestarian seni budaya Buleleng

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 31, Terwujudnya pelestarian seni budaya, dengan dua indikator kinerja, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sasaran 105,44%, tergolong katagori **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja, Sasaran 31 disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah sekaa/sanggar seni yang aktif	2.200	2.500	2.020	2.110	2.216	105	2.200	100,73
Jumlah seniman berprestasi	170	180	201	170	180	105,88	170	105,88
Rata-rata capaian						105,44		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 31 dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan dari dua indikator kinerja semua indikator kinerja melampaui target tahun 2016 yang telah ditetapkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan satu indikator kinerja realisasinya menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, dan satu indikator kinerja lainnya realisasinya melampaui realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan semua indikator kinerja melampaui target tahun 2017. Capaian ini perlu dipertahankan di tahun 2017.

Capaian Sasaran 31 dicapai melalui pelaksanaan program di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut.

1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan anggaran Rp.3.930.700,-
2. Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan anggaran Rp.1.305.500,-
3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dengan anggaran Rp.782.400,- (LAKIP Disbudpar Tahun 2016)

**Sasaran 32 Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Buleleng**

Hasil evaluasi capaian kinerja, Sasaran 32 Terwujudnya tertib administrasi kependudukan, dengan satu indikator kinerja, diperoleh nilai capaian kinerja sasaran 91%, tergolong katagori **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja, Sasaran 32 disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
% tingkat akurasi data penduduk	90,62	90,62	91,31 %	100	91	91	100	91

Dari pengukuran capaian kinerja, Sasaran 32 dapat ditarik simpulan berikut.

1. Realisasi tahun 2016 belum mencapai target tahun 2016 yang telah ditetapkan. Namun capaiannya tergolong Sangat Berhasil, dengan nilai capaian 91%.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan penurunan.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 belum mencapai target tahun 2017. Karena itu dibutuhkan kerja keras di tahun 2017 agar Sasaran 32 bisa mencapai target tahun 2017.

Capaian Sasaran 32 dicapai melalui pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan anggaran Rp.2.561.904.800,- dan realisasi anggaran Rp.2.557.479.780,- (99,83%) (LAKIP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Tahun 2016).

**Sasaran 33 Meningkatnya layanan bidang administrasi kearsipan yang baik**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 33, Meningkatnya layanan bidang administrasi kearsipan yang baik, dengan dua indikator diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja 100%, termasuk katagori **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 33 disajikan berikut.



Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rata-rata waktu yg dibutuhkan mengakses arsip	15 Menit	5 Menit	5 Menit	5Menit	5 Menit	100	5 Menit	100
Indeks kepuasan pelanggan	75,78	74,06	74.06	80	80	100	80	100
Rata-rata capaian						100		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 33 dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan dari dua indikator kinerja, semua indikator kinerja telah mencapai target tahun 2016.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan satu indikator kinerja realisasinya sama dengan realisasi tahun 2015, dan satu indikator kinerja lainnya melampaui realisasi tahun 2015..
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan semua indikator kinerja telah mencapai target 2017. Capaian ini perlu dipertahankan di tahun 2017.

Capaian Sasaran 33 dicapai melalui Program/kegiatan berikut.

1. Pendataan dan Penataan Dokumentasi/Arsip Daerah di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, dengan anggaran Rp.25.606.200,- dan realisasi manggaran Rp.22.076.758,- (86,22%).
2. Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan instansi Pemerintah/Swasta, dengan anggaran Rp.26.610.800,- dan realisasi anggaran Rp.26.303.883,- (98,85%).

#### **Sasaran 34 Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 34, Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas, dengan lima indikator kinerja, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja 100%, termasuk katagori **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 34 disajikan berikut.



Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
% penurunan angka kecelakaan lalu lintas	15,34	29,34 %	20	12,5	12,5	100	25%	50
% armada yang beroperasi laik jalan	65,37	88,37 %	75	80,42	80,42	100	100%	100
Rata-rata kecepatan di jalur kota	1,75menit /meter	0,75	30	30	30	100	30	100
% Penurunan titik macet	10,75	18,75 %	15	3,56	3,56	100	25%	14,24
Perolehan WTN	1 Tropi	1 Tropi	1 Tropi	1 Tropi	1 Tropi	100	1 Tropi	100
Rata-rata capaian						100		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 34 dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan dari lima indikator kinerja semuanya mencapai target tahun 2016 yang telah ditetapkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan dari lima indikator kinerja, dua indikator kinerja realisasinya menurun, dua indikator kinerja realisasinya tetap, dan satu indikator kinerja realisasinya melampaui realisasi tahun 2015. Penurunan realisasi beberapa indikator kinerja dibandingkan realisasi tahun 2015 merupakan penurunan yang diharapkan seperti misalnya penurunan angka kecelakaan lalu lintas dan penurunan titik macet.



**Gambar 3.5**  
**Penghargaan Wahana Tata Nugraha untuk**  
**Buleleng Tahun 2016**

3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan, dua indikator kinerja belum mencapai target tahun 2017, dan tiga indikator kinerja sudah mencapai target. Karena itu masih diperlukan upaya keras di tahun 2017 agar Sasarn 34 mencapai target tahun 2017.

Capaian Sasaran 34 didukung oleh pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016 di Dinas Perhubungan sebagai berikut.

1. Kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas, dengan anggaran Rp.256.374.127,- dan realisasi anggaran Rp.255.738.400,- (99,75%)
2. Kegiatan pengadaan marka jalan, dengan anggaran Rp.125.889.800,- dan realisasi anggaran Rp.125.889.800,- (100%).
3. Kegiatan pengadaan pagar pengaman, dengan anggaran Rp.95.108.900,- dan realisasi anggaran Rp.95.074.450,- (99,96%).
4. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan, dengan anggaran Rp.806.122.224,- dan realisasi anggaran Rp.805.960.075,- (99,98%) (LAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2016)



### Sasaran 35, Meningkatnya efektivitas pelayanan terhadap PMKS

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 35, Meningkatnya efektivitas pelayanan terhadap PMKS dengan satu indikator kinerja, diperoleh nilai capaian kinerja sasaran 76,67%, termasuk katagori **Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 35 disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan PMKS yang mapan	15 PMKS	25 PMKS	30PMKS	30	23	76,67	35 PMKS	65,71

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 35 dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2015 sudah mencapai target tahun 2015 yang telah ditetapkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 lebih rendah dari realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, tahun 2017 maka realisasi tahun 2016 masih di bawah target tahun 2017. Karena itu diperlukan upaya keras di tahun 2017 agar Sasaran 35 mencapai target 2017 yang telah ditetapkan.

### Sasaran 36 Terselenggaranya kerukunan kehidupan beragama

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 36, Terselenggaranya kerukunan kehidupan beragama, dengan dua indikator, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja 100% tergolong **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 36 disajikan berikut.



Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
% kesepakatan forum antar umat beragama	80,90	75,90%	100	100	100	100	100	100
Frekuensi pertemuan antar anggota forum	2	7	7	7	7	100	10	70
Rata-rata capaian						100		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 36 dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan dari dua indikator kinerja, semua indikator mencapai target tahun 2016.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 sama dengan realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan satu indikator kinerja sudah mencapai target tahun 2017, dan satu indikator kinerja lainnya belum mencapai target tahun 2017 yang telah ditetapkan. Karena itu masih diperlukan upaya di tahun 2017 agar Sasaran 36 bisa mencapai target tahun 2017.

### **Sasaran 37 Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 37, Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, dengan dua indikator kinerja, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja 100%, termasuk katagori **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 37 disajikan berikut.



Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
% penurunan kasus KDRT	57	57	100	100	100	100	100	100
% penurunan kasus kekerasan terhadap anak	70	80	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian						100		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 37 dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan dari dua indikator kinerja semua telah mencapai target tahun 2016.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 sama dengan realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 dari dua indikator kinerja, semuanya sudah mencapai target tahun 2017 yang telah ditetapkan. Capaian ini harus dipertahankan di tahun 2017.

Capaian Sasaran 37 dicapai melalui Program/kegiatan di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut.

1. Penguatan kelembagaan jaringan kerja gugus tugas trafficking, dengan anggaran Rp.26.425.000,- dan realisasi anggaran Rp.26.400.000,- (99,91%).
2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dengan anggaran Rp.26.580.300,- dan realisasi anggaran Rp.26.552.520,- (99,00%).
3. Fasilitasi operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dengan anggaran Rp.187.479.400,- dan realisasi anggaran Rp.187.095.800,- (99,89%) (LAKIP Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2016).



### Saran 38 Terwujudnya kota layak anak

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 38, Terwujudnya kota layak anak, dengan tiga indikator kinerja, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja 95,33% termasuk katagori **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 38 disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rasio luas terbuka yang dipergunakan bermain anak	1/250	1/250	1/250	1/250	1/250	100	1/250	100
% terlayannya bagi anak bermasalah melalui kegiatan konseling	80	80	100	100	100	100	100	100
Angka IPG	66,89	67,88 IPG	76,89	80	69	86	80 IPG	86
Rata-rata capaian						95,33		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 36 dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan dari tiga indikator kinerja, dua indikator kinerja telah mencapai target tahun 2016 yang telah ditetapkan, dan satu indikator kinerja lainnya belum mencapai target tahun 2016.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan dari tiga indikator kinerja, dua indikator kinerja realisasinya sama dengan realisasi tahun 2015, dan satu indikator kinerja realisasinya lebih rendah dari realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan dari tiga indikator kinerja, dua indikator sudah mencapai target tahun 2017, dan satu indikator belum mencapai target tahun 2017. Karena itu masih



diperlukan upaya di tahun 2017 agar Sasaran 38 bisa mencapai target tahun 2017 yang telah ditetapkan.

### **Sasaran 39 Terkendalinya jumlah penduduk**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 39, Terkendalinya jumlah penduduk, dengan tsatu indikator, diperoleh nilai capaian kinerja 119,67% tergolong katagori **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 39 disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Angka Unmet need	4,41	4,41	4,77	6	4,82	119,67	6	119,67

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 39 dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan lebih baik dari target tahun 2016 yang ditetapkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 kurang baik dibanding realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 lebih baik dari target tahun 2017. Capaian ini perlu dipertahankan di tahun 2017.

Capaian Sasaran 39 dicapai melalui Program Keluarga Berencana di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dengan anggaran Rp.1.424.707.850,- dan realisasi anggaran Rp.1.422.678.850,- (99,80%).

### **Sasaran 40 Meningkatnya luasan tumbuhnya vegetasi pada lahan kritis**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 40, Meningkatnya luasan tumbuhnya vegetasi pada lahan kritis, dengan satu indikator diperoleh nilai capaian kinerja 85% tergolong **Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 40 disajikan berikut.



Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
% tutupan vegetasi pada lahan kritis	1.000 m2	1.100 m2	1.018 m2	1.200	1.020 m2	85	1.400 m2	73

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 40 dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan tidak mencapai target tahun 2016 yang telah ditetapkan. .
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 melampaui realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan belum mencapai target tahun 2017 yang telah ditetapkan. Karena itu masih diperlukan upaya keras di tahun 2017 agar Sasaran 40 bisa mencapai target tahun 2017 yang telah ditetapkan.

#### Sasaran 41 Terwujudnya pelestarian dan kualitas lingkungan hidup

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 41, Terwujudnya pelestarian dan kualitas lingkungan hidup, dengan dua indikator, diperoleh nilai capaian kinerja sasaran 100 % termasuk katagori **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 41 disajikan sebagai berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Indeks Kualitas lingkungan hidup.	67,55	70,55 IKLH	70,55 IKLH	80	80	100	80	100
Meningkatnya kepatuhan terhadap lingkungan	14	14	18	18	18	100	20	90
Rata-rata capaian						100		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 41 dapat ditarik simpulan sebagai berikut.



1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan dari dua indikator kinerja, semua mencapai target tahun 2016 yang telah ditetapkan. .
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan dari dua indikator kinerja, satu indikator kinerja realisasinya sama dengan realisasi tahun 2015, dan satu indikator lainnya realisasinya melampaui realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan dari dua indikator kinerja, satu indikator kinerja belum mencapai target tahun 2017, dan satu indikator kinerja sudah mencapai target tahun 2017 yang telah ditetapkan. Karena itu diperlukan upaya keras di tahun 2017 agar Sasaran 41 bisa mencapai target tahun 2017 yang telah ditetapkan.

#### **Sasaran 42 Meningkatnya layanan tanggap darurat bencana**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 42, Meningkatnya layanan tanggap darurat bencana, dengan dua indikator kinerja, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja 92,50% tergolong **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 42 disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
% kejadian bencana yang terselesaikan < 24 jam	45,76	36,76	91	100	92	92	100%	92
% penanganan bencana sesuai SOP	56,88	75,88	92	100	93	93	100%	93
Rata-rata capaian						92,5		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 42 dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan dari dua indikator kinerja, semuanya belum mencapai target tahun 2016 yang telah ditetapkan. Namun capaian rata-rata 91,50% tergolong katagori Sangat Berhasil.



2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan, dari dua indikator kinerja, semuanya realisasinya melampaui realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan, dari dua indikator kinerja, semuanya realisasinya masih di bawah target tahun 2017 yang telah ditetapkan. Karena itu diperlukan upaya kerja keras di tahun 2017 agar Sasaran 42 bisa mencapai target tahun 2017 yang telah ditetapkan.

Capaian Sasaran 42 didukung oleh program di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut.

1. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, dengan anggaran Rp.2.067.846.329,13 dan realisasi anggaran Rp.1.942.755.091,00 (93,95%).
2. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, dengan anggaran Rp.303.507.000,00 dan realisasi anggaran Rp.295.347.191,00 (97,37%).

### Sasaran 43 Terwujudnya lingkungan bersih

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 43, Terwujudnya lingkungan bersih, dengan tiga indikator diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja 96,33% tergolong **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 43 disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
% tertatanya RTH	86	96	72	100	100	100	100	100
Terainya tropi Adipura	1 Tropi	0 Tropi	0 Tropi	1 Tropi	1 Tropi	100	1 Tropi	100
% masyarakat yang terlayani fasilitas (IPAL Komunal)	0,50	0,71	40	45	40	89	50	80
Rata-rata capaian						96,33		



Dari pengukuran capaian kinerja Sasran 43 dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan, dari tiga indikator kinerja, dua indikator kinerja mencapai target tahun 2016, dan satu indikator tidak mencapai target tahun 2016.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan, dari tiga indikator kinerja, dua indikator kinerja realisasinya melampaui realisasi tahun 2015, dan satu indikator realisasinya sama dengan realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan, dari tiga indikator kinerja, dua indikator kinerja realisasinya sudah mencapai target tahun 2017, satu indikator kinerja realisasinya belum mencapai target tahun 2017. Karena itu diperlukan kerja keras di tahun 2017 agar Sasaran 43 bisa mencapai target tahun 2017 yang telah ditetapkan.

Capaian Sasaran 43 didukung oleh pelaksanaan program di Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai berikut.

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan anggaran Rp.1.359.135.151,- dan realisasi anggaran Rp.1.170.374.100,- (86,11%) (LAKIP BLH Kabupaten Buleleng Tahun 2016).
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan anggaran Rp.14.738.935.000,- (LAKIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng Tahun 2016).
3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah, dengan anggaran Rp.1.206.889.000,- (LAKIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng Tahun 2016).
4. Pengembangan Kinerja Pengelolaan RTH, dengan anggaran Rp.9.487.625.000,- (LAKIP Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng Tahun 2016).

#### **Sasaran 44 Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 44, Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk, dengan dua indikator kinerja, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja 100% tergolong katagori **Sangat Berhasil**.



Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 44 disajikan sebagai berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
% jalan lingkungan yang tertata	21,14	42,14	31,08	90	90	100	100	90
% saluran drainase dalam kondisi baik	45,79	65,79	49,41	90	90	100	100	90
Rata-rata capaian						100		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 44 dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan dari dua indikator kinerja, semuanya mencapai target tahun 2016 yang telah ditetapkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan, dari dua indikator kinerja, semuanya realisasinya melampaui realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 menunjukkan, dari dua indikator kinerja, semuanya belum mencapai target tahun 2017 yang telah ditetapkan. Karena itu, diperlukan upaya serius di tahun 2017 agar Sasaran 44 bisa mencapai target tahun 2017 yang telah ditetapkan..

Capaian Sasaran 44 didukung oleh Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut.

1. Program pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh, dengan anggaran Rp.880.715.000,- dan realisasi anggaran Rp.116.667.950,- (13,25%) (LAKIP Dinas PU Tahun 2016).
2. Program pembangunan infrastruktur perdesaan, dengan anggaran Rp.2.155.563.683,00 dan realisasi anggaran Rp.623.615.183,00 (28,93%).
3. Program Pengendalian banjir, dengan anggaran Rp.1.241.295.100,00 dan realisasi anggaran Rp.1.174.560.513,00 (94,62%).

#### **Sasaran 45 Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 45, Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan, dengan satu indikator diperoleh nilai 100 % tergolong **Sangat Berhasil**



Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 45 disajikan berikut.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
% menurunnya pelanggaran masyarakat terhadap pemanfaatan Ruang.	7,89	15,78	70	70	70	100	70	100

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 45 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016 menunjukkan telah mencapai target tahun 2016 yang telah ditetapkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016 sama dengan realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016 sudah mencapai target tahun 2017. Capaian ini harus dipertahankan di tahun 2017.

Capaian Sasaran 45 didukung oleh pelaksanaan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Dinas Pekerjaan Umum, dengan anggaran Rp.62.581.700,00 dan realisasi anggaran Rp.59.058.950,00 (94,57%).

#### **Sasaran 46 Meningkatnya pemanfaatan sumber energi terbarukan**

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 46, Meningkatnya pemanfaatan sumber energi terbarukan, dengan dua indikator kinerja, diperoleh nilai rata-rata capaian 100% tergolong **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 46 disajikan berikut.



Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2016 Thd 2017
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rata-rata energi yang dihasilkan dari kotoran hewan	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	100	0,82	41
Rata-rata energi yang dihasilkan dari surya	70,56	70,56 amper	70,56	70,56	70,56	100	90 amper	78
Rata-rata capaian						100		

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 46 dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2016, menunjuk dari dua indikator, semua sudah mencapai target tahun 2016 yang telah ditetapkan.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, maka realisasi tahun 2016, dari dua indikator kinerja yang sudah terdata, semua realisasinya sama dengan realisasi tahun 2015.
3. Dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2017, maka realisasi tahun 2016, dari dua indikator, semua masih di bawah target tahun 2017 yang telah ditetapkan. Karena itu perlu upaya keras di tahun 2017 agar Sasaran 46 bisa mencapai target tahun 2017.

### **3.4 Akuntabilitas Keuangan**

Pengelolaan belanja daerah selama tahun 2016, menghasilkan efisiensi pengeluaran sebesar 17,34 %. yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 2.374.587.023.431,23 terealisasi sebesar Rp 2.200.205.551.472,22 dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 3.5



Tabel 3.5  
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2016

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6
	<b>BELANJA DAERAH</b>	2.374.587.023.431,23	2.200.205.551.472,22	92,66	(174.361.471.959,01)
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.369.560.719.162,71</b>	<b>1.274.346.715.665,05</b>	<b>93,02</b>	<b>(95.214.003.497,66)</b>
1	Belanja Pegawai	1.052.739.186.901,40	961.075.807.179,00	91,29	(91.683.579.722,40)
2	Belanja Hibah	82.499.834000,00	81.808.234.000,00	99,16	(691.600.000,00)
3	Belanja Bantuan Sosial	150.000.000,-	-	-	(150.000.000,00)
4	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota/pemerintahan desa	15.347.391.380,00	15.347.391.380,00	100,00	-
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ kab / kota/ pemerintahan desa dan partai politik	215.838.828.057,15	214.928.828.057,15	99,58	(910.000.000,00)
6.	Belanja tidak terduga	2.985.478.824,16	1.186.655.048,90	39,75	(1.198.823.755,26)
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.005.026.304.268,52</b>	<b>925.858.835.807,17</b>	<b>92,12</b>	<b>(79.167.468.461,35)</b>
1.	Belanja pegawai	49.544.098.198,90	56.958.805.794,55	114,97	7.414.707.595,65
2.	Belanja Barang dan Jasa	547.829.973.574,92	523.752.143.329,66	95,60	24.007.830.245,26
3.	Belanja Modal	407.652.232.494,70	345.147.886.682,96	84,67	(62.504.345.811,74)

Sumber data : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2016  
(Realisasi Belanja sebelum audit BPK)

### 3.4.1 Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Anggaran

Permasalahan utama pengelolaan anggaran belanja adalah terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola pemerintah daerah sebagai akibat masih relatif rendahnya proporsi PAD terhadap APBD Kabupaten Buleleng, sehingga sebagian besar sumber dana untuk membiayai pengeluaran/belanja berasal dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum dan dana perimbangan lainnya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.

Tingginya penyerapan dana untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, menyebabkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagian besar terserap untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Sehingga menyebabkan proporsi Belanja Daerah 60% untuk Belanja Tidak Langsung dan 40% untuk Belanja Langsung belum terpenuhi. Selain itu sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka untuk pemenuhan program dan kegiatan juga terbatas.



Belanja daerah dialokasikan dan dilaksanakan searah dengan prioritas program, kegiatan sesuai perencanaan strategis masing-masing satuan kerja dan mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang berubah (dinamis). Belanja daerah dialokasikan secara efisien dan efektif guna mewujudkan sasaran kinerja.

Disamping itu, juga terdapat permasalahan-permasalahan secara umum dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain :

- a. Rendahnya pencapaian realisasi pengeluaran terutama di belanja modal disebabkan adanya perubahan di dalam regulasi/peraturan dalam pengadaan belanja modal;
- b. Tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi sehubungan dengan telah bergesernya paradigma pengelolaan keuangan daerah pada SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah belum dipahami secara optimal;
- c. Kualitas sumber daya manusia/aparatur pemerintahan daerah belum memadai dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Upaya-upaya penanganan yang telah dilaksanakan antara lain :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak yang berkompeten untuk lebih mempercepat dan memperlancar proses pengadaan belanja modal;
- b. Melakukan pembinaan melalui konsultasi, fasilitasi, dan meningkatkan monitoring dan evaluasi kepada SKPD dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- c. Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Kursus-kursus singkat Pengelolaan Keuangan Daerah, guna meningkatkan kualitas SDM khususnya Pengelola Keuangan Daerah pada masing-masing SKPD.

### **3.5 Prestasi yang Dicapai Kabupaten Buleleng Tahun 2016**

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Buleleng, organisasi, kelompok, dan perorangan yang mewakili Kabupaten Buleleng telah mencapai prestasi dan mendapat penghargaan di tingkat I internasional, Nasional, Regional, dan Provinsi Bali sebagai berikut.



No	Jenis Penghargaan	Tingkat	Penerima
1	2	3	4
1	<i>Under Water Photography Competition, DSLR Catagory</i> Juara I,II,dan III	Internasional	Perorangan wakil Buleleng
2	<i>Under Water Photography Competition, Compact Catagory</i> Juara I,II,dan III	Internasional	Perorangan wakil Buleleng
3	Lomba Melukis Alam Laut, Juara I,II, dan III	Internasional	Perseorangan Wakil Buleleng
4	Lomba <i>Treasure Hunt</i>	Internasional	Wakil Buleleng
5	Anugrah Wahana Tata Nugraha katagori Lalu Lintas	Nasional	Pemerintah Kabupaten Buleleng
6	Adipura	Nasional	Pemerintah Kabupaten Buleleng
7	Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah	Nasional	Pemerintah Kabupaten Buleleng
8	Kalpataru katagori Pengabdian Lingkungan	Nasional	Neneng Adiningsih
9	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nasional	Pemerintah Kabupaten Buleleng
10	Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian	Nasional	Pemerintah Kabupaten Buleleng
11	Penyuluh Pertanian Teladan	Nasional	Emy Alberthina Rumlily, BPP Kecamatan Seririt.
12	Juara I Komoditas Kambing	Provinsi Bali	Kelompok Tani Ternak Bina Artha, Desa Bengkel
13	Juara II Komoditas Kambing	Provinsi Bali	Kelompok Tani Ternak Giri Arsa, Desa Wanagiri
14	Juara II Komoditas Ayam Buras	Provinsi Bali	Kelompok Tani Ternak Karya Busana, Desa



15 Juara II Komoditas Sapi

Provinsi Bali

Madenan

Kelompok Tani

Ternak, Artha

Sadhaya, Desa

Ambengan

**BAB IV  
P E N U T U P**

Bab IV

Memuat

4.1 Simpulan umum

4.2 Langkah Perbaikan ke Depan

**4.1 Simpulan Umum**

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menunjukkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Secara spesifik capaian kinerja berdasarkan evaluasi atas kinerja diberi predikat Sangat Berhasil, Berhasil, Cukup, Kurang, dan Sangat Kurang digambarkan pada Tabel 4.1

**Tabel 4.1 Simpulan Capaian Kinerja Sasaran Berdasarkan Evaluasi Kinerja**

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Persentase	Jumlah Indikator Kinerja	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Sangat Berhasil	38	82,61	81	81
2	Berhasil	4	8,70	10	10
3	Cukup	3	6,52	5	5
4	Kurang	1	2,17	3	3
5	Sangat Kurang	0		1	1
	Jumlah	46	100	100	100

Dari tabel 4.1 tampak dilihat dari capaian target Sasaran, 38 (82,61%) dari 46 Sasaran memperoleh predikat Sangat Berhasil, sedangkan hanya 1 (2,17%) memperoleh predikat Kurang. Dilihat dari Capaian target Indikator Kinerja, 81 (81%) dari 100 Indikator kinerja memperoleh predikat Sangat Berhasil, dan hanya 1 (1%) memperoleh predikat Sangat Kurang.



Akhirnya, dapat disimpulkan secara umum bahwa pencapaian target beberapa indikator sasaran yang dicantumkan dalam RPJMD Tahun 2012 -2017, khususnya untuk tahun anggaran 2016 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 4 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Buleleng, dan Perjanjian Kinerja Bupati Buleleng dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui karena semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia.

#### **4.2 Langkah Perbaikan ke Depan**

Dalam rangka mengefektifkan budaya kinerja, maka ke depan akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) Memperbaiki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- 2) Memantapkan penggunaan aplikasi e-SAKIP agar pengukuran capaian kinerja baik tingkat Kabupaten maupun tingkat OPD lebih terkendali dan termonitor dengan baik secara berkala.
- 3) Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menyusun Laporan Kinerja (LKj) akan diwajibkan menyajikan informasi capaian kinerja yang telah diperjanjikan disertai analisis dan evaluasi yang diperlukan, selain itu akan diwajibkan pula seluruh OPD menyajikan informasi penyerapan anggaran yang terkait dengan pencapaian kinerjanya disertai analisis atas efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerjanya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai evaluasi capaian kinerja dan bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah, akan dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan diterapkan dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LAKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat.

**Singaraja, 9 Maret 2016**

✓ Bupati Buleleng

PUTU AGUS SURADNYANA



**LKjIP KABUPATEN BULELENG** *Tahun*

*2016*

---



Lampiran 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA



No	Kinnerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form perhitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produktifitas komoditi pertanian dan perkebunan	1. Produktifitas Padi	Jumlah produksi Padi : hektar/areal	-(bidang produksi padi-P3W)Dinas Pertanian dan Peternakan	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
		2. Produktifitas hortikultura	Jumlah produksi hortikultura : ton/thn Jenis hortikutura (buah-buahan dan sayuran PUD)	Dinas pertanian dan peternakan (bidang)	Dinas pertanian dan peternakan
		3. Produktifitas palawija	Jumlah produksi palawija : hektar/areal	Dinas pertanian dan peternakan (bidang)	Dinas pertanian dan peternakan
		4. Produktifitas buah-buahan	Jumlah produksi buah-buahan : hektar/areal	Dinas pertanian dan peternakan (bidang)	Dinas pertanian dan peternakan
		5. Produktifitas komoditi perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan (ton) dibagi luas areal perkebunan(Hektar)	Dinas pertanian dan peternakan	Dinas pertanian dan peternakan
2	Meningkatnya populasi ternak	6. % Peningkatan Populasi Ternak sapi potong	Jumlah populasi ternak sapi potong tahun ini –tahun lalu dibagi tahun lalu dikali 100%	Dinas pertanian dan peternakan	Dinas pertanian dan peternakan
		7. Produksi Daging dan telur	Jumlah produksi daging dan telur ( ton/tahun)	Dinas pertanian dan peternakan	Dinas pertanian dan peternakan



## LKjIP KABUPATEN BULELENG Tahun 2016

No	Kinnerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form perhitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		8. Tingkat konsumsi daging.	Jumlah konsumsi daging perkapita/tahun	Bidang ketahanan pangan	BPMPD
3	Meningkatnya produksi perikanan	9. % peningkatan Produksi ikan yang ditangkap	Jumlah produksi ikan yg ditangkap tahun ini –jumlah produksi tahun lalu /tahun lalu X 100%	Bidang penangkapan Dinas perikanan dan kelautan	Dinas perikanan dan kelautan
		10. % peningkatan Produksi ikan yang dibudidaya	Jumlah produksi ikan yg dibudidaya tahun ini –jumlah produksi tahun lalu /tahun lalu X 100%	Dinas perikanan dan kelautan	Dinas perikanan dan kelautan
		11. Tingkat konsumsi ikan	Jumlah tingkat konsumsi ikan( kg/org/tahun)	Dinas perikanan dan kelautan	Dinas perikanan dan kelautan
4	Tersedia infrastruktur yang memadai	12. Jumlah daerah isolir yang dapat diakses/jalan non status	Jumlah daerah isolir yg dapat diakses	Dinas pekerjaan umum	Dinas pekerjaan umum
		13. Luasan sawah yang dapat diairi	Jumlah luasan sawah yang dapat diairi	Dinas pekerjaan umum	Dinas pekerjaan umum
5	Meningkatnya nilai investasi	14. % peningkatan nilai investasi	$\frac{\sum \text{nilai investasi n} - \text{nilai investasi n-1}}{\sum \text{nilai investasi n}} \times 100$	Bagian Ekbang	Bagian Ekbang
6	Terciptanya lapangan kerja bagi angkatan kerja.	15. % Masyarakat pencari kerja yang terserap pada lapangan kerja	$\frac{\sum \text{masyarakat pencari kerja yang sudah be kerja}}{\sum \text{masyarakat pencari kerja}} \times 100$	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi



## LKjIP KABUPATEN BULELENG Tahun 2016

No	Kinnerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form perhitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		16	% angka pengangguran $\frac{\sum \text{angka pengangguran}}{\sum \text{angkatan kerja}} \times 100$	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
7	Berkembangnya usaha koperasi dan UKM.	17.	% jumlah koperasi yang sehat $\frac{\sum \text{koperasi yang sehat}}{\sum \text{keseluruhan koperasi}} \times 100$	Dinas koperasi, perdagangan dan perindustrian	Dinas koperasi, perdagangan dan perindustrian
		18	% UMKM yang berkembang $\frac{\sum \text{berkembangnya jmlah UMKM}}{\sum \text{keseluruhan UMKM}} \times 100$	Dinas koperasi, perdagangan dan perindustrian	Dinas koperasi, perdagangan dan perindustrian
		19	Jumlah UMKM yang meningkat statusnya Jumlah usaha Mikro menjadi Kecil Jumlah usaha Kecil menjadi		
8	Terwujudnya industri ekonomi produktif/kreatif	20	% Pertumbuhan IKRT $\frac{\sum \text{pertumbuhan IKRT}}{\sum \text{keseluruhan IKRT}} \times 100$	Dinas koperasi, perdagangan dan perindustrian	Dinas koperasi, perdagangan dan perindustrian
9	Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen	21	% pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti $\frac{\sum \text{pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{keseluruhan pengaduaan}} \times 100$	Dinas koperasi, perdagangan dan perindustrian	Dinas koperasi, perdagangan dan perindustrian
		22	Indeks Kepuasan Konsumen	Angka/nilai	Dinas koperasi,



## LKjIP KABUPATEN BULELENG Tahun 2016

No	Kinnerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form perhitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
				perdagangan dan perindustrian	perdagangan dan perindustrian
10	Meningkatnya PAD	23. % Peningkatan PAD	$\frac{\sum PAD_n - PAD_{n-1}}{\sum PAD_n} \times 100$	Dinas Pendapatan	Dinas Pendapatan
11	Tuntasnya Wajib Belajar 9 tahun bagi anak usia sekolah	24. % anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 9 tahun	$\frac{\sum \text{anak yang lulus SMP}}{\sum \text{anak usia sekolah}} \times 100$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
12	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	25. APK SD	$\frac{\sum \text{siswa jenjang SD}}{\sum \text{penduduk usia 7-12th}} \times 100$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		26. APK SMP	$\frac{\sum \text{siswa jenjang SMP}}{\sum \text{penduduk usia 13-15th}} \times 100$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		27. APK SMA	$\frac{\sum \text{siswa jenjang SMA}}{\sum \text{penduduk usia 16-18th}} \times 100$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan



## LKjIP KABUPATEN BULELENG Tahun 2016

No	Kinnerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form perhitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		28 APK SMK	$\frac{\sum \text{siswa jenjang SMK}}{\sum \text{penduduk usia 16-18th}} \times 100$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		29. APM SD	$\frac{\sum \text{siswa usia 7-12 th jenjang SD}}{\sum \text{penduduk usia 7-12th}} \times 100$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		30 APM SMP	$\frac{\sum \text{siswa usia 13-15 th jenjang SMP}}{\sum \text{penduduk usia 13-15th}} \times 100$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		31 APM SMA	$\frac{\sum \text{siswa usia 16-18 th jenjang SMA}}{\sum \text{penduduk usia 16-18th}} \times 100$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
13	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pendidikan	32 Rata-rata nilai UN, UAS BN	$\frac{\sum \text{nilai UN}}{\sum \text{peserta UN}}$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		33 Peningkatan angka kelulusan	$\frac{\sum \text{Peserta yang lulus}}{\sum \text{Peserta ujian}} \times 100$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan



No	Kinnerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form perhitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		34 Peningkatan angka kenaikan kelas	$\frac{\sum B_{n-1} - B_n}{\sum B_{n-1}} \times 100$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		35 Siswa tamatan SMP yang melanjutkan	$\frac{\sum \text{siswa tamatan SMP melanjutkan}}{\sum \text{siswa SMP yang lulus}} \times 100$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		36 Siswa tamatan SMK yang bekerja	$\frac{\sum \text{lulusan SMK yang bekerja}}{\sum \text{siswa yang lulus SMK}} \times 100$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
14	Meningkatnya akses dan relevansi pendidikan menengah yang berkualitas.	37 Rasio ruangan SMA/ SMK/MA terhadap murid	$\frac{\sum \text{ruangan}}{\sum \text{murid}}$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		38 Rasio guru terhadap murid	$\frac{\sum \text{guru}}{\sum \text{murid}}$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
15	Meningkatnya kualitas pendidikan luar sekolah (PLS).	49 % penurunan angka buta huruf	$\frac{\sum \text{penduduk buta huruf}_{n-1} - \sum \text{penduduk buta huruf}_n}{\sum \text{penduduk buta huruf}_{n-1}} \times 100$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan



No	Kinnerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form perhitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		40 % penurunan angka putus sekolah	$\frac{\sum DO_{n-1} - DO_n}{\sum DO_{n-1}} \times 100$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
16	Meningkatnya akses dan investasi sarana dan prasarana pendidikan	41 Rasio ketersediaan SD/MI terhadap murid	$\frac{\sum \text{Ketersediaan ruang kelas SD/MI}}{\sum \text{murid SD/MI}}$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		42 Rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap murid	$\frac{\sum \text{Ketersediaan ruang kelas SMP/MTs}}{\sum \text{murid SMP/MTs}}$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		43 Rasio ketersediaan SMA/SMK/MA terhadap murid	$\frac{\sum \text{ketersediaan ruang kelas SMA/SMK/MA}}{\sum \text{murid SMA/SMK/MA}}$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
17	peningkatan perolehan medali dalam event Propinsi dan Nasional.	44 Peningkatan Perolehan Emas	$\frac{\sum \text{Perolehan emas}_n - \text{perolehan emas}_{n-1}}{\sum \text{perolehan emas}_n}$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		45 Peningkatan Perolehan Perak	$\frac{\sum \text{Perolehan perak}_n - \text{perolehan perak}_{n-1}}{\sum \text{perolehan perak}_n}$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan



## LKjIP KABUPATEN BULELENG Tahun 2016

No	Kinnerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form perhitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		46 Peningkatan Perolehan Perunggu	$\frac{\sum \text{Perolehan perunggu}_n - \text{perolehan perunggu}_{n-1}}{\sum \text{perolehan perunggu}_n}$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
18	Meningkatnya aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	47 % Desa/Kelurahan KLB dengan respons time <24 jam	$\frac{\sum \text{desa/kelurahan KLB dg respon time <24jam}}{\sum \text{keseluruhan KLB di Desa}} \times 100$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
19	Meningkatnya usian harapan hidup	48 % peningkatan usia harapan hidup	$\frac{\sum \text{usia harapan hidup}_n - \text{usia harapan hidup}_{n-1}}{\sum \text{angka harapan hidup}_n} \times 100$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
20	Meningkatnya ketersediaan tenaga medis dan para medis.	49 Rasio Tenaga medis dengan pasien	$\frac{\sum \text{tenaga medis}}{\sum \text{pasien}}$	RSUD	RSUD
		50 Rasio Tenaga para medis dengan Pasien	$\frac{\sum \text{tenaga para medis}}{\sum \text{pasien}}$	RSUD	RSUD



## LKjIP KABUPATEN BULELENG Tahun 2016

No	Kinnerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form perhitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
21	Menurunnya serangan penyakit menular.	51 Angka kesakitan DBD	$\frac{\sum \text{Angka kesakitan DBD}}{\sum \text{Keseluruhan penduduk}} = (,80/1000)$	Kabid Binkesga	Dinas Kesehatan
22	Meningkatnya pelayanan prima di RSUD	52 % pasien rawat jalan puas	$\frac{\sum \text{pasien rawat jalan yang puas}}{\sum \text{pasien rawat jalan}} \times 100 \%$	RSUD	RSUD
		53 % pasien rawat inap yang puas.	$\frac{\sum \text{pasien rawat inap yang puas}}{\sum \text{keseluruhan pasien rawat inap}} \times 100$	RSUD	RSUD
		54 IKM	Nilai IKM		
23	Terwujudnya pemerintahan yang bersih	55 Opini BPK	WTP	BPKAD	BPKAD
		56 % LHP yang ditindaklanjuti	$\frac{\sum \text{LHP yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Temuan dalam LHP}} \times 100$	Inspektorat	Inspektorat
24	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng	57 SKPD mencapai nilai CC	$\frac{\sum \text{SKPD mencapai nilai CC}}{\sum \text{keseluruhan SKPD}}$	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
25	Terwujudnya pelayanan perijinan yang cepat	58 penyelesaian penerbitan perijinan IMB < 14 hari	$\frac{\sum \text{penerbitan IMB <14 hari}}{\sum \text{penerbitan IMB <14 hari}}$	Kantor Perijinan terpadu	Badan Perijinan terpadu



## LKjIP KABUPATEN BULELENG Tahun 2016

No	Kinnerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form perhitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
	dan tepat		$\Sigma$ penerbitan IMB		
		59 IKM	total nilai persepsi per unsur di bagi total unsur terisi di kali nilai perimbang (0,071 x 25)	Kantor Perijinan terpadu	Badan Perijinan terpadu
		60 % Pengaduan masyarakat uang terselesaikan	$\frac{\Sigma \text{ Pengaduan masyarakat yang terselesaikan}}{\Sigma \text{ pengaduan masyarakat}} \times 100$	Kantor Perijinan terpadu	Badan Perijinan terpadu
26	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat buleleng	61 % rekomendasi bidang politik yang ditindaklanjuti	$\frac{\Sigma \text{ rekomendasi Bidang politik yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{ keseluruhan rekomendasi}} \times 100$	Kesbangpol	Kesbangpol
27	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	62 % menurunnya daerah-daerah rawan konflik	$\frac{\Sigma \text{ daerah rawan konflik}_{n-1} - \text{daerah rawan konflik}_n}{\Sigma \text{ daerah rawan konflik}_{n-1}} \times 100$	Kesbangpol	Kesbangpol
		63 % penindakan pelanggaran Perda dan Perbup	$\frac{\Sigma \text{ penindakan terhadap pelanggaran perda dan perbup}}{\Sigma \text{ keseluruhan perda dan perbup}} \times 100$	Satpol - PP	Satpol - PP
28	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	64 % SKPD dengan kualitas RENSTRA yang baik	$\frac{\Sigma \text{ SKPD kualitas renstra yang baik}}{\Sigma \text{ keseluruhan SKPD}} \times 100$	Bappeda	Bappeda



## LKjIP KABUPATEN BULELENG Tahun 2016

No	Kinnerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form perhitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		65	% usulan perencanaan yang disetujui DPRD  $\frac{\sum \text{usulan perencanaan yang disetujui DPRD}}{\sum \text{keseluruhan usulan}} \times 100$	Bappeda	Bappeda
29	Meningkatnya efektifitas penerapan E-Gov di lingkungan Pemkab.	66	% SKPD yang dapat mengakses jaringan e-Gov  $\frac{\sum \text{SKPD yang dapat mengakses jaringan e-Gov}}{\sum \text{keseluruhan SKPD}} \times 100$	Kominfo	Kominfo
30	Meningkatnya kunjungan wisatawan .	67	% Peningkatan Jumlah wisatawan  $\frac{\sum \text{wisatawan}_n - \sum \text{wisatawan}_{n-1}}{\sum \text{wisatawan}_n} \times 100$	Disbudpar	Disbudpar
		68	% peningkatan kontribusi kunjungan wisata  $\frac{\sum \text{kontribusi}_n - \text{kontribusi}_{n-1}}{\sum \text{kontribusi}_n} \times 100$	Disbudpar	Disbudpar
31	Terwujudnya pelestarian seni budaya buleleng	69	Jumlah sekaa/sanggar seni yang aktif	Disbudpar	Disbudpar
		70	Jumlah seniman berprestasi	Disbudpar	Disbudpar
32	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di	71	% tingkat akurasi data penduduk  $\frac{\sum \text{tingkat akurasi data penduduk}}{\sum \text{keseluruhan penduduk}} \times 100$	Disdukcapil	Disdukcapil



## LKjIP KABUPATEN BULELENG Tahun 2016

No	Kinnerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form perhitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
	wilayah Kabupaten Buleleng				
33	Meningkatnya layanan bidang administrasi kearsipan yang baik	72 Rata-rata waktu yg dibutuhkan mengakses arsip	$\frac{\sum \text{waktu yang dibutuhkan mengakses arsip}}{\sum \text{keseluruhan arsip}}$	Kantor perpustakaan dan arsip daerah	Kantor perpustakaan dan arsip daerah
		73 Indeks kepuasan pelanggan	Angka/nilai	Kantor perpustakaan dan arsip daerah	Kantor perpustakaan dan arsip daerah
34	Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	74 % penurunan angka kecelakaan lalu lintas	$\frac{\sum \text{kecelakaan}_{n-1} - \text{kecelakaan}_n}{\sum \text{kecelakaan}_{n-1}} \times 100 \%$	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		75 % armada yang beroperasi laik jalan	$\frac{\sum \text{armada beroperasi laik jalan}}{\sum \text{seluruh armada yang beroperasi}} \times 100 \%$		
		76. Rata-rata kecepatan di jalur kota	$\frac{\sum \text{kecepatan di jalur kota}}{\sum \text{keseluruhan kecepatan waktu tempuh}}$	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		77. % Penurunan titik macet	$\frac{\sum \text{titik macet}_{n-1} - \sum \text{titik macet}_n}{\sum \text{titik macet}_{n-1}} \times 100$	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		78. Perolehan WTN	Tropi WTN	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
35	Meningkatnya efektifitas pelayanan	79. Peningkatan PMKS yang mapan	$\sum \text{PMKS yang telah mapan}$	Dinas Sosial	Dinas Sosial



No	Kinnerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form perhitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
	terhadap PMKS		$\sum$ PMKS keseluruhan		
36	Terselenggaranya kerukunan kehidupan beragama.	80. % kesepakatan forum antar umat beragama	$\frac{\sum \text{kesepakatan forum antar umat beragama}}{\sum \text{keseluruhan kesepakatan}} \times 100$	Bagian Kesra	Bagian Kesra
		81. Frekuensi pertemuan antar anggota forum	Jumlah frekuensi pertemuan forum dalam 1 tahun	Bagian Kesra	Bagian Kesra
37	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	82. % penurunan kasus KDRT	$\frac{\sum \text{kasus KDRT}_{n-1} - \text{kasus KDRT}_n}{\sum \text{kasus KDRT}_{n-1}} \times 100$	Badan KB -PP	Badan KB -PP
		83. % penurunan kasus kekerasan terhadap anak	$\frac{\sum \text{kekerasaan anak}_{n-1} - \text{kekerasaan anak}_n}{\sum \text{kekerasaan anak}_{n-1}} \times 100$	Badan KB -PP	Badan KB -PP
38	Terwujudnya kota layak anak.	84 rasio luas areal terbuka yang dipergunakan bermain anak	$\frac{\sum \text{luas areal terbuka bermain anak}}{\sum \text{keseluruhan luas areal terbuka}} \times 100\%$	Badan KB -PP	Badan KB -PP
		85 % terlayannya bagi anak bermasalah melalui kegiatan konseling	$\frac{\sum \text{anak bermasalah melalui keg.konseling}}{\sum \text{keseluruhan anak bermasalah}} \times 100$	Badan KB -PP	Badan KB -PP



## LKjIP KABUPATEN BULELENG Tahun 2016

No	Kinnerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form perhitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		86. Angka IPG	nilai	Badan KB -PP	Badan KB -PP
39	Terkendalnya jumlah penduduk .	87. Angka Unmet need	Angka	Badan KB -PP	Badan KB -PP
40	Meningkatnya luasan tumbuhnya vegetasi pada lahan kritis.	88. tutupan vegetasi pada lahan kritis .	$\frac{\sum \text{tutupan vegetasi pada lahan kritis}}{\sum \text{keseluruhan tutupan vegetasi}} \times 100$	Dinas Kehutanan dan perkebunan	Dinas Kehutanan dan perkebunan
41	Terwujudnya pelestarian dan kualitas lingkungan hidup.	89. Indeks Kualitas lingkungan hidup.	Baku mutu udara Baku mutu air sungai Baku mutu lahan/tanah	Badan Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
		90. % meningkatnya kepatuhan terhadap lingkungan	$\frac{\sum \text{kasus lingkungan yang diselesaikan}}{\sum \text{keseluruhan kasus lingkungan yang ada}} \times 100$	Kantor Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
42	Meningkatnya layanan tanggap darurat bencana	91. % kejadian bencana yang terselesaikan < 24 jam	$\frac{\sum \text{kejadian bencana yang terselesaikan <24 jam}}{\sum \text{keseluruhan kejadian bencana.}} \times 100$	BPBD	BPBD
		92. % penanganan bencana sesuai SOP	$\frac{\sum \text{penanganan bencana sesuai SOP}}{\sum \text{keseluruhan penanganan bencana}} \times 100$	BPBD	BPBD



No	Kinnerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form perhitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
43	Terwujudnya lingkungan bersih	93. % tertatanya RTH	$\frac{\sum \text{RTH yang tertata}}{\sum \text{keseluruhan RTH}} \times 100$	DKP	DKP
		94. Terainya tropi Adipura	tropi		
		95. % masyarakat yang terlayani fasilitas (IPAL Komunal)	$\frac{\sum \text{masy.yang terlayani fasilitas IPAL komunal}}{\sum \text{keseluruhan masyarakat}} \times 100$	DKP	DKP
44	Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk	96. % jalan lingkungan yang tertata	$\frac{\sum \text{jalan lingkungan yang tertata}}{\sum \text{keseluruhan jalan lingkungan}} \times 100$	DINAS PU	DINAS PU
		97. % saluran drainase dalam kondisi baik	$\frac{\sum \text{saluran drainase dalam kondisi baik}}{\sum \text{keseluruhan saluran drainase}} \times 100$	DINAS PU	DINAS PU
45	Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan	98. % menurunnya pelanggaran masyarakat terhadap pemanfaatan Ruang.	$\frac{\sum P_{m_{n-1}} - \sum P_{m_n}}{\sum P_{m_{n-1}}} \times 100$	DINAS PU	DINAS PU



## LKjIP KABUPATEN BULELENG *Tahun 2016*

No	Kinnerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form perhitungan	Sumber data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
46	Meningkatnya pemanfaatan sumber energi terbarukan	99 Rata-rata energi yang dihasilkan dari kotoran hewan	$\frac{\sum \text{energi yang dihasilkan}}{\sum \text{kotoran hewan}} \times 100\%$	DPU	DPU
		100 Rata-rata energi yang dihasilkan dari surya	$\frac{\sum \text{energi yang dihasilkan}}{\sum \text{surya}} \times 100\%$	DPU	DPU



## LKjIP KABUPATEN BULELENG Tahun 2016

### Lampiran 2

**PERJANJIAN KINERJA BUPATI  
BULELENG  
TAHUN 2016**



No	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya produktifitas komoditi pertanian dan perkebunan	1. Produktifitas Padi	Kw/ha	56,40
		2. Produktifitas hortikultura	Ton/thn	8.900
		3. Produktifitas palawija	Ton/thn	41.700
		4. Produktifitas buah-buahan	Ton/thn	108.533
		5. Produktifitas komoditi perkebunan	Ton/thn	13.700
2	Meningkatnya populasi ternak	6. Populasi Ternak sapi	ekor	141.719
		7. Produksi Daging dan telur	Ton/thn	12.298,31
		8. Tingkat konsumsi daging.	Ton/thn	10.784
3	Meningkatnya produksi perikanan	9. Produksi ikan yang ditangkap	ton/thn	16.885
		10. Produksi ikan yang dibudidaya	ton/thn	1.315
		11. Tingkat konsumsi ikan	kg/Or/thn	35
4	Tersedia infrastruktur yang memadai	12. Jumlah daerah isolir yang dapat diakses/jalan non status	km	2.700
		13. Luasan sawah yang dapat diairi	Hektar	9.000
5	Meningkatnya nilai investasi	14. % peningkatan nilai investasi	%	
6	Terciptanya lapangan kerja bagi angkatan kerja.	15. % masyarakat pencari kerja yang terserap pada lapangan kerja	%	97,25%
		16. % angka pengangguran	%	3
7	Berkembangnya usaha koperasi dan UKM.	17. % jumlah koperasi yang sehat	%	90
		18. % UMKM yang berkembang	%	90
		19. Jumlah UMKM yang meningkat statusnya	UMKM	4.550
8	Terwujudnya industri ekonomi produktif/ kreatif	20. % Pertumbuhan IKRT	%	
9	Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen	21. % pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	%	100



## LKjIP KABUPATEN BULELENG Tahun 2016

No	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
		22. Indeks Kepuasan Konsumen	IKK	80
10	Meningkatnya PAD	23. Peningkatan PAD	Rp	281,216 (M)
11	Tuntasnya Wajib Belajar 9 tahun bagi anak usia sekolah	24. % anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 9 tahun	%	100
12	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	25. APK SD	%	100
		26. APK SMP	%	100
		27. APK SMA	%	97,50
		28. APK SMK	%	75
		29. APM SD	%	100
		30. APM SMP	%	100
		31. APM SMA	%	100
		32. APM SMK	%	100
13	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pendidikan	33. Rata-rata nilai UN, UAS BN	nilai	7,84
		34. Peningkatan angka kelulusan	nilai	100
		35. Peningkatan angka kenaikan kelas		100
		36. Siswa tamatan SMP yang melanjutkan		
14	Meningkatnya akses dan relevansi pendidikan menengah yang berkualitas.	37. Rasio ruangan SMA/ SMK/MA terhadap murid	Ruangan/murid	
		38. Rasio guru terhadap murid	Guru/murid	
15	Meningkatnya kualitas pendidikan luar sekolah (PLS).	39. % penurunan angka buta huruf		100
		40. % penurunan angka putus sekolah		100
16	Meningkatnya akses dan investasi sarana dan prasarana pendidikan	41. Rasio ketersediaan SD/MI terhadap murid	SD/MI/murid	0,0069
		42. Rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap murid	SMP/MTs/murid	0,0032
		43. Rasio ketersediaan SMA/SMK/MA terhadap murid	SMA/SMK/MA/murid	0,0032
17	peningkatan perolehan medali dalam event Propinsi dan Nasional.	44. Peningkatan Perolehan Emas	Medali	115
		45. Peningkatan Perolehan Perak	Medali	135
		46. Peningkatan Perolehan Perunggu	Medali	130
18	Meningkatnya aksesibilitas, pemerataan,	47. % Desa/Kelurahan KLB dengan respons time <24 jam	%	100



## LKjIP KABUPATEN BULELENG Tahun 2016

No	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	keterjangkauan, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.			
19	Meningkatnya usia harapan hidup	48 peningkatan usia harapan hidup	angka	72,25
20	Meningkatnya ketersediaan tenaga medis dan para medis.	49 Rasio Tenaga medis dengan pasien	Tenaga medis/pasien	0,003
		50 Rasio Tenaga para medis dengan Pasien	Tenaga para medis/pasien	0,025
21	Menurunnya serangan penyakit menular.	51 Angka kesakitan DBD	penduduk	<80/100
22	Meningkatnya pelayanan prima di RSUD	52 % pasien rawat jalan puas	%	100
		53 % pasien rawat inap yang puas.	%	100
		54 IKM	IKM	80
23	Terwujudnya pemerintahan yang bersih	55 Opini BPK	WTP	WTP
		56 % LHP yang ditindaklanjuti	%	80
24	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng	57 SKPD mencapai nilai B	nilai	B
25	Terwujudnya pelayanan perijinan yang cepat dan tepat	58 penyelesaian penerbitan perijinan IMB < 14 hari	ljin	1.100
		59 Angka IKM	IKM	80
		60 % pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100
26	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat buleleng	61 % rekomendasi bidang politik yang ditindaklanjuti	%	100
27	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	62 % menurunnya daerah-daerah rawan konflik	%	100
		63 % penindakan pelanggaran Perda dan Perbup	%	100
28	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	64 % SKPD dengan kualitas RENSTRA yang baik	%	100
		65 % usulan perencanaan yang disetujui DPRD	%	100
29	Meningkatnya	66 % SKPD yang dapat mengakses	%	90



## LKjIP KABUPATEN BULELENG Tahun 2016

No	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	efektifitas penerapan E-Gov di lingkungan Pemkab.	jaringan e-Gov		
30	Meningkatnya kunjungan wisatawan .	67 % Peningkatan Jumlah wisatawan	%	
		68 % peningkatan Kontribusi kunjungan wisata	%	
31	Terwujudnya pelestarian seni budaya buleleng	69 Jumlah sekaa/sanggar seni yang aktif	sanggar	61
		70 Jumlah seniman berprestasi	seniman	170
32	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Buleleng	71 % tingkat akurasi data penduduk	%	100
33	Meningkatnya layanan bidang administrasi kearsipan yang baik	72 Rata-rata waktu yg dibutuhkan mengakses arsip	Menit	5
		73 Indeks kepuasan pelanggan	IKP	80
34	Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	74 % penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	12,5
		75 % armada yang beroperasi laik jalan	%	8,42
		76. Rata-rata kecepatan di jalur kota	Menit	30
		77. % Penurunan titik macet	%	3,56
		78. Perolehan WTN	Tropi	WTN
35	Meningkatnya efektifitas pelayanan terhadap PMKS	79. Peningkatan PMKS yang mapan	PMKS	20
36	Terselenggaranya kerukunan kehidupan beragama.	80. % kesepakatan forum antar umat beragama	%	100
		81. Frekuensi pertemuan antar anggota forum	Pertemuan	7
37	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	82. % penurunan kasus KDRT	%	100
		83. % penurunan kasus kekerasan terhadap anak	%	100
38	Terwujudnya kota layak anak.	84 rasio luas terbuka yang dipergunakan bermain anak	Luas terbuka/bermain anak	1/250
		85 % terlayannya bagi anak bermasalah melalui kegiatan	%	100



## LKjIP KABUPATEN BULELENG Tahun 2016

No	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4	5
		konseling		
		86 Angka IPG	Angka	80 IPG
39	Terkendalinya jumlah penduduk .	87. Angka Unmet need		6
40	Meningkatnya luasan tumbuhnya vegetasi pada lahan kritis.	88. Tutupan vegetasi pada lahan kritis .	m2	1.200
41	Terwujudnya pelestarian dan kualitas lingkungan hidup.	89. Indeks Kualitas lingkungan hidup.	IKLH	80
		90 Meningkatkan kepatuhan terhadap lingkungan		
42	Meningkatnya layanan tanggap darurat bencana	91 % kejadian bencana yang terselesaikan < 24 jam	%	100
		92 % penanganan bencana sesuai SOP	%	100
43	Terwujudnya lingkungan bersih	93. %tertatanya RTH	%	100
		94. Teraihnya tropi Adipura	Tropi	1
		95 % masyarakat yang terlayani fasilitas (IPAL Komunal)	%	45
44	Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk	96 % jalan lingkungan yang tertata	%	90
		97 % saluran drainase dalam kondisi baik	%	90
45	Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan	98. % menurunnya pelanggaran masyarakat terhadap pemanfaatan Ruang.	%	70
46	Meningkatnya pemanfaatan sumber energi terbarukan	99. Rata-rata energi yang dihasilkan dari sampah	Energi/sampah/gas	0,34
		100 Rata-rata energi yang dihasilkan dari surya	Energi/surya/ amper	70,56



## LKjIP KABUPATEN BULELENG Tahun 2016

### PROGRAM DAN ANGGARAN UNTUK MEREALISASIKAN PERJANJIAN KINERJA

No	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan	4.940.770.000,-
2	Peningkatan produksi hasil peternakan	1.630.000.000,-
3	Pengembangan budidaya perikanan	2.270.256.000,-
4	Pengembangan perikanan tangkap	915.319.000,-
5	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	193.000.000,-
6	Pengembangan dan pengelolaan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	5.790.264.900,-
7	Peningkatan kesempatan kerja	1.253.310.000,-
8	Pengembangan sistem pendukung UMKM	120.000.000,-
9	Pengembangan industri kecil dan menengah	30.000.000,-
10	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	343.000.000,-
11	Wajib belajar pendidikan 9 tahun	110.330.285.000,-
12	Pendidikan menengah	50.213.240.000,-
13	Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu	1.077.200.000,-
14	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1.164.980.000,-
15	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	277.200.000,-
16	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	6.673.767.000,-
17	Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan	100.300.000.000,-
18	Peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	3.322.480.000
19	Peningkatan sistem pengawasan internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.	1.467.362.625,-
20	Peningkatan kelembagaan dan kinerja aparatur.	966.300.000,-
21	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.	1.187.400.000,-
22	Perencanaan pembangunan daerah.	2.204.750.000,-
23	Pengembangan informasi, komunikasi, dan media massa.	1.435.000.000,-
24	Pengembangan nilai budaya.	712.000.000,-
25	Pengembangan pemasaran pariwisata.	934.000.000,-
26	Penataan administrasi kependudukan	1.708.566.000,-
27	Perbaikan sistem administrasi kearsipan.	56.733.000,-
28	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas.	951.068.000,-
29	Pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya.	757.400.000,-
30	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.	459.990.000,-
31	Keluarga Berencana	1.000.477.000,-
32	Pembinaan anak terlantar.	191.000.000,-
33	Rehabilitasi hutan dan lahan	1.467.660.000,-
34	Perlindungan dan konservasi SDA.	110.000.000,-
35	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	2.048.643.000,-
36	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	3.315.223.000,-
37	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.	17.518.288.000,-



## LKjIP KABUPATEN BULELENG Tahun 2016

No	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3
38	Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan	22.169.680.740,-
39	Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.	3.568.350.000,-
40	Pengembangan infrastruktur wilayah perdesaan.	3.886.787.300,-
41	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.	330.000.000,-
42	Pengendalian pemanfaatan ruang.	62.555.000,-
43	Pendidikan politik masyarakat	446.300.000,-

Singaraja, 20 Januari 2016

Bupati Buleleng,

Ttd

**Putu Agus Suradnyana**



Lampiran 3

**HASIL PENGUKURAN KINERJA  
SASARAN STRATEGIS**



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2015 Thd 2017
					Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian dan perkebunan	1. Produktivitas Padi (Kw/Ha)(Kw/Ha)	59,80	30,98	60,66	56,40	59,77	105,98	56,54	105,71
	2. Produktivitas hortikultura (Ton/Thn)	7.780	7.680	11.949	8.900	22.954	263,69	8.880	257,31
	3. Produktivitas palawija (Ton/Tahun)	39.294	39.294	50.895	41.700	51.966	124,62	42.534	122,17
	4. Produktifitas buah-buahan (Kw/Ha)	65.934	97.789	115.449	108.533	108.570	100,03	113.959	95,27
	5. Produktifitas komoditas perkebunan (Ton/Thn)	13.854	14.245	29.037,62	25.000	29.037,62	116,15	18.200	159,55
	<b>Rata-rata capaian</b>						<b>143,09</b>		
2 Meningkatnya populasi ternak	6 Populasi Ternak sapi (ekor)	130.551	130.551	119.272,00	141.719	125.408	88,49	143.136	87,61
	7 Produksi Daging dan telur (Ton)	16.335,90	7.355,90	9.711,00	12.298,31	12.353,65	100,45	12.559,41	98,36
	8 Tingkat konsumsi daging. (Ton/thn)	6.442,98	12.779,98	10.919,10	10.784,61	11.173,15	103,60	17.629,86	63,38
	<b>Rata-rata capaian</b>						<b>97,51</b>		
3 Meningkatnya produksi perikanan	9 Produksi ikan yang ditangkap (Ton/Thn)	14.384	17.809,2	16.318,40	16.885	16.509,6	97,78	17.916,90	92,14
	10 Produksi ikan yang dibudidaya (Ton/Thn)	1.979,7	2.055,2	3.216,80	1.315	3.493,4	265,66	1.447,80	241,49
	11 Tingkat konsumsi ikan	25,8	30,9	31,23	35	33,60	112	30,00	112



## LKJIP KABUPATEN BULELENG Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2015 Thd 2017
					Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(Kg/org/thn)								
	Rata-rata capaian						158,48		
4 Tersedia infrastruktur yang memadai	12 Jumlah daerah isolir yang dapat diakses /jalan non status(km)	1.980,37	2.464,13	2.464,13	2.700	2.700	100	2.700	100
	13 Luasan sawah yang dapat diairi (Hektar)	7.890	8.216	7.986,00	9.000	7.986	88,73	12.036,00	66,35
	Rata-rata capaian						94,36		
5 Meningkatnya nilai investasi	14 % Peningkatan nilai investasi	30,7	65,75	70,75	100	100	100	100%	100
6 Terserapnya angkatan kerja pada lapangan kerja	15 % Masyarakat pencari kerja yang terserap pada lapangan kerja		28,72	41,40	97,25	60	61,70	97,25	61,70
	16 % angka pengangguran	1,13	2,13	2,90	<3	2,70	100	<3	100
	Rata-rata capaian						80,85		
7 Berkembangnya usaha koperasi dan UKM	17 % jumlah koperasi yang sehat	54,6	88,97%	84,82	90	84,82	94,24	100	84,82
	18 % UMKM yang berkembang	75,76	89	100,00	90	100	100	100%	100
	19 Jumlah UMKM yang meningkat statusnya	2.877	3.826	4.524	4.550	4.550	100	4.550	100
	Rata-rata capaian						98,88		
8 Terwujudnya industri ekonomi produktif/kreatif	20 % Pertumbuhan IKRT	65,89	93	100,00	100	69,23	69,23	100,00	69,23
9 Terwujudnya perlindungan terhadap konsumen	21 % pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	15,78	25	100,00	100	100	100	100	100
	22 Indeks Kepuasan Konsumen	70,55	80	76,67	80	80	100	80	100
	Rata-rata capaian						89,74		



## LKJIP KABUPATEN BULELENG Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2015 Thd 2017
					Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23 Peningkatan PAD	160.292 (M)	219,603 (M)	292,939 (M)	281,216 (M)	282,111 (M)	100,32	365,581 (M)	77,17
11 Tuntasnya Wajib Belajar 9 tahun bagi anak usia sekolah	24 % anak usia sekolah yang tuntas wajib belajar 9 tahun	94,5	94,2	97,86	100	94,60	94,60	100	94,60
12 Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	25 APK SD	109,87	106,15	107,50	100	104,46	97,17%	101,86	102,5
	26 APK SMP	101,08	99,54	99,30	100	104,23	104,96%	101,86	102,23
	27 APK SMA	106,19	86,71	90,89	97,50	86,56	88,8	100	86,56
	28 APK SMK	106,19	86,71	74,25	75	86,56	115,3	100	86,56
	29 APM SD	100,03	98,06	98,90	100	96,09	96,09	100	96,09
	30 APM SMP	88,73	77,34	79,23	100	94,60	94,60	100	94,66
	31 APM SMA	101,53	75,01	77,86	100	61,52	61,52	100	64,52
	32 APM SMK	101,53	75,01	76,25	100	61,52	61,52	100	64,52
	Rata-rata capaian						91,56		
13 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pendidikan	33 Rata-rata nilai UN, UAS BN	7,36	7,42	7,17	7,84	6,96	90	7,84	90
	34 Peningkatan angka kelulusan (%)	99,49	99,6	99,95	100	100	100	100,00	99,99
	35 Peningkatan angka kenaikan kelas (%)	100,00	100,00	100	100	100	100	100,00	100
	36 Siswa tamatan SMP yang melanjutkan (%)	10.101	10.101	100	10.500	9.088	86,55	100%	86,55
	Rata-rata capaian						94,14		
14 Meningkatnya akses dan relevansi pendidikan menengah yang berkualitas	37 Rasio SMA/ SMK/MA terhadap murid	0,0026	0,0026	0,0032	0,0067	0,0067	100	0,0067	100



## LKJIP KABUPATEN BULELENG *Tahun 2016*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2015 Thd 2017
					Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	38 Rasio guru terhadap murid	0,0447	0,0447	0,0490	0,0495	0,0495	100	0,0495	100
	<b>Rata-rata capaian</b>						100		
15 Meningkatnya kualitas pendidikan luar sekolah (PLS)	39 Penurunan angka buta huruf (%)	2,45	2,45	100	100	100	100	100	100
	40 % penurunan angka putus sekolah	34,77	83,70	365	100	46	100	100	46
	<b>Rata-rata capaian</b>						73		
16 Meningkatnya akses dan investasi sarana dan prasarana pendidikan	41 Rasio ketersediaan SD/MI terhadap murid	0,0067	0,0067	0,0069	0,0069	0,0069	100	0,0069	100
	42 Rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap murid	0,0026	0,0026	0,0032	0,0032	0,0032	100	0,0032	100
	43 Rasio ketersediaan SMA/SMK/MA terhadap murid	0,0026	0,0026	0,0032	0,0032	0,0032	100	0,0032	100
	<b>Rata-rata capaian</b>						100		
17 Peningkatan perolehan medali dalam event Provinsi dan Nasional	44 Peningkatan Perolehan Emas	114,85%	112 Medali	105	115	58	50,43	130	44,61
	45 Peningkatan Perolehan Perak	104,39%	130 Medali	126	135	58	42,96	140	41,43
	46 Peningkatan Perolehan Perunggu	106,00%	142 Medali	123	130	86	66,15	150	57,33
	<b>Rata-rata capaian</b>						53,18		
18 Meningkatnya aksesibilitas, pemerataan, eterjangkauan, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	47 % Desa/Kelurahan yang memiliki puskesmas dengan respons time <24 jam	100	100	100	100	100	100	100	100
19 Meningkatnya usia harapan hidup	48 Usia harapan hidup	67	71,60	70,00*	72	70,81	97,22	73,10	96,87



## LKJIP KABUPATEN BULELENG *Tahun 2016*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2015 Thd 2017
					Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20 Meningkatkan ketersediaan tenaga medis dan paramedis	49 Rasio Tenaga medis dengan pasien	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	100	0,003	100
	50 Rasio Tenaga para medis dengan Pasien	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	100	0,025	100
Rata-rata capaian							100		
21 Menurunnya serangan penyakit menular	51 Angka kesakitan DBD	<80/1000	<80/1000,	<80/1000	<80/1000	<80/1000	100	<80/1000	100
22 Meningkatnya pelayanan prima RSUD	52 % pasien rawat jalan puas	78,70	98,08	100	100	100	100	100	100
	53 % pasien rawat inap yang puas.	80,70	97,70	99,00	100	99,38	100	100	99,38
	54 IKM	77,89	77,89	96,66IKM	80	97,23	121,5	80	97,38
Rata-rata capaian							106,96		
23 Terwujudnya pemerintahan yang bersih	55 Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
	56 % LHP yang ditindaklanjuti		73,01	79,11	80	81,34	101,6	100	81,34
Rata-rata capaian							100,8		
24 Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Buleleng	57 SKPD mencapai nilai B		C	B	B	B	100	B	100
25 Terwujudnya pelayanan perijinan yang cepat dan tepat	58 Penyelesaian penerbitan perijinan IMB < 14 hari	1.000	1.000 Ijin	1.105	1.100	1.385	126	1.500	92,3
	59 Angka IKM	80	70,75 IKM	80,25	80	80,25	100,3	80	100,3
	60 % pengaduan masyarakat yang terselesaikan	45,78	75,78	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian							108,76		
26 Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	61 % rekomendasi bidang politik yang ditindaklanjuti	100	100	100 %	100	100	100	100	100



## LKJIP KABUPATEN BULELENG Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2015 Thd 2017
					Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27 Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	62 % menurunnya daerah-daerah rawan konflik	20,34	33,34%	65%	100	70	70	100	70
	63 % penindakan pelanggaran Perda dan Perbup	15,78	27,59%	70	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian							85		
28 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	64 % SKPD dengan kualitas RENSTRA yang baik	85,75	90	100	100	100	100	100	100
	65 % usulan perencanaan yang disetujui DPRD	77,78	80	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian							100		
29 Meningkatnya efektivitas penerapan E-Gov. di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng	66 % SKPD yang dapat mengakses jaringan e-Gov	80,75	85,75	51,06	100	100	100	100	100
30 Meningkatnya kunjungan wisatawan	67 % Peningkatan Jumlah wisatawan*	658.147	663.826	702.944	110	98	89	100	98
	68 % peningkatan kontribusi kunjungan wisata*		34	103,00	111	177	159	100	177
Rata-rata capaian							124		
31 Terwujudnya pelestarian seni budaya Buleleng	69 Jumlah sekaa/sanggar seni yang aktif	2.200	2.500 sanggar	2.020	2110	2216	105	2.200	100,73
	70 Jumlah seniman berprestasi	170	180 seniman	201	170	180	105,88	170	105,88
Rata-rata capaian							105,44		
32 Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Buleleng	71 % tingkat akurasi data penduduk	90,62	90,62	91,31 %	100	91	91	100	91
33 Meningkatnya layanan bidang administrasi kearsipan yang baik	72 Rata-rata waktu yg dibutuhkan mengakses arsip	15 Menit	5 Menit	5 Menit	5 Menit	5 Menit	100	5 Menit	100
	73 Indeks kepuasan	75,78	74,06	74,06	80	80	100	80	100



## LKJIP KABUPATEN BULELENG Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2015 Thd 2017	
					Target	Realisasi	Capaian %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	pelanggan									
	Rata-rata capaian						100			
34 Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	74 % penurunan angka kecelakaan lalu lintas	15,34	29,34 %	20	12,5	12,5	100	25%		
	75 % armada yang beroperasi laik jalan	65,37	88,37 %	75	80,42	80,42	100	100%	80,42	
	76 Rata-rata kecepatan di jalur kota	1,75menit/meter	0,75	30	30	30	30	100	30	100
	77 % Penurunan titik macet	10,75	18,75 %	15	3,56	3,56	3,56	100	25%	
	78 Perolehan WTN	1 Tropi	1 Tropi	1 Trop1	1 Tropi	1 Tropi	1 Tropi	100	1 Tropi	100
	Rata-rata capaian						100			
35, Meningkatnya efektivitas pelayanan terhadap PMKS	79. Peningkatan PMKS yang mapan	15 PMKS	25 PMKS	30PMKS	30	23	76,67	35 PMKS	65,77	
36 Terselenggaranya kerukunan kehidupan beragama	80 % kesepakatan forum antar umat beragama	80,90	75,90%	100	100	100	100	100	100	
	81 Frekuensi pertemuan antar anggota forum	2	7	7	7	7	100	10	70	
	Rata-rata capaian						100			
37 Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	82 % penurunan kasus KDRT	57	57	100	100	100	100	100	100	
	83 % penurunan kasus kekerasan terhadap anak	70	80	100	100	100	100	100	100	
	Rata-rata capaian						100			
38 Terwujudnya kota layak anak	84 Rasio luas terbuka yang dipergunakan bermain anak	1/250	1/250	1/250	1/250	1/250	100	1/250	100	



## LKJIP KABUPATEN BULELENG *Tahun 2016*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2015 Thd 2017
					Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85 % terlayannya bagi anak bermasalah melalui kegiatan konseling	80	80	100	100	100	100	100	100
	86 Angka IPG	66,89	67,88 IPG	76,89	80	69	86	80 IPG	86
	<b>Rata-rata capaian</b>						<b>95,33</b>		
39 Terkendalinya jumlah penduduk	87 Angka Unmet need	4,41		4,41	6	4,82	119,67	6	119,67
40 Meningkatnya luasan tumbuhnya vegetasi pada lahan kritis	88. Tutupan vegetasi pada lahan kritis	1.000 m2	1.100 m2	1.018 m2	1.200	1.020	85	1.400 m2	73
41 Terwujudnya pelestarian dan kualitas lingkungan hidup	89 Indeks Kualitas lingkungan hidup.	67,55	70,55 IKLH	70,55 IKLH	80	80	100	80	100
	90 Meningkatnya kepatuhan terhadap lingkungan	14	14	18	18	18	100	20	90
	<b>Rata-rata Capaian</b>						<b>100</b>		
42 Meningkatnya layanan tanggap darurat bencana	91 % kejadian bencana yang terselesaikan < 24 jam	45,76	36,76	91	100	92	92	100%	92
	92 % penanganan bencana sesuai SOP	56,88	75,88	92	100	93	93	100%	93
	<b>Rata-rata capaian</b>						<b>92,5</b>		
43 Terwujudnya lingkungan bersih	93 % tertatanya RTH	86	96	72	100	100	100	100	100
	94 Terainya tropi Adipura	1 Tropi	0 Tropi	0 Tropi	1 Tropi	1 Tropi	100%	1 Tropi	100
	95 % masyarakat yang terlayani fasilitas (IPAL Komunal)	0,50	0,71	40	45	40	89	50	80
	<b>Rata-rata capaian</b>						<b>96,33</b>		



## LKJIP KABUPATEN BULELENG *Tahun 2016*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Tahun 2016			Target 2017	Capaian 2015 Thd 2017
					Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44 Tertatanya lingkungan pemukiman penduduk	96. % jalan lingkungan yang tertata	21,14	42,14	31,08	90	90	100	100	90
	97. % saluran drainase dalam kondisi baik	45,79	65,79	49,41	90	90	100	100	90
	Rata-rata capaian						100		
45 Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan	98. % menurunnya pelanggaran masyarakat terhadap pemanfaatan Ruang.	7,89	15,78	70	70	70	100	70	100
46 Meningkatnya pemanfaatan sumber energi terbarukan	99 Rata-rata energi yang dihasilkan dari kotoran hewan	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	100	0,82	41
	100 Rata-rata energi yang dihasilkan dari surya	70,56	70,56 amper	70,56	70,56	70,56	100	90 amper	98
	Rata-rata capaian						100		